



PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA



annual report 2014

DAFTAR ISI | CONTENTS

Kepastian Pertumbuhan	2	<i>Growth Through Certainty</i>
Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Tahunan 2014	3	<i>Responsibility of Management of The Annual Report 2014</i>
Keunggulan Perusahaan	4	<i>Company Benefits</i>
Pencapaian Perusahaan Tahun 2014	4	<i>Achievements of the Company 2014</i>
Ikhtisar Laporan Keuangan	5	<i>Summary of Financial Statements</i>
Laporan Kepada Pemegang Saham	6	<i>Report for Share Holders</i>
Laporan Dewan Komisaris	6	<i>Report of the Board of Commissioners</i>
Laporan Direksi	11	<i>Report of the Board of Directors</i>
Profil Perusahaan	15	<i>Company's Profile</i>
Analisis Pembahasan Manajemen	24	<i>Management Discussion & Analysis</i>
Tata Kelola Perusahaan	40	<i>Corporate governance</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian	77	<i>Consolidated Financial Statements</i>

Sebagai perusahaan transportasi batubara penunjang PT PLN (Persero), PT Pelayaran Bahtera Adhiguna terus berusaha menjalankan operasi bisnisnya dengan selalu menerapkan prinsip tata kelola yang baik, kerjasama yang harmonis dengan pemangku kepentingan serta menjaga kelestarian alam. Menyadari sepenuhnya bahwa bisnis energi ini memiliki persaingan yang semakin ketat, penuh tantangan dan tanggung jawab, untuk itu diperlukan pelaksanaan kerja yang prima (ekselen).

As a supporter of coal transportation company PT PLN (Persero), PT Pelayaran Bahtera Adhiguna continue to run its business operations by always applying the principles of good governance, a harmonious cooperation with stakeholders and preserve nature. Fully aware that the energy business has increasingly fierce competition, full of challenges and responsibilities, it is necessary for the implementation of workplace excellence (excellence).

Untuk mencapai tujuan menjadi World Class Service Company, sangat dipahami bahwa segala sesuatu tidak cukup bila hanya berjalan dengan baik. Lebih dari itu, seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan benar, cepat dan fokus pada hasil terbaik. Itulah yang disebut sebagai eksekusi ekselen.

To achieve the goal of becoming World Class Service Company, it is understood that everything is not enough just to run well. Moreover, all work must be carried out correctly, quickly and focus on the best results. That is what is referred to as execution excellence.

Dimulai dari penerapan tata kelola Perusahaan yang andal, sistem dan prosedur kerja serta standar-standar yang sejalan dengan proses bisnis, setiap orang memahami dan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja PT Pelayaran Bahtera Adhiguna secara keseluruhan.

Starting from the application of reliable corporate governance, systems and work procedures and standards that are in line with business processes, every person understand and carry out their work in accordance with established procedures, so as to boost the overall performance of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Tentunya ini semua membutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama semua pihak agar eksekusi ekselen menjadi sebuah kebiasaan dan cerminan budaya. Proses ini dijalani dengan bergandengan tangan bersama semua pemangku kepentingan. Dengan mengedepankan eksekusi ekselen yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan, maka dapat dikatakan bahwa PT Pelayaran Bahtera Adhiguna menuju World class Company.

Obviously this all takes hard work, smart work, and the cooperation of all parties to execution excellence becomes a habit and cultural reflection. This process is undertaken by hand in hand together with all stakeholders. By prioritizing excellence execution earnest and sustained, it can be said that the PT Pelayaran Bahtera Adhiguna becoming a World Class Company.

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN TAHUNAN 2014

RESPONSIBILITY OF MANAGEMENT OF THE ANNUAL REPORT 2014

Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelayaran Bahtera Adhiguna bertanggung jawab atas Laporan Tahunan ini, berikut informasi keuangan dan informasi lain yang terkait, yang telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing dibawah ini.

Board of Commissioners and Directors of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna are responsible for this Annual Report, the following financial information and other relevant information, which has been approved by the Board of Commissioners and Board of Directors to sign the respective below.



MUHAMMAD IKBAL NUR



BIMA PUTRAJAYA



SUBAGIO UTOMO



SURYA FITRIADI

KEUNGGULAN PERUSAHAAN

1. Berdasarkan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau maka dibutuhkan transportasi laut
2. Mempunyai pangsa pasar yang pasti serta memiliki kontrak jangka panjang
3. Peluang mendapatkan supply batubara pembangkit Indonesia Timur

PENCAPAIAN PERUSAHAAN TAHUN 2014

Aspek Keuangan dan Operasional

1. Laba bersih komprehensif pada tahun 2014 sebesar Rp 114,587 juta atau meningkat 104.14% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp -4,749 juta.
2. Pendapatan usaha pada tahun 2014 sebesar Rp 1,278,972 juta atau meningkat 40.25% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 764,157 juta.
3. Jumlah aset perusahaan pada tahun 2014 sebesar Rp 1,468,923 juta atau meningkat 26.47% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 1,080,107 juta.
4. Jumlah shipment / angkutan pada tahun 2014 mencapai 960 shipment meningkat 28.33% dibandingkan tahun 2013 sejumlah 688 shipment.
5. Jumlah tonase angkutan batubara yang diangkut perusahaan pada tahun 2014 sebesar 14,147 ribu MT meningkat 26.39% dibandingkan tahun 2013 sebesar 10,413 ribu MT.

Aspek Non Keuangan dan Operasional

1. Deklarasi BAg bersih pada tanggal 17 Desember 2014
2. First Cutting 2 set Tug & Barges di PT Galangan Mercusuar pada bulan 7 April 2014
3. Transaksi Pembelian Kapal MV Arimbi Baruna di Singapura pada tanggal 12 Desember 2014.
4. Perluasan wilayah operasi BAg di Indonesia Timur
5. Ditunjuknya BAg sebagai satu-satunya perusahaan pelayaran di Indonesia yang mengoperasikan kapal CNG
6. Pengoperasian kembali kantor lama BAg setelah dilakukannya renovasi pada tanggal 13 Desember 2014

COMPANY BENEFITS

1. Based on the geographical condition of Indonesia which consists from many islands, marine transport becomes necessity
2. Have a definite market share and has long-term contracts
3. Opportunity to get coal supply plant for Eastern Indonesia

ACHIEVEMENTS OF THE COMPANY 2014

Financial and Operational Aspects

1. Comprehensive net profit in 2014 amounted to Rp 114.587 million, an increase of 104.14% compared to in 2013 amounted to USD -4.749 million.
2. Operating revenues in 2014 amounted to Rp 1,278,972 million, an increase of 40.25% compared to in 2013 amounted to USD 764.157 million.
3. The amount of the company's assets in 2014 amounted to Rp 1,468,923 million, an increase of 26.47% compared to in 2013 amounted to Rp 1,080,107 million.
4. The number of shipment / transportation in 2014 shipment reached 960 increased 28.33% compared to the year 2013 some 688 shipment.
5. The amount of freight tonnage transported coal the company in the year 2014 amounted to 14.147 thousand MT increased by 26.39% compared to the year 2013 by 10.413 thousand MT.

Non Financial and Operational Aspects

1. Declaration net bag on December 17, 2014
2. First Cutting 2 sets of Tug & Barges in PT Shipyard Lighthouse in 7 April 2014
3. Purchase Transaction MV Baruna Arimbi in Singapore on December 12, 2014.
4. Expansion of the operating area in Eastern Indonesia Bag
5. The appointment bag as the only company in Indonesia that operates the cruise ship CNG
6. Operation of the old office back bag after doing renovations on December 13, 2014

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Kinerja BAg pada tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan baik dari segi operasional dan keuangan. Jumlah shipment meningkat 28.33%, jumlah tonase yang diangkut meningkat 26.39%. Jumlah pendapatan usaha meningkat 40.25% dan laba bersih komprehensif perusahaan meningkat 104.14%.

SUMMARY OF FINANCIAL STATEMENTS

BAg Performance in 2014 showed growth in terms of both operational and financial. The amount of shipment increased by 28.33 %, the amount of tonnage transported increased by 26.39 %. Total operating revenues increased by 40.25 % and net profit increased by 104.14 % comprehensive company .

dalam jutaan rupiah					in million rupiah
URAIAN	2012	2013*	2014*	%	DESCRIPTION
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF					STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan usaha	498,541	764,157	1,278,972	40%	Revenue
Beban usaha	-436,890	-640,527	-1,080,417	41%	Operating expenses
Laba usaha	61,651	123,630	198,555	38%	Gross profit
Beban umum dan administrasi	-15,831	-17,179	-21,897	22%	Administration expenses
Beban bunga	-46,339	-63,032	-66,104	5%	Interest expenses
Penghasilan (beban) lain-lain bersih	16,311	-23,754	11,406	308%	Non operating revenue
Laba sebelum pajak	15,793	19,665	121,960	84%	Income before tax
Beban Pajak	-10,650	-10,764	-16,140	33%	Tax expenses
Laba tahun berjalan dari operasi yang berjalan	5,143	8,901	105,820	92%	Profit from current operation
Laba (rugi) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	0	-13,650	8,767	256%	Current profit from suspended operation
Laba (rugi) tahun berjalan	5,143	-4,749	114,587	104%	Current profit
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	-	-	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	5,143	-4,749	114,587	104%	Net comprehensive income
LAPORAN POSISI KEUANGAN					STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Aset					Assets
Aset Lancar	224,532	422,565	780,833	46%	Current Assets
Aset Tidak Lancar	444,929	657,542	688,090	4%	Non Current Assets
Jumlah Aset	669,461	1,080,107	1,468,923	26%	Total Assets
Liabilitas					Liability
Liabilitas Jangka Pendek	250,277	424,275	481,646	12%	Current Liability
Liabilitas Jangka Panjang	436,641	660,190	877,048	25%	Non Current Liability
Jumlah Liabilitas	686,918	1,084,465	1,358,694	20%	Total Liability
Ekuitas					Equity
Modal ditempatkan dan disetor penuh	21,674	21,674	21,674	0%	Working Capital
Dana Talangan	33,406	33,406	33,406	0%	Bailouts
Surplus (Defisit)	-72,537	-59,438	55,149	208%	Surplus (Deficit)
Jumlah Ekuitas	-17,457	-4,358	110,229	104%	Total Equity
LAPORAN ARUS KAS					STATEMENT OF CASH FLOW
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	-19,467	28,911	82,195	65%	Cash Flow from Operation Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-179,366	-241,111	-65,548	-268%	Cash Flow from Investment Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	183,025	256,866	228,699	-12%	Cash Flow from Funding Activities
RASIO KEUANGAN					FINANCIAL RATIO
Rasio Lancar	90%	97%	162%		Current Ratio
Rasio Kas	11%	20%	66%		Cash Ratio
ROI	1%	0%	7%		ROA
ROE	-29%	-26%	96%		ROE



Muhammad Ikbal Nur
commissioner

Subagio Utomo
independent
commissioner

Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,
Dengan telah berakhirnya tahun 2014 dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini Dewan Komisaris menyampaikan laporan sebagai berikut.

Kata Pengantar

Laporan Tahunan Tahun 2014 Dewan Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAg") ("Perseroan") adalah dimaksudkan sebagai catatan atas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris BAg sesuai dengan Anggaran Dasar BAg untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi BAg selama masa Jabatan Dewan Komisaris BAg dalam tahun 2014.

Agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas Dewan Komisaris, maka dalam Dewan Komisaris BAg dilakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris agar lebih fokus mengawasi jalannya pengelolaan perusahaan.

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris BAg berpedoman pada Anggaran Dasar BAg, Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Kerja Anggaran Perseroan (RKAP) serta amanat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham BAg.

Dear Stakeholders,

By the end of 2014 to comply with the statutory provisions in force, together with the Board of Commissioners is pleased to report.

Foreword

Annual Report 2014 of the Board of Commissioners of PT Bahtera Adhiguna ("BAg") (the "Company") is intended as a record of the performance of duties in accordance with the Board of Commissioner to monitor and provide advice on the management of the company by the Board of Directors during the Board of commissioner period in 2014.

To be more effective in carrying out the duties of the Board of Commissioners, there is a distribution of tasks among members of the Board to be more focused overseeing the management of the company.

In conducting the inspection, the Board is guided by the BAg Articles of Association, the Company's Long Term Plan (RJPP), Budget Work Plan of the Company (budget) and the mandate of the General Meeting of Shareholders BAg.

Dewan Komisaris BAg selalu menekankan kepada Direksi BAg agar terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran BAg untuk dilakukan kajian kelayakan dan kajian terhadap risiko yang ada.

Selama tahun 2014, banyak hal yang telah dilakukan Dewan Komisaris dan Direksi beserta jajarannya untuk membuat Perusahaan menjadi lebih baik. Meskipun demikian, Dekom menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu dilakukan agar BAg menjadi seperti yang diharapkan oleh Pemegang Saham.

Akhir kata, Dewan Komisaris BAg merasa bangga dapat menjadi bagian dari BAg dan berharap agar BAg selalu menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Penilaian Kinerja Direksi

Prioritas program kerja PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAg) tahun 2014 adalah mensinergikan tuntutan untuk mewujudkan kinerja operasi yang optimal dan melayani angkutan batubara dengan sumber daya Perusahaan yang terbatas, melalui upaya antara lain :

1. Pembelian 1 (satu) unit Kapal Panamax dengan kapasitas + 76.000 DWT.
2. Pembangunan baru 2 (dua) set Tug & Barge
3. Melaksanakan sinergi angkutan batubara dengan anak perusahaan PLN melalui kontrak jangka panjang dengan PT Indonesia Power.
4. Mengadakan kontrak jangka panjang (2 tahun) dengan mitra bisnis pemilik Tug & Barges dan SPB
5. Mengadakan kontrak spot angkutan batubara untuk kapal Panamax, Handymax, Small Handy, SPB dan Tug & Barges dengan mitra bisnis pemilik kapal.
6. Meningkatkan kompetensi perusahaan dalam bidang angkutan batubara dan pengelolaan operasi kapal dengan menggunakan Ship Management secara selektif, penggunaan crewing agency secara optimal
7. Melaksanakan program BAg bersih.
8. Implementasi program Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) dan GL Online.
9. Melaksanakan analisa kajian bisnis Jetty Management oleh konsultan

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan Direksi, selain terdapat beberapa program yang belum dapat direalisasikan, beberapa program telah dapat direalisasikan oleh Direksi pada tahun 2014, yaitu di antaranya pada kinerja operasional dan kinerja keuangan.

Kinerja Operasional

Realisasi angkutan batubara tahun 2014 sebesar 14,15 juta MT atau 117,10% dari target sebesar 12,08 juta MT. Diangkut oleh kapal milik sendiri sebesar 6,89 juta MT atau mencapai 96,22% dari target sebesar 7,16 juta MT dan oleh kapal KSO yang menggunakan kapal, Tug & Barge dan SPB mencapai 7,26 juta MT atau mencapai 147,43% dari target sebesar 4,93 juta MT. Meningkatnya angkutan batubara dengan KSO karena kontrak angkutan dari PT Indonesia Power untuk mengangkut batubara dari Adaro ke PLTU Suralaya menggunakan Kapal Panamax KSO sambil menunggu proses pengadaan Kapal Panamax milik sendiri.

BAg Board of Commisioner has stressed to the Board of Directors that the factors that may affect the achievement of BAg, to do a feasibility study and a study of the risks.

During 2014, much has been done by the boards and their staffs to make the company better. Nevertheless, the Supervisory Board is aware that much remains to be done in order to bag becomes as expected by the shareholders.

Lastly, the Board of Commissioners of BAg is proud to be part of the BAg and always hope for the better in the future.

Assessment of the Board of Directors

A priority work program of PT. Bahtera Adhiguna (BAg) in 2014 is to synergize the demands for creating an optimal operating performance and serve the transportation of coal with its limited resources, through the following programs:

1. *The purchase of one (1) unit Panamax vessel with + capacity of 76,000 DWT.*
2. *New development of two (2) sets of Tug & Barge*
3. *Implement the transport of coal synergy with PLN subsidarie companies through long-term contracts with PT Indonesia Power.*
4. *Establish a long-term contract (2 years) business partners and owners of SPB Tug & Barges*
5. *Hold a spot contract to transport coal for Panamax vessels, Handymax, Small Handy, SPB and Tug Barges with business partners and ship owners.*
6. *Improving the company competence in the field of coal transport, ship operations and management using selective Ship Management, optimal use of crewing agency*
7. *Implement cleaner BAg program.*
8. *Implementation of Information Systems Management program Finance (SIMKEU) and GL Online.*
9. *Carry out analysis of business studies Jetty Management by consultant*

Of the various attempts that have been made the Board of Directors, in addition there are several programs that can not be realized, some programs have to be realized by the Board of Directors in 2014, is among the performance of operational and financial performance.

Operational Performance

Realization of coal transportation in 2014 amounted to 14, 15 million MT, or 117.10% of the target of 12.08 million MT. Transported by ships belonging to himself at 6.89 million MT or reaching 96.22% of the target of 7.16 million MT and by KSO ships which use vessels, Tug & Barge and SPB reached 7.26 million MT or reached 147.43% of the target of 4.93 million MT. Increased coal transportation by KSO for transport contract from PT Indonesia Power to transport coal from Adaro to Suralaya using Panamax vessel procurement process KSO pending self-owned Panamax vessel.

Selain itu, realisasi Commission Days yaitu perbandingan hari efektif kapal dengan hari operasional kapal pada tahun 2014 mencapai 95,88% dari target sebesar 96,07%.

Kinerja Keuangan

Pendapatan usaha pada tahun 2014 sebesar Rp 1.278,97 miliar atau mencapai 124,97% dari RKAP tahun 2014 sebesar Rp 1,102.31 miliar dengan Beban pokok pendapatan sebesar Rp 1.080,42 miliar atau 124,53% dari RKAP sebesar Rp 867,25 miliar ditambah beban usaha dan beban lainnya sehingga menghasilkan Laba bersih sebesar Rp 114,59 miliar atau 421,59 % dari RKAP tahun 2014 sebesar Rp 27,18 miliar.

Memperhatikan besarnya total aktiva yang ada untuk 4 (empat) tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 s.d 2014 masing-masing adalah Rp 457 M, Rp 669 M, Rp 1.080 M dan Rp 1.469 M menunjukkan peningkatan, demikian juga dengan ekuitas untuk tahun 2011 s.d 2013 masih menunjukkan negatif, masing-masing yaitu (Rp 22,60), (Rp 17,46 M) dan (Rp 13,83 M) sedangkan dalam tahun 2014 sudah positif yaitu Rp 110,23 M.

Sedangkan Total Debt to Assets (mengukur kekayaan perusahaan yang dibelanjai dengan utang) untuk tahun 2014 adalah 92,50 % dan Total Debt to Equity (mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutang yang ada dengan menggunakan ekuitas yang ada) 1.232 %. Sehingga dalam rangka pengembangan BAg diperlukan peningkatan ekuitas atau penambahan modal.

Tingkat Kesehatan

Penilaian Tingkat Kesehatan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna tahun 2014 mencakup 6 (enam) perspektif Key Performance Indicators (KPI) berbasis Malcolm Baldrige sesuai Kontrak Manajemen yang meliputi perspektif pelanggan, produk dan layanan, proses bisnis internal, SDM, Keuangan & Pasar, dan Kepemimpinan. Untuk tahun 2014 penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan mencapai skor 89,00 masuk pada golongan perusahaan yang SEHAT dengan kategori AA

Secara umum, Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan menilai bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan perusahaan dengan baik dan telah memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik. Untuk selanjutnya, Dewan Komisaris akan terus mendorong Direksi untuk tetap berkomitmen penuh terhadap peningkatan kinerja di masa depan.

Pandangan atas Prospek Usaha

Pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,1% per tahun dengan pertumbuhan GDP meningkat rata-rata 6-7% per tahun dan rasio elektrifikasi nasional masih berkisar 84,3% sehingga seiring dengan peningkatan akan kebutuhan listrik maka peluang bagi BAg untuk mendapatkan penugasan angkutan batubara oleh PLN

Hal tersebut berarti, perusahaan dituntut untuk memiliki kondisi keuangan yang sehat, efisien, dapat memenuhi tingkat keandalan armada dan pelayanan angkutan sesuai ekspektasi pelanggan, serta didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi tinggi, berperilaku sesuai GCG dan CoC (Code of Conduct) dalam menjalankan usahanya.

In addition, the realization of the Commission Days ie the ratio of effective ships with vessel operating days in 2014 reached 95.88% of the target of 96.07%.

Financial performance

Operating revenues in 2014 sebesar Rp 1278.97 billion or 124.97% from 2014 RKAP Rp 1,102.31 miliar to cost of revenue of Rp 1080.42 billion or 124.53% from Rp 867.25 billion RKAP plus operating expenses and other expenses resulting in a net profit of Rp 114,59 billion, or 421.59% of RKAP 2014 amounted to Rp 27.18 billion.

Noting the total amount of assets available for four (4) years ie dari year 2011 till 2014, respectively USD 457 M, USD 669 M, USD 1,080 M and USD 1,469 M showed an increase, as well as equity for the year 2011 till 2013 still shows negative, respectively, namely (USD 22.60), (Rp 17,46 M) and (Rp 13.83 M), while in the year 2014 was positive at Rp 110.23 M.

While the Total Debt to Assets (dibelanjai measure the wealth of a company with debt) for 2014 was 92.50% and the Total Debt to Equity (to measure a company's ability to repay existing debt by using existing equity) 1,232%. So in order to develop the necessary improvement Bag equity or capital increase.

Healthy Level

Rating for PT Pelayaran Ark Adhiguna 2014 includes six (6) perspective Key Performance Indicators (KPI) based Malcolm Baldrige according Management Contract that includes the perspective of customers, products and services, internal business processes, HR, Finance & Markets, and Leadership. Untuk tahun 2014 Company Rating at achieving a score of 89.00 entered in group company HEALTHY with category AA

In general, BOC appreciate and considered that the Board of Directors has undertaken the management of the company well and has fulfilled the rules of good corporate governance. Henceforth, the Board will continue to encourage the directors to remain fully committed to the improvement of performance in the future.

View on Business Prospects

Indonesia's population growth of about 1.1% per year with GDP growth increased by an average of 6-7% per year and the national electrification ratio is still around 84.3% so as the demand for electricity will increase, the more opportunities for bag to get the assignment coal transportation by PLN

This means, the company is required to have a healthy financial condition, efficient, able to meet the level of reliability of the fleet and transportation services according to customer expectations, and supported by human resources that have high competence, behave according to GCG and CoC (Code of Conduct) in business.

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Aspek Pengawasan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan meliputi: (1) Pengawasan atas Efektivitas dan Efisiensi Operasi dan Investasi, (2) Pengawasan atas Keandalan Informasi/Pelaporan Keuangan, (3) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan & Peraturan yang berlaku. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dalam tahun 2014 telah mengadakan 12 kali rapat yang dihadiri secara kourum oleh Anggota Dewan Komisaris. Sedangkan rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi sejumlah 12 kali. Selain pertemuan rutin tersebut, pertemuan informal juga sering diadakan untuk pembahasan dan konsultasi/arahan atas permasalahan yang sedang dihadapi Direksi. Selain itu, diskusi dan konsultasi antara Dewan Komisaris dan Direksi juga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Dewan Komisaris juga telah menyampaikan laporan / tanggapan kepada RUPS terkait kewajiban Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar. Hasil pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2014 telah disampaikan dan dilaporkan kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tentang Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan. Hasil penilaian/asesmen yang dilaksanakan oleh BPKP atas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Dewan Komisaris mencapai nilai 23,68 dari target 35 atau 67,63% termasuk kategori “Cukup Baik”.

Komposisi Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris BAg pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham BAg secara sirkuler tanggal 24 Februari 2012, susunan Dewan Komisaris BAg adalah:

Komisaris Utama : Binarto Bakti Mahardjana
 Komisaris Independen : Subagio Utomo

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Pemegang Saham BAg secara sirkuler tanggal 29 Agustus 2014, susunan Dewan Komisaris adalah:

Pelaksana (Plt)
 Komisaris Utama : Muhammad Ikbal Nur
 Komisaris Independen : Subagio Utomo

Profil Dewan Komisaris

Muhammad Ikbal Nur, kelahiran tahun 1967, lulus Fakultas Teknik Elektro Universitas Indonesia tahun 1991, mengawali kariernya di PT PLN (Persero) sejak tahun 1993. Saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Bisnis dan Transaksi Tenaga Listrik pada Direktorat Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PT PLN (Persero) Kantor Pusat..

Subagio Utomo, lulus Akademi Ilmu Pelayaran tahun 1972, berlayar di atas kapal-kapal niaga berbendera Indonesia maupun asing sebagai Mualim sampai Nahkoda. Tahun 1981 mulai karier di darat, antara lain pada PT Karana Lines, PT Trikora Lloyd, PT Taruna Cipta Kencana (Sinar Mas Grup), PT Buana Samudra Pratama (Arpeni Grup).

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite Audit yang diangkat oleh Dewan

Implementation report on Corporate Governance on Commissioner watch aspects

Under the Articles of Association, the Board of Commissioners has conducted surveillance include: (1) Supervision over the Effectiveness and Efficiency of Operations and Investment, (2) Supervision of Reliability Information / Financial Reporting, (3) Supervision of Compliance with Legislation and Regulations apply. In order to conduct such surveillance, the Board of Commissioners in 2014 has held 12 meetings which were attended by members of the BOC kourum. While the BoC meeting, which was attended by the Board of Directors of a number 12 times. In addition to these regular meetings, informal meetings are often held for discussion and consultation / referral to the problems being faced by the Board of Directors. In addition, discussion and consultation between the Board of Commissioners and Board of Directors is also done by using information technology. The Board also has to submit a report / responses to the GMS-related liability according BOC Statutes. BOC monitoring results for 2014 have been presented and reported to the shareholders at the General Meeting of Shareholders of the Annual Accountability Report. Results of the assessment / assessment conducted by BPKP on the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the BOC achieve the target value of 23.68 from 35 or 67.63% including the category of "Good Enough".

The composition of the Board of Commissioners

BAg Board of Commissioners in 2014 based on the decision of BAg circularly Shareholders dated February 24, 2012, the Board of Commissioners BAg are:

*Commissioner : Binarto Bakti Mahardjana
 Independent Commissioner : Subagio Utomo*

Furthermore, based on Decision of Shareholders bag is circular dated August 29, 2014, the Board of Directors are:

*Executor (Plt)
 Commissioner : Muhammad Nur Ikbal
 Independent Commissioner : Subagio Utomo*

Board of Commissioners

Ikbal Muhammad Nur, born in 1967, graduated the Faculty of Electrical Engineering, University of Indonesia in 1991, started his career at PT PLN (Persero) since 1993. Currently serves as Chief of the Division of Business and Transactions Electric Power at the Directorate of Planning and Development Affiliate PT PLN (Persero) Headquarters..

Subagio Utomo, graduated the Academy of Sciences 1972 Cruise, sailed on commercial ships and foreign-flagged Indonesia as a chief officer to the Master. 1981 began a career in the land, among others PT Karana Lines, PT Trikora Lloyd, PT Youth Copyright Kencana (Sinar Mas Group), PT Buana Samudra Pratama (Arpeni Group).

Supporting organ BOC

In supporting the effective discharge of its duties and responsibilities, the Board is assisted by the Secretariat of the Board of Commissioners and the Audit Committee are

komisaris. Untuk efektivitas tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengatur pembagian tugas dan wewenang di antara Anggota Dewan Komisaris, sedangkan anggota Komite yang bukan Komisaris adalah independen karena berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kepemilikan dan kegiatan usaha perusahaan namun memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan anggota Komite Audit ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris dan susunan anggota Komite Audit adalah Subagio Utomo (Komisaris Independen) sebagai Ketua dengan Junaidi sebagai anggota.

Untuk Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Yoseph da Silva.

Apresiasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BAg menyampaikan penghargaan kepada Pemegang Saham BAg atas arahannya selama ini, Direksi BAg dan seluruh karyawan BAg serta seluruh jajaran di lingkungan Dewan Komisaris BAg atas kerja keras dan hubungan yang baik yang telah terbina selama ini.

appointed by the Board of Commissioners. For the effectiveness of supervisory duties, the Board has set the division of tasks and responsibilities between the Board of Commissioners, while the members of the Committee are not the Commissioner is independent because it comes from outside the company and has no connection with the management, ownership and business activities however have the competence and experience fit their respective sectors.

Composition of the Audit Committee established by the Decree of the Board of Commissioners and the members of the Audit Committee is Subagio Utomo (Independent Commissioner) as Chairman of the Junaidi as members.

For the Secretary of the Board of Commissioners chaired by Yoseph da Silva.

Appreciation BOC

Board of Commissioners of BAg wanted to express appreciation to the Shareholders of BAg over its direction during this time, the Board of Directors and all employees BAg as well as the whole range of the Board of Commissioners BAg for the hard work and good relations that have been built up over the years.



Bima Putrajaya
director

Surya Fitriadi
director of finance &
human resources

Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmatNya sehingga BAg dapat melalui tahun 2014 dengan kinerja yang positif.

Keberhasilan BAg menunjukkan bahwa BAg telah berhasil mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk terus tumbuh dan berkembang sehingga BAg dipercaya oleh para stakeholder dan pelanggan. Keberhasilan pencapaian tersebut menjadi motivasi BAg untuk terus meningkatkan pelayanan dan berinovasi.

Kebijakan Strategis Perusahaan

Ditengah persaingan perusahaan transportasi batubara yang semakin ketat, BAg selaku anak perusahaan PLN yang bergerak dalam bidang transportasi batubara telah melakukan beberapa kebijakan strategis guna meningkatkan pelayanan mutu dan jaminan kepastian dalam keamanan pasokan batubara.

Untuk mewujudkan misi tersebut BAg telah menetapkan tiga kebijakan utama diantaranya meningkatkan alokasi penggunaan armada kapal milik sendiri, mengadakan kontrak jangka panjang dengan mitra bisnis pemilik **Kapal, Tug and Barges dan SPB (Self Propeller Barge)** guna memenuhi kebutuhan pasokan batubara

Dear Stakeholders,

Thanks GOD Almighty, for all the blessings for BAg through the year 2014 with a positive performance.

The success shows that BAg has successfully optimize the existing resources to continue to grow and develop so BAg is trusted by its stakeholders and customers. The success became a motivation for BAg to continuously improve and innovate services.

Company's Strategic Policy

Amid the coal transportation company competition becoming more intense, as a subsidiary of PLN BAg which is engaged in the transportation of coal has done several strategic policy in order to improve service quality and security assurance in the supply of coal.

To fulfill this BAg has set three main policy including increased allocation of its own fleet, conduct long-term contracts with business partners owners of ships, Tug and Barges and SPB (Self Propelled Barge) to meet the needs of coal power plant owned by PLN, increased collection period by integrating several existing

PLTU milik PLN, meningkatkan collection period dengan mengintegrasikan beberapa system informasi yang sudah ada dan melakukan pelepasan anak perusahaan PT PBM Adhiguna Putera (Adhira) guna focus kearah transportasi batubara

Pencapaian Kinerja Tahun 2014

Tahun 2014 PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAg) berhasil melakukan peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Optimalisasi armada kapal yang dimiliki oleh BAg menjadi kunci utama dan juga bertambahnya volume angkutan dan tambahan kontrak dengan PT Indonesia Power (IP) sebesar 1,5 juta Ton dari PT Adaro Indonesia selama 10 tahun sebagai pendorong BAg untuk terus tumbuh dan berkembang. Hal ini sejalan dengan misi BAg sebagai pendukung security of supply dan enabler transportasi batubara untuk PLN dan Anak Perusahaan.

Selama tahun 2014 BAg berhasil memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp 1,28 Triliun yang meningkat 67,37% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 764,16 Miliar. Peningkatan ini berasal dari peningkatan pendapatan usaha transportasi batubara. Namun seiring meningkatnya pendapatan usaha, beban produksi dan beban usaha juga mengalami kenaikan. Beban produksi di tahun 2014 sebesar Rp 1,08 Triliun meningkat 67,78% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 645,8 Miliar. Beban usaha di tahun 2014 sebesar Rp 31,17 Miliar meningkat 81,46% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 17,18 Miliar.

Jumlah Aset di tahun 2014 menjadi Rp 1,38 Triliun meningkat 36,84% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 1,01 Triliun. Meningkatnya jumlah aset ini disebabkan adanya kenaikan pada Aset Lancar selama tahun 2014. Sampai dengan 31 Desember 2014 BAg berhasil membukukan aset lancar sebesar Rp 693,33 Miliar meningkat 97,00% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 351,94 Miliar.

Prospek Usaha

Dengan ditunjuknya BAg sebagai enabler guna mendukung proses bisnis yang dijalankan oleh PLN. BAg optimis dapat mengembangkan core bisnis dengan memperluas pangsa pasar. Hal ini sejalan dengan misi BAg yang tertuang di RJP (Rencana Jangka Panjang) Perusahaan yaitu menyelenggarakan usaha transportasi laut dan penunjangnya untuk pengamanan pasokan batubara dan gas untuk pembangkit PLN, Anak Perusahaan PLN dan IPP serta menyelenggarakan sistem manajemen berdasarkan tata kelola perusahaan yang sehat (GCG) sehingga dapat mencapai visi "menjadi perusahaan angkutan batubara dan gas serta penunjangnya yang unggul dan terpercaya dengan pelayanan berstandar internasional.

Berbekal pengetahuan yang kuat di bidang perkapalan dan bisnis penunjangnya serta didukung dengan keandalan armada kapal yang dimiliki maka BAg yakin dapat terus bertumbuh dan berkembang dengan memberikan jaminan ketepatan waktu dan keamanan pasokan batubara ke PLTU milik PLN, Anak Perusahaan dan IPP.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan terhadap BAg. Oleh karena itu BAg berkomitmen untuk terus meningkatkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

information system and disposed subsidiary PT PBM Adhiguna Prince (Nadhira) in order to focus to the transportation of coal

Performance Achievement 2014

In 2014 PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAg) has successfully enhanced its performance compared with previous years. Optimizing fleet owned by BAg is the key factor and also the increase in transport volume and additional contracts with PT Indonesia Power (IP) of 1.5 million tons from PT Adaro Indonesia for 10 years as a drive for BAg to continue to grow and develop. This is in line with the mission of supporting BAg as enablers of security of supply and transportation of coal for PLN and its subsidiaries.

During the 2014 BAg has achieved operating revenues of Rp 1.28 trillion, rising 67.37% compared to 2013 amounting to Rp 764.16 billion. This increase resulted from an increase in revenues of transporting coal. However, with the increasing revenues, production costs and operating expenses also increased. Production costs in 2014 amounting to Rp 1.08 trillion, an increase of 67.78% compared to 2013 amounting to Rp 645.8 billion. Operating expenses in 2014 amounted to Rp 31.17 billion, increased 81.46% over 2013 amounting to Rp 17.18 billion.

Total assets in 2014 to Rp 1.38 trillion, an increase of 36.84% compared to 2013 amounting to Rp 1.01 trillion. The increase in total assets was due to the increase in current assets during 2014. As of December 31, 2014 BAg recorded a current asset of Rp 693.33 billion, an increase of 97.00% compared to 2013 amounting to Rp 351.94 billion.

Business Prospects

BAg with the appointment as an enabler to support business processes run by PLN. BAg optimistic to develop core business by expanding market share. This is in line with the mission of BAg contained in CPR (Long-Term Plan) of the Company that is conducting the business of marine transportation and supporting for securing the supply of coal and gas to PLN, the Subsidiary PLN and IPP and organized management system based on corporate governance healthy (GCG) so as to achieve the vision of "becoming perusahaan transport of coal and gas as well as supporting the superior and reliable with international standard services.

Armed with strong knowledge in the field of shipping and supporting business and supported by the reliability of the fleet owned the BAg can confidently continue to grow and develop by providing a guarantee timeliness and security of coal supply to power plants owned by PLN, Subsidiary and IPP.

Implementation of Good Corporate Governance

Implementation of Good Corporate Governance is an important factor in maintaining the trust of shareholders and stakeholders of the BAg. Therefore BAg is committed to continuously improve the corporate governance principles in accordance with the provisions of the legislation in force and

berlaku dan perkembangan praktik terbaik (best practice) GCG. BAg secara konsisten mendorong prinsip-prinsip GCG guna menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh baik individu atau kelompok serta kepentingan para stakeholder.

Untuk mengetahui tingkat implementasi GCG yang telah dilakukan, BAg melakukan assessment dan review GCG secara berkala, minimal setahun sekali. Selain itu, implementasi GCG juga menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) dalam Kontrak Manajemen Perusahaan, yaitu pada bagian Perspektif Leadership dalam bentuk pencapaian skor assessment GCG. Assessment GCG dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK- 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Untuk tahun buku 2014 assessment GCG dilakukan oleh BPKP dengan perolehan skor 61,74 dengan predikat Cukup Baik, sedangkan tahun 2013 dilakukan self assesment GCG dengan perolehan skor 69,36 dengan predikat Cukup Baik. Hal ini menjadi perhatian perusahaan untuk dapat meningkatkan mutu dalam pelayanan dan menjalankan perusahaan sesuai dengan lima prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responabilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Tantangan

Dalam melaksanakan misi perusahaan yaitu sebagai **security of supply** angkutan untuk batubara bagi PLTU PLN, AP dan IPP maka perusahaan memerlukan armada yang handal, aman, efisien serta tarif angkutan yang kompetitif untuk membangun operational excellence dan service excellence kepada pelanggan. Sampai dengan tahun 2013 perusahaan sudah memiliki armada milik yang berjumlah 6 (enam) terdiri dari 4 (empat) kapal dan 2 (dua) set Tug & Barge, Armada milik tersebut dioperasikan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing PLTU. Dengan memiliki kapal milik menjadi tantangan bagi BAg untuk dapat memaksimalkan pengoprasian kapal, meningkatkan efisiensi pemeliharaan, serta meningkatkan SDM yang lebih terampil dalam pengelolaan armada kapal untuk mendukung terbentuknya Divisi Ship Management.

Dalam memenuhi tugas sebagai security of supply angkutan batubara, BAg selain mengoperasikan kapal milik juga melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan beberapa perusahaan pemilik kapal. Namun untuk mengurangi ketergantungan terhadap KSO dan memperbesar nilai rasio angkutan kapal milik terhadap KSO yang tertuang dalam Kinerja korporat maka perusahaan merencanakan investasi armada kapal terdiri dari 1 unit handymax, 2 unit SPB, 1 unit Panamax, 1 unit Self Unloading Vessel (SUV), dan 2 set Tug & Barge dengan total investasi sebesar Rp. 944 Miliar

Namun pada realisasinya, tahun 2014 perusahaan hanya dapat berinvestasi 2 set Tug & Barge 300 dan 330 Feet dan 1 unit Panamax (bukan baru). Panamax yang akan di-delivery pada awal tahun 2015. Namun selain investasi pada tahun 2014, ada tambahan Barge (bukan baru -Bg Baruna Power 3301) pengganti Barge 3002 yang kandas pada bulan Februari 2014. Total realisasi investasi pada tahun 2014 bernilai Rp 306 Miliar, yaitu sebesar 32% dari target rencana investasi. Tidak terealisasinya investasi kapal handymax dikarenakan belum mendapatkan market atas kapal tersebut, sedangkan untuk SUV biaya investasi tinggi sementara tarif yang ditawarkan kepada pelanggan belum mendapat persetujuan sehingga pembangunan kapal SUV tidak layak. Untuk investasi SPB tidak

the development of best practices (best practices) GCG. BAg consistently encouraging good corporate governance principles to ensure the creation of business menyeluruh balance either individual or groups as well as the interests of stakeholders.

To determine the level of GCG implementation that has been done, the BAg did GCG assessment and review periodically, at least annually. In addition, the implementation of GCG also become one of the Key Performance Indicator (KPI) of the Contract Management Company, which is on the Leadership Perspective in the form of achievement of GCG assessment scores. GCG assessment carried out with reference to the Secretary of the Decree of the Minister of SOE No. SK 16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012. For the fiscal year 2014 GCG assessment conducted by BPKP with the acquisition of a score of 61.74 with the predicate Fair, while in 2013 conducted self GCG assessment with a score of 69.36 with the predicate acquisition Pretty Good. This is a concern for the company to improve the quality in service and running the company in accordance with the five basic principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responabilitas, independence, and fairness.

Challenge

In carrying out the company's mission as security of supply for the transport of coal for PLN power plant, AP and IPP, the company requires a fleet of reliable, safe, efficient and competitive freight rates to build operational excellence and service excellence to customers. Until 2013 the company already has a fleet of owned totaling six (6) consists of 4 (four) vessels and two (2) sets of Tug & Barge, owned fleet is operated in accordance with the needs and capacities each plant. By having a vessel belonging to a challenge for the BAg to be able to maximize the operator of the ship, improve maintenance efficiency, and improve more skilled human resources in the management of a fleet of ships to support the establishment of Ship Management Division.

In fulfilling its duty as security of supply of coal transportation, BAg in addition to operating the ship belongs to BAg, also conduct joint operation (KSO) with some of the owners of the vessel. However, to reduce the dependence of KSO and increase the value of the ratio of freight ships belonging to the KSO contained in Performance corporates, the company plans to invest fleet consists of 1 unit Handymax, 2 units of SPB, 1 unit Panamax, 1 unit Self Unloading Vessel (SUV), and 2 sets of Tug & Barge with a total investment of Rp. 944 Billion

But in reality, in 2014 the company may invest only 2 sets of Tug and Barge 300 and 330 Feet and 1 unit Panamax (not new). Panamax will be delivered in early 2015. However, in addition to the investment in 2014, there are additional Barge (not new -Bg Baruna Power 3301) substitute Barge 3002 that foundered in February 2014. The total realized investment in 2014 worth Rp 306 Billion , amounting to 32% of the target investment plan. Handymax vessels failure to realize because there is no market for it yet, while the SUV high investment cost while the rates offered to customers has not been approved so that the construction of SUV ships deemed unfit. For SPB investment can not be doned, is linked to the condition of the transport operations are inefficient and lack of additional markets and

dapat dilakukan terkait dengan kondisi operasi angkutan yang tidak efisien dan belum adanya tambahan pasar serta waktu bongkar yang masih lama.

Perubahan Komposisi Direksi

Selama tahun 2014 tidak terjadi perubahan komposisi direksi. Per 31 Desember 2014 jumlah anggota direksi BAg adalah 2 (dua) orang. Direktur Utama sekaligus merangkap direksi operasional dan armada dijabat oleh Sdr. Bima Putrajaya dan Direktur Keuangan dan SDM dijabat oleh Sdr. Surya Fitriadi.

Apresiasi

Pencapaian dan pertumbuhan positif Perusahaan merupakan hasil dari sinergi dan kerja keras semua pihak yang berkepentingan. Dukungan dari semua pihak menjadi landasan keberhasilan BAg untuk terus tumbuh dalam menghadapi tantangan mendatang. Oleh karena itu, Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas arahan pemegang saham, Dewan Komisaris, dedikasi para pegawai serta mitra usaha atas kepercayaan, kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Kami yakin bahwa dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, diiringi dengan kerja keras dan semangat yang kuat oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai, BAg akan dapat terus memanfaatkan setiap peluang di depan dengan memberikan kinerja yang optimal.

unloading time is still long.

Changes in Composition of the Board of Directors

During 2014, no changes in the composition of the board of directors. As of December 31, 2014 BAg number of board members is two (2) people. Director concurrently directors of operations and fleet held by Mr. Bima Putrajaya and Director of Finance and Human Resources chaired by Mr. Surya Fitriadi.

Appreciation

Company achievements and positive growth is a result of synergy and hard work of all interested parties. The support of all parties would be the cornerstone of success for BAg to continue to grow in the face of the upcoming challenges. Therefore, we express our appreciation and gratitude for the direction of the shareholders, the Board of Commissioners, the dedication of the employees and business partners for the trust, contribution and support given. We are confident that with the competence and capabilities, coupled with hard work and a strong passion by all management and employees, BAg will be able to continue to take advantage of every opportunity in front to provide optimal performance.

Nama <i>Name</i> Company Nickname	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna BAg
Bidang Usaha <i>Line of Bussiness</i>	Penyelenggara moda angkutan transportasi batubara untuk pengamanan pasokan batubara ke PLTU milik PLN, Anak Perusahaan PLN dan Perusahaan Listrik Swasta (IPP) <i>Provider of coal transportation for security of supply to PLN's Power Plant, a subsidiary of PLN and Independent Power Producer (IPP)</i>
Status Perusahaan <i>Status of the Company</i>	Anak Perusahaan PT PLN (Persero) Subsidiary of PT PLN (Persero)
Kepemilikan Saham <i>Ownership</i>	1 PT PLN (Persero) sebesar 99.9% 2 Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebesar 0.1% <i>1 PT PLN (Persero) shares ownership 99.9%</i> <i>2 Education and Welfare Foundation shares ownership of 0.1%</i>
Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	1 Akta Pendirian PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero) tanggal 30 Desember 1971 2 PP No. 20 tanggal 4 Maret 2011 tentang Penambahan penyertaan modal saham PT PLN (Persero) 3 Akta perubahan kepemilikan dari Pemerintah RI kepada PT PLN (Persero) pada tanggal 5 Agustus 2011 4 Akta penambahan kepemilikan saham PT Pelayaran Bahtera Adhiguna pada 30 Januari 2013 <i>1 Deed of Establishment PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero) dated 30 December 1971</i> <i>2 PP No. 20 dated 4 March 2011 about additional of capital stock PT PLN</i> <i>3 Deed of changes ownership from Indonesian Government to PT PLN (Persero) dated 5 August 2011</i> <i>4 Deed of additional shares of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dated 30 January</i>
Modal Dasar <i>Authorized Capital</i>	Rp 86,696,000,000 (Delapan puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) <i>Rp 86,696,000,000 (eighty six billion six hundred ninty six million rupiah)</i>
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Issued Capital and Paid In Capital</i>	Rp 21,674,000,000 (Dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) <i>Rp 21,674,000,000 (Twenty one billion six hundred seventy four million)</i>
Jaringan Kantor <i>Official Network</i>	Memiliki 1 Kantor Pusat dan 1 Kantor Cabang <i>1 Head Office and 1 Representative Office</i>
Jumlah Pegawai <i>Number of Employee</i>	39 orang <i>39 employees</i>
Alamat Kantor <i>Office Address</i>	Jl. Kalibesar Timur 10-12 Jakarta Barat. 11110 Telp : (021) 6912547 - 49 Fax : (021) 6901450, 6902726
Website <i>Email</i>	www.bahteradhiguna.co.id pelba@bahteradhiguna.co.id

SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

Tahun 1961, Pemerintah Republik Indonesia telah menasionalisasikan perusahaan milik Belanda, NV Nederlandsch-Indische Steenkolen Handel-Maatschappij (NV. NISHM) dan diubah jadi PN Menunda Kapal Tundabara dengan bisnis utama adalah jasa angkutan batubara dan jasa kapal pandu. Tahun 1966, PN Menunda Kapal Tundabara diubah jadi PN Bahtera Adhiguna.

Tahun 1971, berdasarkan peraturan pemerintah PN Bahtera Adhiguna, diubah jadi PT Bahtera Adhiguna (Persero) dan aktivitas kegiatannya adalah jasa angkutan barang curah dan kargo umum, angkutan kayu jasa keagenan kapal, EMKL, bongkar muat dari/ ke kapal, galangan kapal dan kegiatan penunjang lainnya.

Tahun 1985, PT Bahtera Adhiguna telah mendirikan anak perusahaan yaitu, PT PBM Adhiguna Putra yang khusus menangani bongkar muat dari/ke kapal.

Pada bulan Maret tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Pada bulan Mei 2011, Kementerian BUMN menerbitkan surat keputusan tentang Pengalihan Modal Saham Milik Negara Republik Indonesia dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Pada bulan Agustus 2011, telah diadakan Penandatanganan Akte pemindahtanganan hak atas saham milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

A BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

In 1961, the Indonesian government has nationalized Dutch companies, NV Nederlandsch-Indische Steenkolen Handel-Maatschappij (NV. NISHM) and converted into PN Menunda kapal Tundabara with the main business is the transport of coal and scout ship services. In 1966, PN Menunda Kapal Tundabara converted into PN Bahtera Adhiguna.

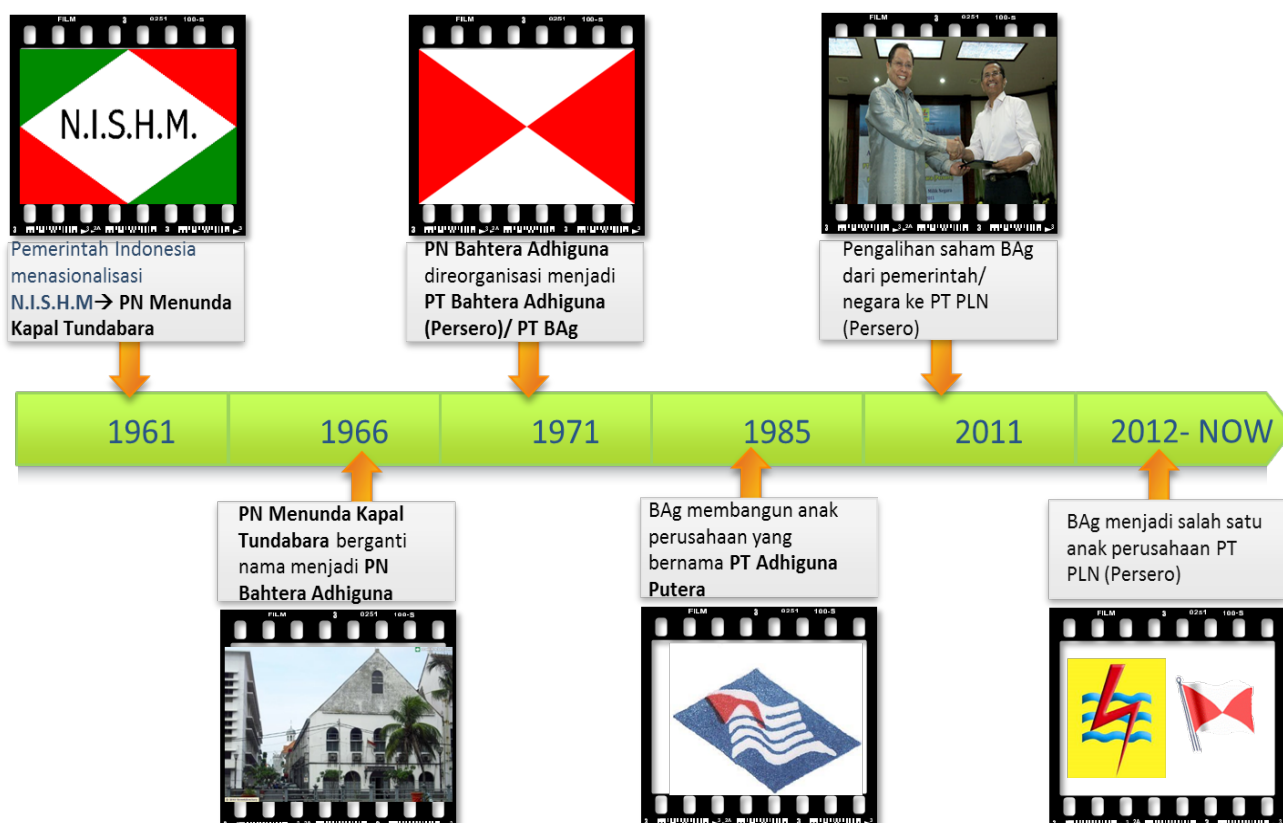
In 1971, based on government regulations PN Bahtera Adhiguna, converted into PT Bahtera Adhiguna (Persero) and the activities of its activity is transport of bulk goods and general cargo, timber transport agency services ship, EMKL, loading and unloading from / to the ship, shipyard and other supporting activities.

In 1985, PT Bahtera Adhiguna has established a subsidiary, namely, PT PBM Adhiguna Putra to specifically handle loading and unloading from / to the ship.

In March 2011 the Government of the Republic of Indonesia has set additional investment of the share capital into the Company (Persero) PT PLN is derived from the transfer of all shares owned by the Republic of Indonesia to the Company (Persero) PT Shipping Bahtera Adhiguna.

In May 2011, the SOE Ministry issued a decision on the transfer of State-owned Capital Shares of the Company of the Republic of Indonesia (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna to the Limited Liability Company (Persero) PT PLN.

In August 2011, has been held signing of the Deed of transfer of rights to shares owned by the Republic of Indonesia on the Company (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna to the Limited Liability Company (Persero) PT PLN.



VISI PERUSAHAAN

"Menjadi perusahaan angkutan batubara dan gas serta penunjangnya yang unggul dan terpercaya dengan pelayanan berstandar internasional"

MISI PERUSAHAAN

1. Menyelenggarakan usaha transportasi Laut dan penunjangnya untuk pengamanan pasokan batubara dan gas untuk pembangkit PLN, anak perusahaan PLN, dan IPP.
2. Menyelenggarakan sistem manajemen berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat (GCG)

TATA NILAI PERUSAHAAN

Adapun nilai-nilai yang dianut oleh Perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. **Integritas (Integrity)**
Senantiasa melaksanakan pekerjaan dengan jujur dan penuh tanggung jawab serta beretika, semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.
Integritas (Integrity) diterjemahkan kedalam 5 (lima) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu :
 - 1) Bekerja hanya untuk kepentingan Perusahaan
 - 2) Senantiasa menjadi penutan bagi lingkungannya
 - 3) Tidak pernah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan
 - 4) Bertanggung jawab dalam pekerjaan
 - 5) Senantiasa menggunakan etika dalam bekerja
- b. **Mencintai Pekerjaan (Passion)**
Memiliki semangat dan gairah dalam bekerja yang dilandasi rasa bangga terhadap pekerjaan dan Perusahaan.
Mencintai Pekerjaan (Passion) diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu :
 - 1) Semangat dan keinginan yang kuat untuk senantiasa berbuat yang terbaik dibidangnya
 - 2) Menyenangi tugasnya dan selalu berpikir positif dalam bekerja
 - 3) Senantiasa menghasilkan kualitas pekerjaan yang terbaik
- c. **Senang Belajar Untuk Kemajuan (Learning)**
Senantiasa belajar hal-hal baru dan berani untuk mencoba gagasan baru dan cara-cara kerja yang lebih baik untuk kemajuan Perusahaan.
Senang Belajar Untuk Kemajuan (Learning) diterjemahkan kedalam 2 (dua) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu :
 - 1) Selalu berusaha meningkatkan kemajuan dan pengetahuan
 - 2) Melihat jauh ke depan dan senantiasa berusaha untuk membawa Perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi

COMPANY VISION

"Being a coal and gas transport companies and supporting the superior and reliable with international standard services"

COMPANY MISSION

1. *Organizing the transport business and the Sea supporting for securing coal supply and gas to PLN, a subsidiary of PLN, and IPP.*
2. *Organizing management system based the principles of sound corporate governance (GCG)*

PROCEDURES FOR CORPORATE VALUES

The values adopted by the Company is as follows:

- a. **Integrity (Integrity)**
Always carry out the work honestly and responsibly and ethically, solely for the benefit of the Company.

Integrity (Integrity) translated into five (5) Main Behaviors that will be hold in running the Company's businesses and organizations, namely:
 - 1) *Working only for the benefit of the Company*
 - 2) *Always be penutan for the environment*
 - 3) *Never abuse their authority to other interests beyond those of the Company*
 - 4) *Responsible for the job*
 - 5) *Always use ethics in work*
- b. **Love the Job (Passion)**
Passion and excitement in the work which is based on a sense of pride in the job and company.
Love the Job (Passion) is translated into 3 (three) Main Behaviors that will be hold in running the Company's businesses and organizations, namely:
 - 1) *The spirit and a strong desire to continue do the best in their field*
 - 2) *Enjoying his job and always think positive work*
 - 3) *Always generate quality jobs best*
- c. **Always Learning for Progress (Learning)**
Constantly learning new things and dare to try new ideas and ways of working better for the progress of the Company.

Always Learning for Progress (Learning) translated into two (2) Main Behaviors that will be hold in running the Company's businesses and organizations, namely:
 - 1) *Always try to improve the advancement and knowledge*
 - 2) *Looking far ahead and always strive to bring the company to a higher level*

- d. Membangun Kepercayaan (Trust)
Percaya pada niat baik dan kami senantiasa menjaga kepercayaan yang diamanahkan pada kami dalam melaksanakan pekerjaan.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan BAg terangkum dalam LAYAR BAHTERA yang mempunyai arti, yaitu :

- d. *Build Trust (Trust) Believes in good faith and we always keep the trust placed in us in carrying out the work.*

CORPORATE CULTURE

BAg Corporate culture is summed up in LAYAR BAHTERA that has meaning, that is:

- L** Loyal dalam melaksanakan tugas yang diemban
A Arif dalam mengambil keputusan
Y Yakin dalam bertindak atau berkarya
A Adaptif terhadap perubahan
R Rasa tanggung jawab yang tinggi dalam tugas dan kewajiban
- B** Bersama menggalang semangat untuk mencapai kinerja terbaik
A Antusias meningkatkan profesionalisme, kreatif dan inovatif
H Hati yang bersih dan integritas tinggi
T Toleransi yang tinggi terhadap perbedaan demi pengembangan perusahaan
E Empati terhadap kepentingan sosial dan lingkungan masyarakat
R Responsif dan menjaga kepuasan pelanggan
A Amanah sebagai pegangan menjalankan tugas

SASARAN STRATEGIS PERUSAHAAN

Sebagai suatu entitas bisnis, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (PT BAg) harus mampu memenuhi berbagai harapan stakeholder. Dalam 5 (lima) tahun ke depan harapan-harapan stakeholder terangkum pada Tabel ...

STRATEGIC TARGET COMPANY

As a business entity, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (PT BAg) must be able to meet the expectations of stakeholders. Within five (5) years from the expectations of stakeholders summarized in Table ...

Stakeholders Inti	Harapan
PLN Korporat (DIVBAT)	PT BAg menjadi enabler PLN untuk mendukung operasional PLN dalam angkutan laut untuk batubara dan gas untuk pembangkit milik PLN.
	PT BAg menjamin security supply batubara dan gas untuk pembangkit milik PLN dan IPP
	PT BAg memiliki sistem manajemen transportasi laut yang handal, tepat waktu dan efisien
Perusahaan Batubara dan Gas (Pemasok)	PTBAG mampu tepat waktu dalam pengambilan batubara dan gas, dengan kondisi kapal handal dan laik laut, serta jenis armada angkut sesuai dengan klausul kontrak
Mitra Transportir (Pemasok)	Kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan
	Kapal yang dioperasikan oleh PT BAg bisa lebih dioptimalkan
PLTU (Pelanggan)	PTBAG mampu menyiapkan kapal sesuai dengan rapat koordinasi bulanan dengan kedatangan kapal tepat waktu.

Harapan stakeholder inti di atas harus mampu diwujudkan oleh PT BAg dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rencana strategis PT BAg, harapan-harapan tersebut menjadi suatu tantangan dan arah strategis 2015-2019, yang meliputi:

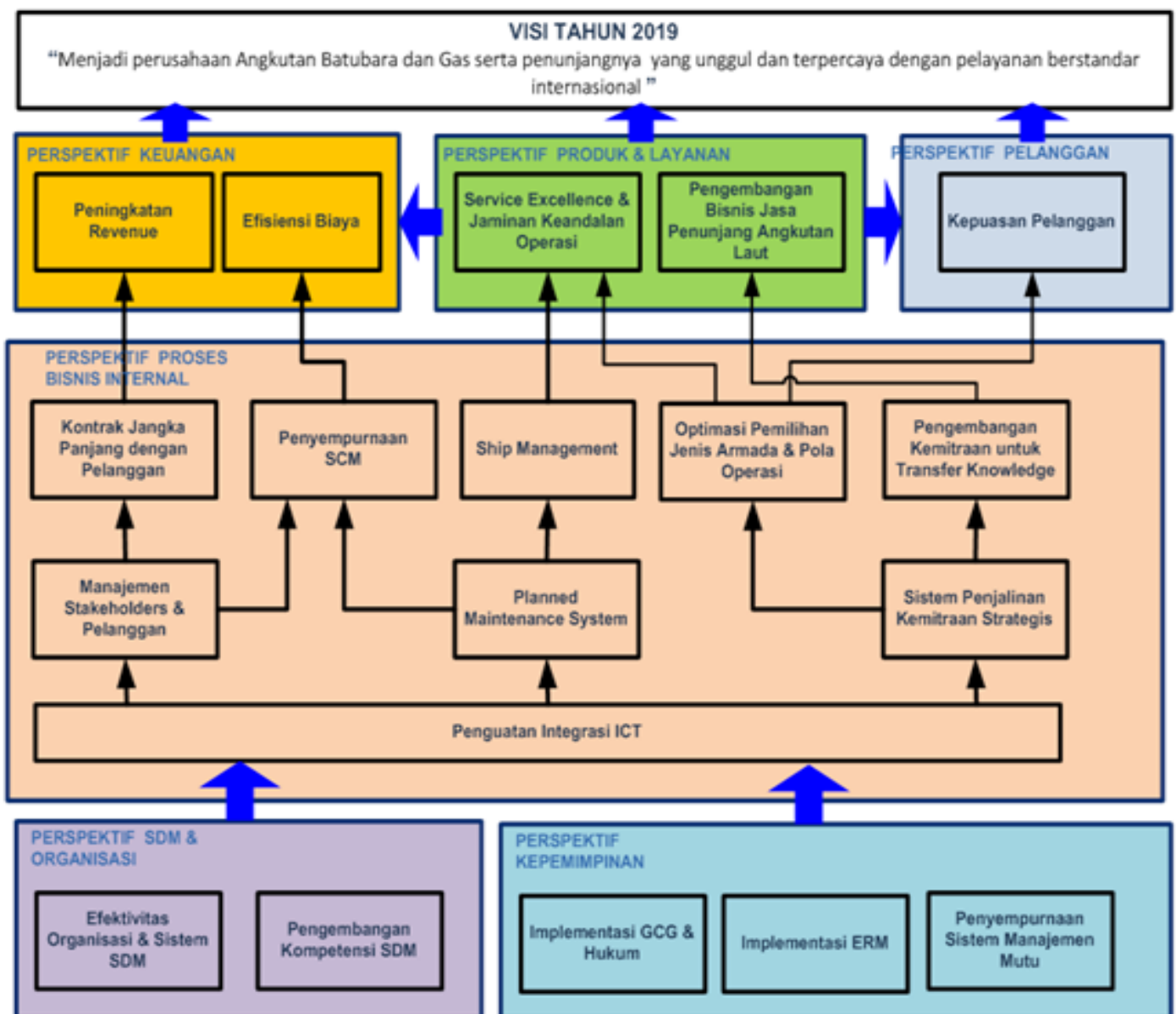
1. Meningkatkan kemampuan SDM dan organisasi dalam supply chain management (SCM) dan fleet & traffic management
2. Memastikan kontrak PLN dapat sesuai dengan best practice untuk angkutan laut
3. Melakukan penyempurnaan sistem teknologi informasi manajemen perkapalan
4. Memastikan mitra transportir memiliki kredibilitas dan reputasi nasional (profesional dalam usahanya)
5. Memperoleh kontrak jangka panjang dengan pelanggan

Roadmap strategi perusahaan :

Above expectations of key stakeholders must be able to be realized by PT BAg within 5 (five) years. In the strategic plan of PT BAg, these expectations become a challenge and strategic direction 2015-2019, which include:

1. *Improving the ability of HR and organization in supply chain management (SCM) and fleet & traffic management*
2. *Ensure the contract PLN can match the best practice for sea transport*
3. *Improving technology systems information management of shipbuilding*
4. *Ensure transporter partners have no credibility and national reputation (professional in the business)*
5. *Obtain long-term contracts with customer*

Roadmap strategy of the company:



BIDANG USAHA

Bidang usaha yang dilakukan oleh Perusahaan saat ini meliputi :

1. Usaha dalam bidang jasa transportasi laut untuk trayek dalam negeri dan luar negeri
2. Usaha keagenan umum dalam dan luar negeri dan bongkar muat

JUMLAH KARYAWAN

Jumlah pegawai inti BAg sampai dengan 31 Desember 2014 adalah 39 orang dengan komposisi yang terdapat pada tabel berikut :

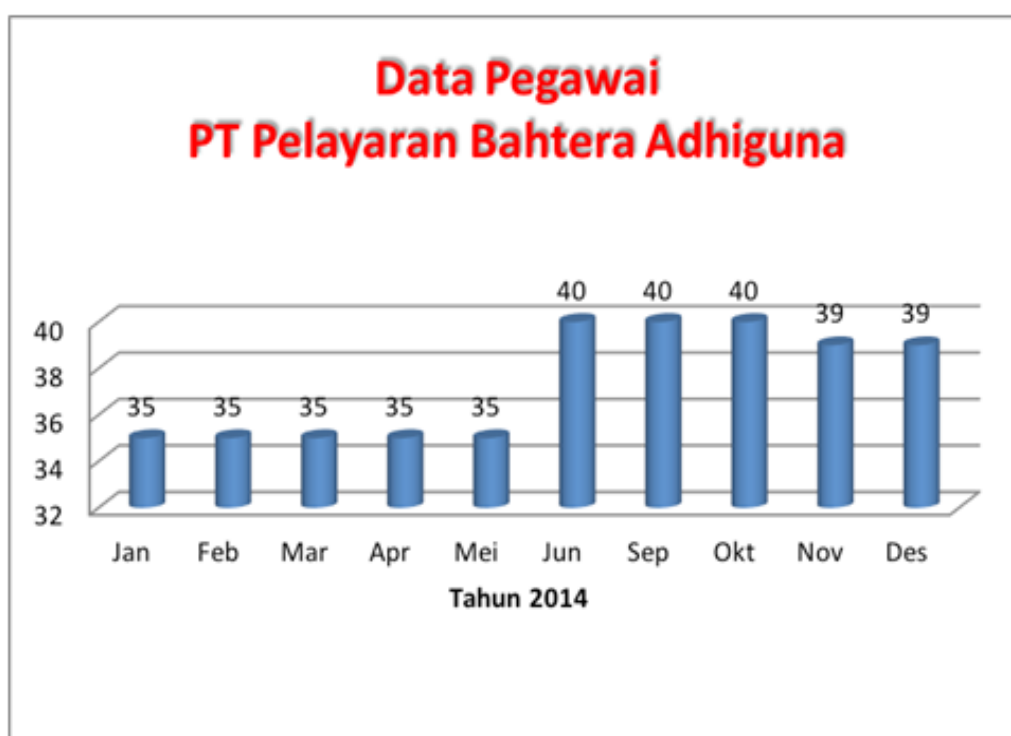
BUSINESS FIELDS

Field work done by the Company at this time include:

1. Enterprises in the field of marine transportation services for stretch in the country and abroad
2. The public agency efforts at home and abroad and unloading and loading

NUMBER OF EMPLOYEES

BAg core number of employees up to December 31, 2014 are 39 people with the composition contained in the following table:



Jumlah karyawan utk masing-masing tingkat pendidikan

For the number of employees of each level of education

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Karyawan
1	S2	2 karyawan
2	S1	34 karyawan
3	DIV	2 karyawan
4	DIII	1 karyawan

PELATIHAN YANG TELAH DILAKUKAN

Guna menunjang kinerja pegawai, BAg memberikan pelatihan kepada para pegawai sehingga para pegawai dapat memperkaya ilmu dan senantiasa mendukung kinerja korporat.

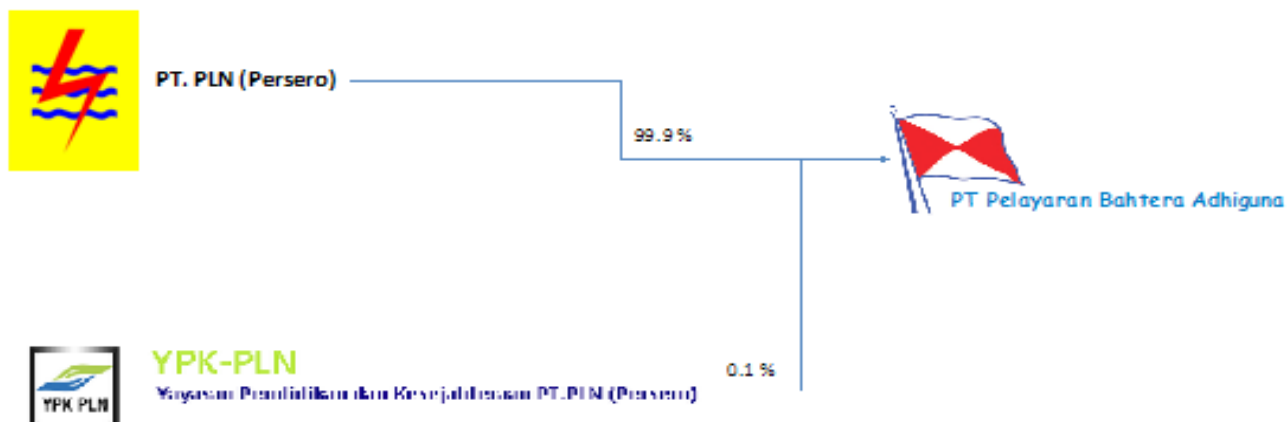
TRAINING THAT HAS BEEN DONE

To support employee performance, BAg provide training to employees, so employees can enrich their qualities and continue to support the company.

No	JENIS DIKLAT	TANGGAL	LOKASI	PENYELENGGARAN	Peserta
1	Workshop Coorporate Action Terkait Indenture Global Bond dari Linklaters & Hadiputranto, serta Hadinoto & Partners	6-7 Feb 2014	Hotel Mercure Kuta Beach Bali	PT PLN (Persero) Kantor Pusat	3 Orang
2	Workshop Gabungan Divisi Gas & BBM dan Divisi Batubara PLN	10-11 Feb 2014	Gedung Serba Guna Udiklat Pandaan - Pasuruan	PT PLN (Persero) Pusdiklat	3 Orang
3	Class NK Academy Course	12 Februari 2014	Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta	Class NK Jakarta	2 Orang
4	Pendalaman Materi (TOT) MKEU Dasar Manajemen Keuangan Level Manajemen Menengah dan Manajemen Atas	13 - 14 Feb 2014	PT PLN (Persero) UPJB Yogyakarta	PT PLN (Persero) Pusdiklat	1 Orang
5	Pelatihan Brevet	08 April 2014	Ikatan Akuntansi Indonesia		1 Orang
6	Pelatihan Aplikasi Batubara Online	15 -16 April 2014	PT Icon Plus	PT Icon Plus	4 Orang
7	Pelatihan ISO 9001/2008	5-6 Mei 2014	Pusdiklat PT PLN (Persero)	PT PLN (Persero) Pusdiklat	6 Orang
8	Workshop PSAK Revisi 2013	21-22 Mei 2014	PT PLN Batam	PT PLN Batam & Deloitte	3 Orang
9	Class NK Academy Course	05 Juni 2014			4 Orang
10	Workshop Identifikasi Kebutuhan Pembelajaran Tahun 2015	19 Agustus 2014	PT PLN (Persero) Udiklat Bogor	PT PLN (Persero) Pusdiklat	2 Orang
11	Workshop Assesment GCG tahun 2014	11-12 Sept 2014	PT PLN (Persero) Kantor Pusat	PT PLN (Persero) Pusdiklat	2 Orang
12	Workshop BAg Bersih	17 Juli 2014	PT PLN (Persero) Pusdiklat	PT PLN (Persero) Kantor Pusat	2 Orang
13	E-Learning Audit Mutu Internal	16-17 Oktober 2014	PT PLN (Persero) Udiklat Jakarta	PT PLN (Persero) Pusdiklat	1 Orang
14	Workshop HCR OCR 2015	11-12 Oktober 2014	PT PLN (Persero) Kantor Pusat	PT PLN (Persero) Kantor Pusat	1 Orang
15	PSAK Terkini Sesuai Program Konvergensi IFRS	4-5 Desember 2014	Jakarta	IAI & PT PLN (Persero)	1 Orang

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan PP No. 20 tanggal 4 Maret 2011 tentang Penambahan penyertaan modal saham ke PT PLN (Persero), BAg telah resmi menjadi Anak Perusahaan PLN. Komposisi pemegang saham BAg adalah PT PLN (Persero) sebesar 99.9 % dan YPK.



COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

According to PP 20 March 4, 2011, on the addition of equity shares to PT PLN (Persero), BAg has officially become the PLN Subsidiary. BAg shareholders are 99.9% held by PT PLN (Persero) and YPK.

DAFTAR ANAK PERUSAHAAN

BAg mempunyai Anak Perusahaan yang bergerak di bidang usaha bongkar muat yaitu PT Adhiguna Putera (Adhira). Namun, berdasarkan Risalah RUPS tanggal 30 Desember 2013, PLN memberikan arahan untuk melakukan **deviasi** terhadap Adhira dikarenakan tidak sesuai bidang usaha yang dijalankan. Sehingga BAg dapat lebih fokus menjalankan bisnis utamanya yaitu sebagai penyedia jasa transportasi batubara dan pengaman pasokan batubara untuk PLTU milik PLN, Anak Perusahaan PLN dan Independent Power Producer (IPP).

LIST OF SUBSIDIARIES

BAg subsidiaries has engaged in stevedoring business, PT Adhiguna Putera (Adhira). However, based on the Minutes of Annual Shareholders Meeting on December 30, 2013, PLN provide direction to **deviation** against Adhira due to the incompatibility of the field of the ongoing business. So BAg can be more stable on running its core business as a provider of transportation services and security of coal supply for power plants owned by PLN, PLN Subsidiaries and Independent Power Producer (IPP).

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Sampai dengan akhir tahun 2014, BAg belum pernah mencatatkan sahamnya di Bursa Saham, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan saham, jenis tindakan korporasi (corporate action), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa tersebut.

CHRONOLOGY LISTING OF SHARES

Until the end of 2014, BAg has not been listed on the Stock Exchange, so there is no chronological information related to its stock, type of corporate actions (corporate actions), number changes in shares, as well as the name of the exchange.

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK

Sampai dengan akhir tahun 2014, BAg belum pernah mencatatkan efek di pasar modal, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi (corporate action), perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek tersebut.

CHRONOLOGY EXCHANGE LISTING

Until the end of 2014, BAg has never been recorded in the capital market effects, so there is no information related to chronological, types of corporate actions (corporate actions), the effects of changes in the number, names and ranking of these securities exchanges.

JARINGAN KERJA

BAg memiliki jaringan kerja berupa kantor perwakilan yang berada di Jepara, Jawa Tengah, selain Kantor Pusat di Jakarta. Fungsi kantor perwakilan BAg di Jepara adalah untuk mengawasi dan memberikan pelayanan optimal bagi PLTU Tanjung Jati B milik PLN.

NETWORK

BAg has the form of a network of representative offices located in Jepara, Central Java, in addition to the Central Office in Jakarta. Function of BAg representative office in Jepara is to oversee and provide optimal service to the Tanjung Jati B PLN.

PERISTIWA PENTING

Adapun peristiwa penting yang terjadi sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pembelian 1 (satu) unit barge 330 ft (BG. Baruna Power 3301) tanggal 10 Januari 2014.
2. Penutupan sementara 5 (lima) kantor cabang PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, yaitu Cabang Makassar, Cabang Belawan, Cabang Tanjung Priok, Cabang Banjarmasin dan Cabang Samarinda pada tanggal 12 Februari 2014.
3. Penyampaian kontra memori kasasi atas kasus klaim loss payee KM Adhiguna Jaya 1 pada tanggal 27 Maret 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
4. RUPS pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan tahun 2013 tanggal 2 April 2014.
5. Penandatanganan pembangunan baru 2 (dua) unit tug boat 2 x 1.000 HP pada tanggal 7 April 2014.
6. Penandatanganan pembangunan baru 1 (satu) unit barge 330 ft dan satu unit barge 300 feet pada tanggal 16 Juni 2014.
7. Penyampaian kontra kasasi memori Peninjauan Kembali (PK) atas kasus tanah di Jl. MT Haryono Kav. 14 Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juli 2014.
8. Serah terima jabatan komisaris utama yang baru pada tanggal 10 September 2014.
9. Pelaksanaan docking KM Adhiguna Tarahan di PT PAL Surabaya pada bulan September 2014.
10. Penandatanganan Memorandum of Agreement (MOA) dengan STA Lines untuk pembelian 1 (satu) unit kapal Panamax pada tanggal 12 Desember 2014.
11. Peresmian renovasi kantor pada tanggal 13 Desember 2014.

IMPORTANT PHENOMENON

The existence of significant events that occurred until December 31 2014 are as follows:

1. *Purchase one (1) unit of barge 330 ft (BG. Baruna Power 3301) dated 10 Januari 2014.*
2. *The temporary closure of 5 (five) branches of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, namely Makassar Branch, Belawan Branch, Tanjung Priok Branch, Banjarmasin and Samarinda Branch on February 12, 2014.*
3. *Submission counter against the cassation in a case of loss claims payee KM Adhiguna Jaya 1 on March 27, 2014 in West Jakarta District Court.*
4. *GMS liability company management in 2013 April 2, 2014.*
5. *The signing of the new development of 2 (two) unit tug boat 2 x 1000 HP on April 7, 2014.*
6. *The signing of the new development of 1 (one) unit 330 ft barge and a 300 feet unit barge on June 16, 2014.*
7. *Submission counter cassation Appeal Review (PK) on the case of land on Jl. MT Haryono Kav. 14 South Jakarta on July 14, 2014.*
8. *Handover the new commissioner on September 10, 2014.*
9. *Implementation of KM Adhiguna Tarahan docking at PT PAL Surabaya in September 2014.*
10. *The signing of the Memorandum of Agreement (MOA) with STA Lines for the purchase of one (1) unit Panamax ships on December 12, 2014.*
11. *The inauguration of the renovation office on December 13, 2014.*

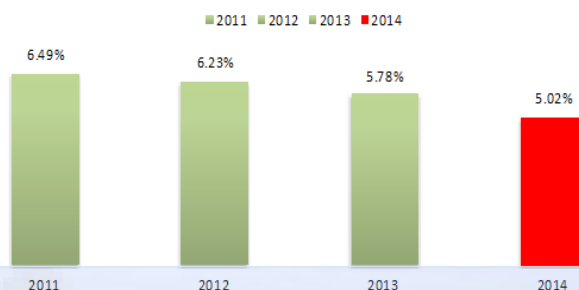
KONDISI UMUM

Perekonomian global di tahun 2014, masih belum kembali kemasa sebelum krisis di tahun 2008. Pemulihan perekonomian global berjalan tidak seimbang, dimana beberapa negara di Asia masih mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi diantaranya Tiongkok dan Jepang, disamping itu negara di Eropa termasuk Jerman juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Namun terdapat negara yang mengalami tren positif dalam pertumbuhan ekonomi yakni India yang justru telah menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi perekonomian Amerika Serikat telah mulai pulih, membuat Bank Sentral, bersama Pemerintah Amerika sepakat untuk memulai program pengurangan stimulus. Langkah yang kemudian berdampak pada penguatan dollar Amerika Serikat (AS) terhadap hampir seluruh mata uang kuat dunia, termasuk rupiah.

PEREKONOMIAN NASIONAL

Belum kondusifnya perekonomian global tersebut, mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencatatkan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 5,20% lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,78%. Penurunan pertumbuhan ekonomi 2014 terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor non-migas akibat masih lemahnya permintaan berbagai komoditas primer andalan ekspor Indonesia seperti CPO dan batubara. Sementara larangan ekspor mineral mentah membuat nilai ekspor produk non-migas ikut melemah. Kondisi ini membuat neraca perdagangan tertekan.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto



Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2014

NILAI TUKAR MATA UANG

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar AS yaitu berada pada level Rp 11.876,-. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dikarenakan kuatnya apresiasi dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang utama dunia. Hal ini sejalan dengan rilis data perbaikan ekonomi AS dan rencana kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR).

INFLASI

Pada tahun 2014 inflasi Indonesia masih tinggi meskipun tidak terlalu fluktuatif seperti tahun 2013. Kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi pada november 2014 beserta dampak ikutannya terhadap harga komoditas di dalam negeri akibat pelemahan nilai tukar Rupiah menyebabkan tingginya tingkat inflasi. Pada awal tahun 2014 tingkat inflasi nasional berada di posisi 8,22%, sedangkan di akhir tahun 8,36%. Kondisi ini dapat berdampak negatif bagi kinerja keuangan perusahaan, dimana pergerakan inflasi yang fluktuatif dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan.

GENERAL CONDITIONS

The global economy in 2014, still has not returned backwards before the crisis in 2008. The global economic recovery is running out of balance, where several countries in Asia are still declining economic growth including China and Japan, in addition to countries in Europe including Germany also experienced a decline in economic growth. But there are countries experiencing a positive trend in the growth of the Indian economy that it has shown an increase in economic growth. The condition of the US economy has started to recover, making the Central Bank, together with the US government agreed to initiate the reduction of the stimulus program. Measures which have an impact on the strengthening of the US dollar (US) against almost all major currencies of the world, including the rupiah.

NATIONAL ECONOMY

The global economy has not been conducive, affect the rate of economic growth in Indonesia. 2014 Indonesia's economic growth rate recorded gross domestic product growth of 5.20% lower than in 2013 by 5.78%. Decline in economic growth in 2014 is mainly due to a decrease in the performance of non-oil exports due to the weak demand for mainstay export of primary commodities such as palm oil and coal in Indonesia. While the ban on the export of raw minerals to make the value of non-oil exports come down. These conditions make the trade balance depressed.

Source: Economic Report Indonesia 2014

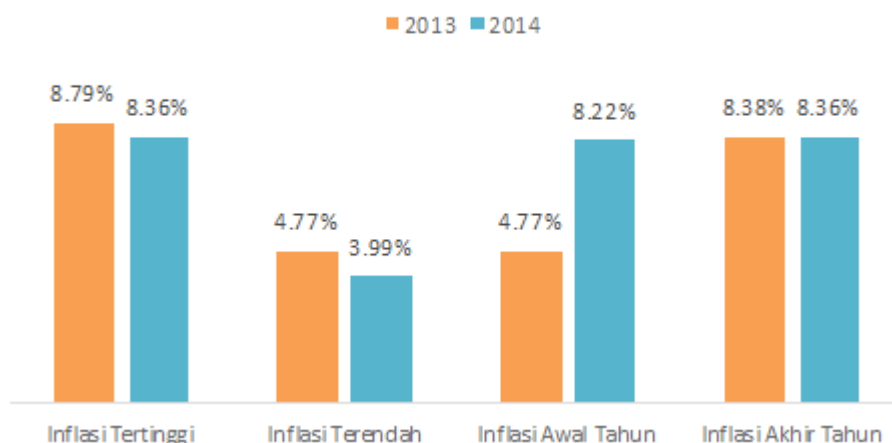
CURRENCY EXCHANGE RATE

Based on data published by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the rupiah to depreciate against the US dollar, namely at the level of USD 11 876, -. The weakening of the rupiah against the US dollar due to the strong appreciation of the US dollar against almost all major currencies. This is in line with the improvement of US economic data releases and the planned increase in the interest rate the Fed Funds Rate (FFR).

INFLATION

In 2014 the Indonesian inflation is still high although not too volatile as in 2013. The increase in the price of fuel oil (fuel) subsidy in November 2014 along with the impact on commodity prices in the country due to the weakening of the rupiah led to high levels of inflation. In early 2014 the national inflation rate was in the position of 8.22%, while 8.36% at the end of the year. These conditions may negatively affect the company's financial performance, where the movement of the fluctuating inflation could affect the company's operating costs.

Pergerakan Inflasi Indonesia



Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2014

Source: Economic Report Indonesia 2014

PEMENUHAN KEBUTUHAN PASOKAN LISTRIK NASIONAL

Dalam beberapa tahun terakhir, PLN berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan pasokan daya listrik sesuai kebutuhan. Namun demikian dimasa mendatang, tantangan akan semakin besar, mengingat Indonesia bertekad meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berarti naiknya kebutuhan akan pasokan daya listrik.

PERAN BAg DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN PASOKAN LISTRIK NASIONAL

BAg sebagai anak perusahaan PLN yang bergerak dalam bidang jasa angkutan laut batubara bertugas sebagai enabler dan security of supply atas kebutuhan pasokan batubara ke sejumlah PLTU milik PLN, Anak Perusahaan dan Independent Power Producer (IPP). Hal ini sejalan dengan tekad pemerintah dan PLN untuk terus mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan selalu menjaga dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional.

TINJAUAN OPERASI

Pemasaran

Kinerja perusahaan dalam tahun 2014 sangat dipengaruhi oleh pertambahan kontrak angkutan batubara dari PT Indonesia Power (IP) dan bertambahnya permintaan angkutan batubara dari PT PLN (Persero) untuk memasok batubara ke PLTU Fast Track Program ("FTP") Tahap I sebesar 10.000 MW yang tersebar di Jawa. Untuk memenuhi semua kontrak angkutan batubara, BAg mengoperasikan kapal milik, yaitu KM Adhiguna Tarahan, KM Kartini Baruna, KM Sartika Baruna, KM Intan Baruna, TB Srikandi Baruna 2401/BG Baruna Power 3001 dan TB Srikandi Baruna 2402/BG Baruna Power 3301 dan melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan beberapa perusahaan pelayaran yang melibatkan 1 (satu) kapal Panamax, 3 (tiga) unit Self Propeller Barge (SPB) dan 23 (dua puluh tiga) set Tug and Barge.

MEETING THE NEEDS OF THE NATIONAL ELECTRICITY SUPPLY

In recent years, PLN managed to support Indonesia's economic growth by increasing the supply of electrical power as needed. However in the future, the challenge will be even greater, considering that Indonesia is committed to increase the rate of economic growth means rising demand for electrical power supply.

BAg ROLE IN MEETING THE NEEDS OF THE NATIONAL ELECTRICITY SUPPLY

BAg as a subsidiary of PLN, which is engaged in the ocean transportation of coal serves as an enabler and security of supply on the needs of the coal supply to a power plant owned by PLN, Subsidiaries and Independent Power Producer (IPP). This is in line with the government's determination and PLN to continue to drive economic growth and always keep in fulfillment of the national electricity demand.

REVIEW OF OPERATIONS

Marketing

The company's performance in 2014 was strongly influenced by the increase of coal transportation contract from PT Indonesia Power (IP) and the increasing demand for coal transportation from PT PLN (Persero) to supply coal to the power plant Fast Track Program ("FTP") Phase I of 10,000 MW spread in Java. To meet all contract coal transportation, BAg operate the vessel belongs, namely KM Adhiguna Tarahan, KM Kartini Baruna, KM Sartika Baruna, KM Intan Baruna, TB Srikandi Baruna 2401 / BG Baruna Power 3001 and TB Srikandi Baruna 2402 / BG Baruna Power 3301 and do Joint Operation (KSO) with some shipping companies involving one (1) Panamax vessels, three (3) units Self Propeller Barge (SPB) and 23 (twenty three) sets of Tug and Barge.

Program kegiatan pemasaran selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan amandemen kontrak terkait dengan penambahan rute baru angkutan batubara dari PT Bukit Asam - Tarahan ke PLTU Tanjung Awar-awar dan dari PT KPC - Sangatta ke PLTU Tanjung Awar-awar.
2. Membuat pola angkutan batubara untuk pasokan ke PLTU di Indonesia Timur.
3. Menjajaki peluang angkutan batubara dari PT KPC ke PLTU Paiton.
4. Melakukan pembahasan rencana transshipment batubara di pelabuhan muat milik PT Adaro.
5. Menjaga kontinuitas pasokan batubara dengan membuat perjanjian angkutan laut jangka panjang dengan mitra KSO.
6. Meningkatkan komunikasi dengan syahbandar, administrasi pelabuhan, keagenan, Jetty Master dan pihak terkait lainnya di tiap pelabuhan muat dan bongkar.

PENJUALAN

Realisasi pendapatan dari penjualan jasa angkutan laut sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp 1.27 triliun atau mencapai 167.37% dari tahun 2013 sebesar Rp 764.16 milyar.

Perincian pendapatan dari penjualan jasa angkutan batubara adalah sebagai berikut :

a. KM Adhiguna Tarahan

KM Adhiguna Tarahan dioperasikan untuk melayani angkutan batubara dari Pelabuhan Tarahan Lampung tujuan PLTU Suralaya milik PT Indonesia Power (IP). Pada tahun 2014, KM Adhiguna Tarahan mengangkut batubara sebanyak 62 shipment dengan volume angkutan sebesar 636.72 ribu MT atau 69.94% dari tahun 2013 sebesar 910.37 ribu MT. Pendapatan KM Adhiguna Tarahan pada tahun 2014 mencapai sebesar Rp 24.60 miliar atau 75.37% dari tahun 2013 sebesar Rp 32.64 miliar.

Marketing program activities during 2014 are as follows:

1. Carry out a contract amendment associated with additional new transport route for coal from PT Bukit Asam - Tarahan to plant Tanjung Awar-awar and from PT KPC - Sangatta to Tanjung Awar-awar plant.
2. Create a pattern for supply to the coal transportation Plant in East Indonesia.
3. Exploring opportunities of coal transportation from the KPC to Paiton.
4. Conducting discussions transshipment plan coal at the port of loading of PT Adaro.
5. Maintain continuity of coal supply make long-term sea transport agreement the KSO partners.
6. Improve communication with syahbandar, port administration, agency, Jetty Master and other related parties in each port of loading and unloading.

SALES

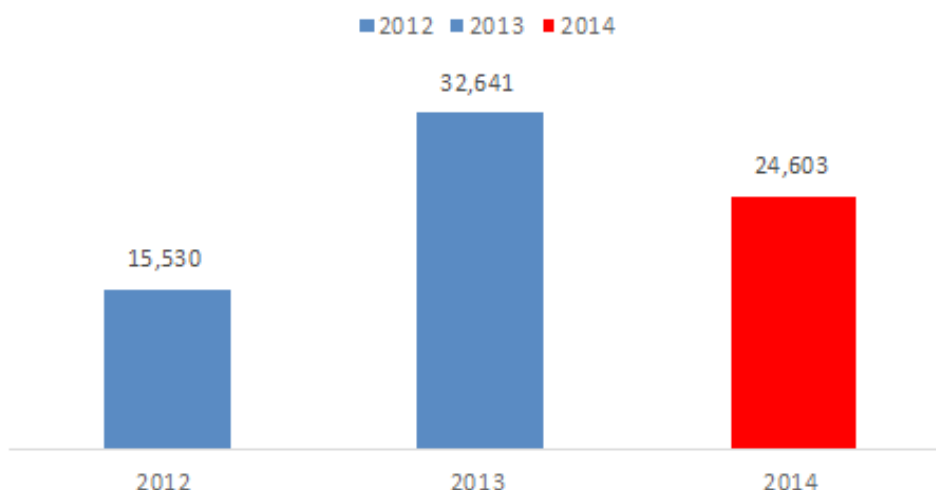
Realization of revenue from the sale of marine transportation services through 2014 amounting to Rp 1.27 trillion or 167.37% from the year 2013 amounting to Rp 764.16 billion.

Breakdown of revenues from sales of coal transport services are as follows:

a. KM Adhiguna Tarahan

KM Adhiguna Tarahan operated to serve the transportation of coal from the Port Tarahan Lampung Suralaya plant owned by PT Indonesia Power (IP). In 2014, KM Adhiguna Tarahan transported coal by 62 shipment to the transport volume amounted to 636.72 thousand MT or 69.94% from the year 2013 amounted to 910.37 thousand MT. Revenue of KM Adhiguna Tarahan in 2014 reached Rp 24.60 billion or 75.37% from the year 2013 amounting to Rp 32.64 billion.

Pendapatan KM Adhiguna Tarahan



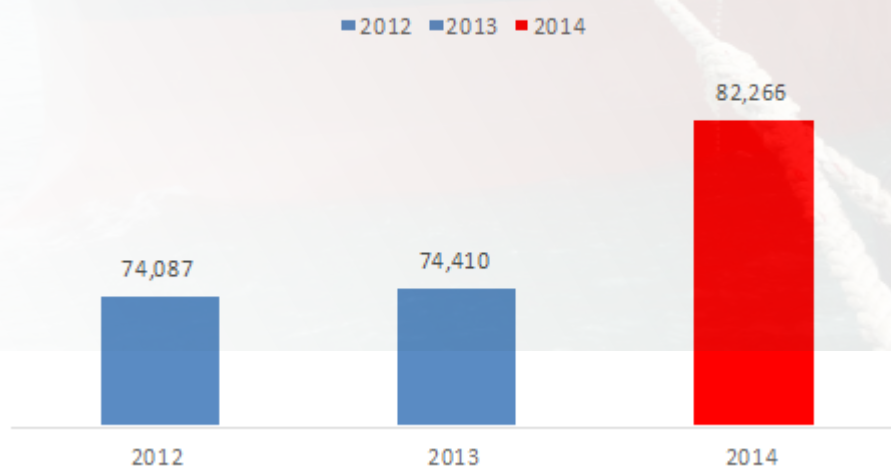
b. KM Kartini Baruna

KM Kartini Baruna dioperasikan untuk melayani kontrak dengan PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Tanjung Jati B. Pada tahun 2014, realisasi shipment KM Kartini Baruna sebanyak 29 shipment dengan volume angkutan batubara sebesar 1.97 juta MT atau 107.43% dari tahun 2013 sebesar 1.83 juta MT. Akan tetapi volume angkutan tidak mempengaruhi pendapatan karena sistem kontrak KM Kartini Baruna adalah Time Charter Basis. Sampai dengan tahun 2014 pendapatan KM Kartini Baruna sebesar Rp 88,26 miliar atau sebesar 110.56% dari tahun 2013 sebesar Rp 74.41 miliar.

b. KM Kartini Baruna

KM Kartini Baruna operated to serve a contract with PT PLN (Persero) Generation Unit Tanjung Jati B. In 2014, the realization of KM Kartini Baruna shipment total of 29 shipments with coal value shipment of 1.97 million MT or 107.43% from the year 2013 amounted to 1.83 million MT. But the volume of transport do not affect revenues because the contract system of KM Kartini Baruna is the Time Charter Base. Up to 2014 KM Kartini Baruna revenue of Rp 88.26 billion or 110.56% from the year 2013 amounting to Rp 74.41 billion.

Pendapatan KM Kartini Baruna



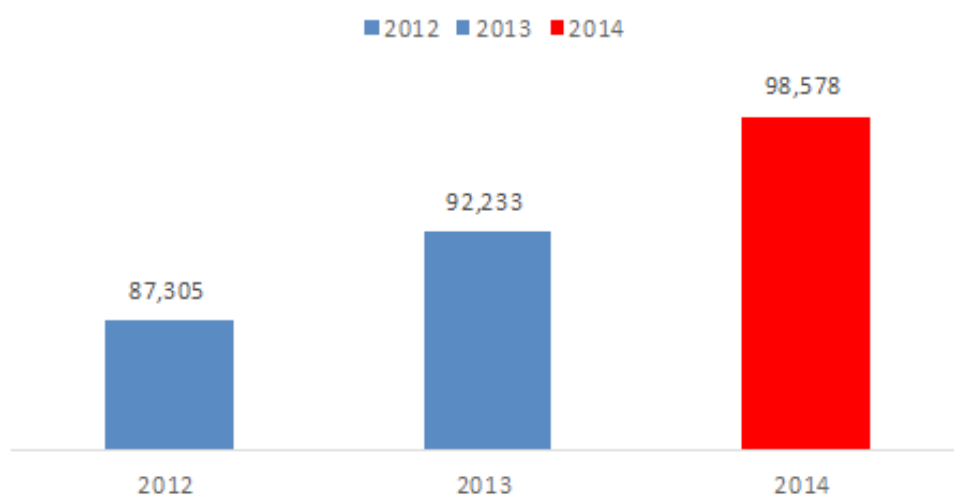
c. KM Kartini Samudera

KM Kartini Samudera dioperasikan untuk melayani kontrak dengan PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Tanjung Jati B. Pada tahun 2014, realisasi shipment KM Kartini Samudera sebanyak 27 shipment dengan volume angkutan batubara sebesar 1.91 juta MT atau 103.78% dari tahun 2013 sebesar 1.83 juta MT. Akan tetapi volume angkutan tidak mempengaruhi pendapatan karena sistem kontrak KM Kartini Samudera adalah Time Charter Basis. Pada tahun 2014 pendapatan KM Kartini Samudera mencapai Rp 98.57 miliar atau sebesar 106.88% dari tahun 2013 sebesar Rp 92,23 miliar.

c. KM Kartini Samudera

KM Kartini Samudera operated to serve a contract with PT PLN (Persero) Tanjung Jati B. unit plant In 2014, the realization of KM Kartini Samudera was by 27 shipment with coal shipment value of 1.91 million MT or 103.78% from the year 2013 amounted to 1.83 million MT. But the volume of transport do not affect revenues because the contract system of KM Kartini Samudera is the Time Charter Base. In 2014 revenues of KM Kartini Samudera reached Rp 98.57 billion or 106.88% from the year 2013 amounting to Rp 92.23 billion.

Pendapatan KM Kartini Samudera

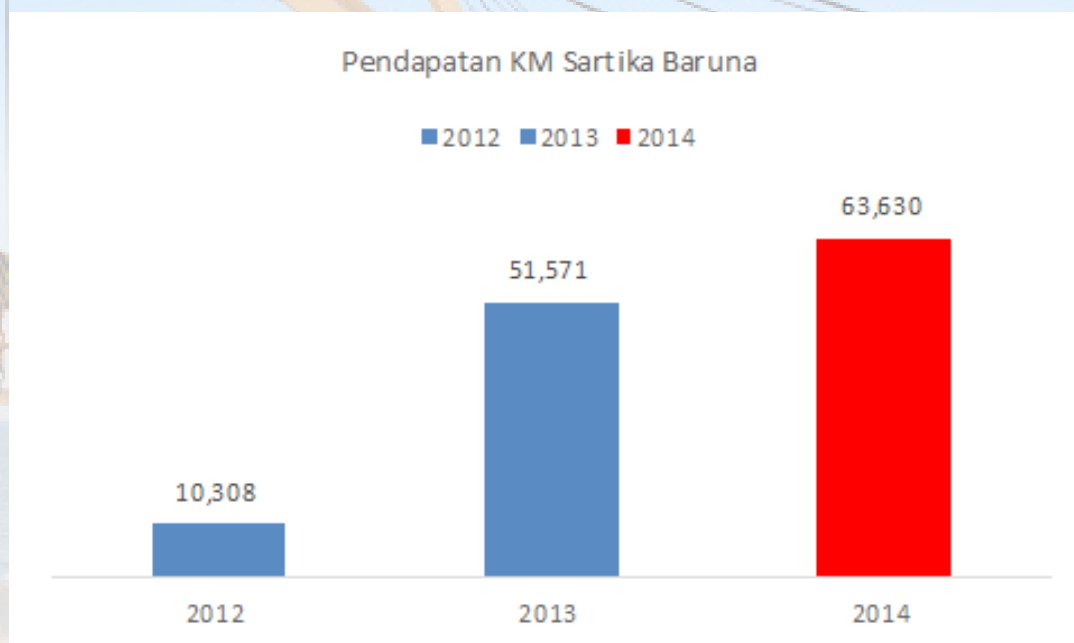


d. KM Sartika Baruna

KM Sartika Baruna dioperasikan untuk melayani angkutan batubara dari Pelabuhan Tarahan Lampung tujuan PLTU Suralaya milik PT Indonesia Power (IP). Jumlah shipment selama tahun 2014 sebanyak 120 shipment. Sedangkan realisasi volume angkutan pada tahun 2014 adalah sebesar 1.44 juta MT atau 115.41% dari tahun 2013 sebesar 1.25 juta MT. Pendapatan KM Sartika Baruna pada tahun 2014 mencapai Rp 63.62 miliar atau 123.38% dari tahun 2013 sebesar Rp 51.57 miliar.

d. KM Sartika Baruna

KM Sartika Baruna operated to serve the transportation of coal from the Port Tarahan Lampung to Suralaya Plant owned by PT Indonesia Power (IP). The amount of shipment for the year 2014 a total of 120 shipments. While the realization of freight volume in 2014 amounted 1.44 million MT or 115.41% from the year 2013 of 1.25 million MT. KM Sartika Baruna income in 2014 reached Rp 63.62 billion or 123.38% from the year 2013 amounting to Rp 51.57 billion.



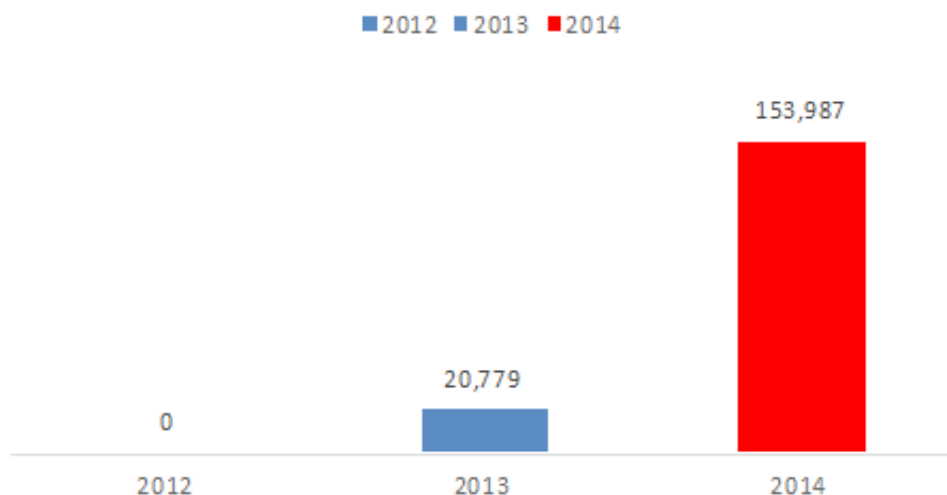
e. KM Intan Baruna

KM Intan Baruna dioperasikan untuk melayani angkutan batubara dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) ke PLTU Lontar dan PLTU Indramayu. Jumlah Shipment pada tahun 2014 sebanyak 23 shipment. Sedangkan realisasi volume angkutan KM Intan Baruna pada tahun 2014 sebesar 641.31 ribu MT atau 663.07% dari tahun 2013 sebesar 96.72 ribu MT. Pendapatan KM Intan Baruna pada tahun 2014 mencapai Rp 153,986 juta atau 741.08% dari tahun 2013 sebesar Rp 20,778 juta.

e. KM Intan Baruna

KM Intan Baruna operated to serve the transportation of coal from PT Kaltim Prima Coal (KPC) to Lontar and Indramayu power plant. Shipment values in 2014 as many as 23 shipments. While the realization of KM Intan Baruna freight volume in 2014 amounted to 641.31 thousand MT or 663.07% from the year 2013 amounted to 96.72 thousand MT. KM Intan Baruna revenue in 2014 reached Rp 153.986 million or 741.08% from the year 2013 amounting to Rp 20.778 million.

Pendapatan KM Intan Baruna

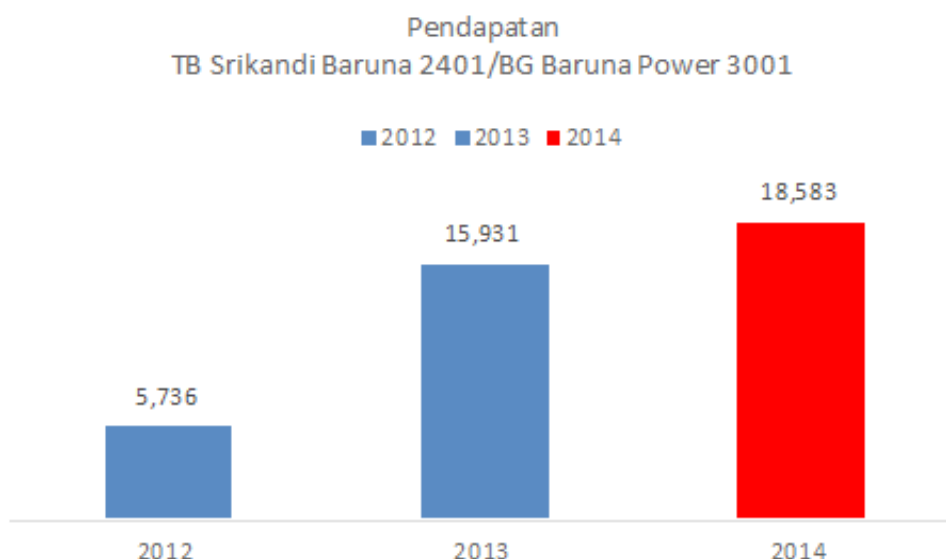


f. TB Srikandi Baruna 2401 & BG Baruna Power 3001

TB Srikandi Baruna 2401 & BG Baruna Power 3001 dioperasikan untuk melayani angkutan batubara ke PLTU yang tersebar di pulau Jawa, yaitu PLTU Rembang, PLTU Indramayu, PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Labuan. Pada tahun 2014, TB Srikandi Baruna 2401 & BG Baruna Power 3001 telah merealisasikan sebanyak 19 shipment dengan jumlah volume angkutan batubara sebesar 142.92 ribu MT atau 117.30% dari tahun 2013 sebesar 121.84 ribu MT. Pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 18,582 juta atau 116.64% dari tahun 2013 sebesar Rp 15,930 juta.

f. TB Srikandi Baruna 2401 & BG Baruna Power 3001

TB Srikandi Baruna 2401 & BG Baruna Power 3001 operated to serve the transportation of coal to power plants spread across the island of Java, namely Rembang, Indramayu, Pelabuhan Ratu power plant and the Labuan power plant. In 2014, TB Srikandi Baruna 2401 & BG Baruna Power 3001 has realized as much as 19 shipments with a total volume of coal transportation amounted to 142.92 thousand MT or 117.30% from the year 2013 amounted to 121.84 thousand MT. Revenues earned Rp 18.582 million or 116.64% from the year 2013 amounting to Rp 15.930 million.

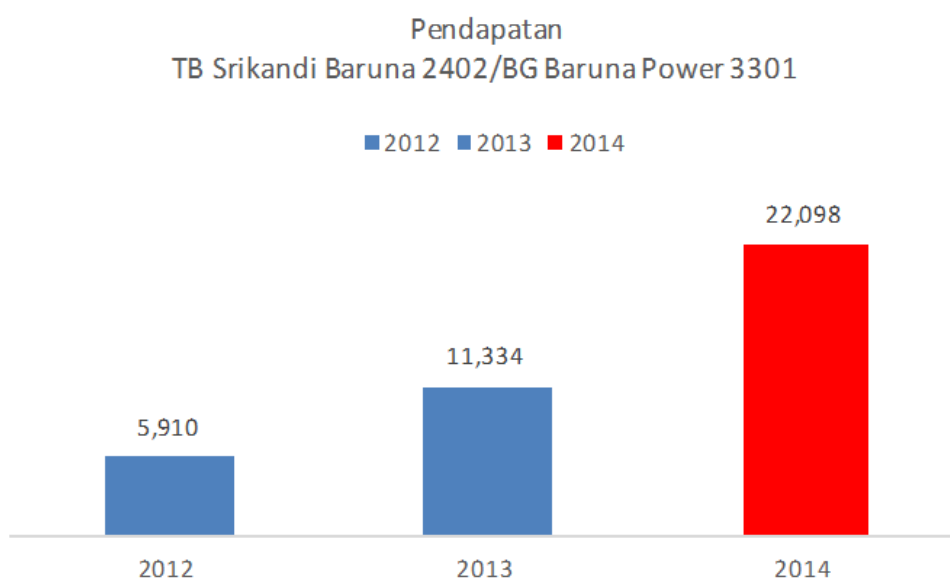


g. TB Srikandi Baruna 2402 & BG Baruna Power 3301

TB Srikandi Baruna 2402 & BG Baruna Power 3301 dioperasikan untuk melayani angkutan batubara ke PLTU yang tersebar di Jawa, yaitu PLTU Rembang, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Labuan, PLTU Tanjung Awar-awar dan PLTU Paiton. Pada tahun 2014 TB Srikandi Baruna 2402 & BG Baruna Power 3301 telah merealisasikan sebanyak 14 shipment dengan jumlah volume angkutan sebesar 140.45 ribu MT atau 159.78% dari tahun 2013 sebesar 87.90 ribu MT. Pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 22,098 juta atau 194.97% dari tahun 2013 sebesar Rp 11,334 juta.

g. TB Srikandi Baruna 2402 & BG Baruna Power 3301

TB Srikandi Baruna 2402 & BG Baruna Power 3301 operated to serve the transportation of coal to a power plant in Java, namely Rembang power plant, Pelabuhan Ratu power plant, Labuan power plant, Tanjung Awar-awar power plant and Paiton power plant. In 2014 TB Srikandi Baruna 2402 & BG Baruna Power 3301 has realized a total of 14 shipments with a total volume of 140.45 thousand MT or 159.78% in 2013 amounted to 87.90 thousand MT. Revenues earned Rp 22.098 million or 194.97% from the year 2013 amounting to Rp 11,334



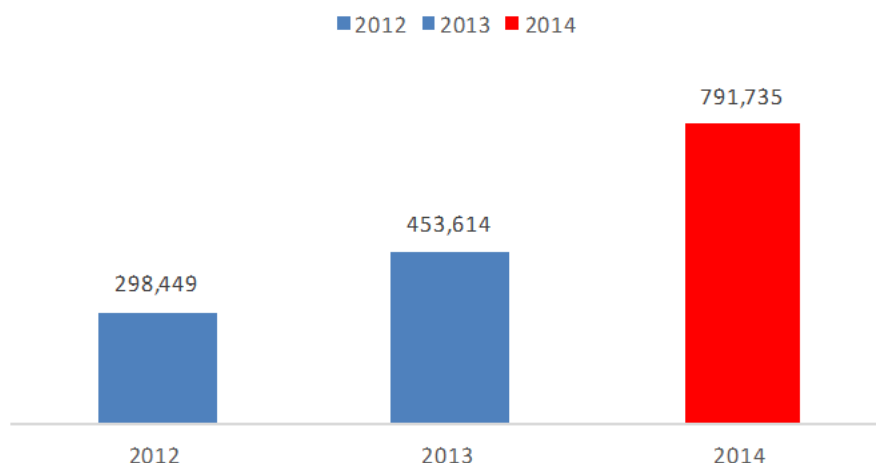
h. Kapal KSO lainnya

Kapal, SPB dan Tug & Barge KSO lainnya melayani angkutan batubara dari KPC, Adaro, Bukit Asam dengan tujuan PLTU 10.000 MW milik PLN, PLTU Suralaya milik IP dan PLTU Cilacap milik PT Sumber Segara Primadaya (S2P). Realisasi shipment pada tahun 2014 sebanyak 665 shipment dengan volume angkutan sebesar 7,26 juta MT atau sebesar 170.03% dari tahun 2013 sebesar 4.27 juta MT. Pendapatan KSO pada tahun 2014 sebesar Rp 791,735 juta atau 174.54% dari tahun 2013 sebesar Rp 453,614 juta.

h. Other KSO ship

Vessels, SPB and Tug & Barge and other KSO serve the transportation of coal from KPC, Adaro, Bukit Asam with the aim of PLN 10,000 MW power plant, Suralaya plant owned by IP and Cilacap plant owned by PT Sumber Segara Primadaya (S2P). Realization shipment in 2014 as many as 665 freight shipment volume amounted to 7.26 million MT, or by 170.03% from the year 2013 by 4.27 million MT. KSO revenues in 2014 amounting to Rp 791.735 million or 174.54% from the year 2013 amounting to Rp 453.614 million.

Pendapatan Kapal KSO Lainnya



PROFITABILITAS PER PELANGGAN

Realisasi pendapatan usaha BAg sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 1.27 triliun. Komposisi realisasi pendapatan usaha tahun 2014 terdiri dari beberapa pelanggan yang menerima jasa angkutan batubara BAg adalah sebagai berikut.

PROFITABILITY PER CUSTOMER

Realization of BAg revenues until December 31, 2014 was Rp 1.27 trillion. The composition of operating revenues realized in 2014 consisted of several customers who received the BAg of coal transportation services are as follows.

URAIAN	2012	2013	2014	%	DESCRIPTION
PT PLN (Persero)	211,016	400,599	704,054	43%	PT PLN (Persero)
PT Bukit Asam (Persero) (BA)	63,144	0	0		PT Bukit Asam (Persero) (BA)
PT Indonesia Power (IP)	0	122,552	297,500	59%	PT Indonesia Power (IP)
PT Sumber Segara Primadaya (S2P)	44,946	59,061	65,047	9%	PT Sumber Segara Primadaya (S2P)
PT PLN Batubara (PLN BB)	16,826	3,657	8,034	54%	PT PLN Batubara (PLN BB)
PT PLN (Persero) Tanjung Jati B	161,393	166,643	165,088	-1%	PT PLN (Persero) Tanjung Jati B
Total	497,325	752,513	1,239,723	39%	Total

ANALISIS POSISI KEUANGAN

Analisis posisi keuangan perusahaan merupakan bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas yang membiayai perusahaan. BAg mampu meningkatkan kinerja perusahaan seiring dengan pertumbuhan listrik nasional. Aset BAg 2014 meningkat sebesar 31.28%, liabilitas juga meningkat sebesar 24.68%, dan ekuitas juga meningkat sebesar 112.55% dibandingkan tahun 2013.

ANALYSIS OF FINANCIAL POSITION

Analysis of the financial position of the company is part of the financial statements showing the position of assets, liabilities, and equity financing the company. BAg is able to improve the company's performance in line with the growth of national power. BAg assets in 2014 increased by 31.28%, liabilities also increased by 24.68%, and equity also increased by 112.55% compared to the year 2013.

dalam jutaan rupiah					in million rupiah
URAIAN	2012	2013*	2014*	%	DESCRIPTION
LAPORAN POSISI KEUANGAN					STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Aset					Assets
Aset Lancar	224,532	422,565	780,833	46%	Current Assets
Aset Tidak Lancar	444,929	657,542	688,090	4%	Non Current Assets
Jumlah Aset	669,461	1,080,107	1,468,923	26%	Total Assets
Liabilitas					Liability
Liabilitas Jangka Pendek	250,277	424,275	481,646	12%	Current Liability
Liabilitas Jangka Panjang	436,641	660,190	877,048	25%	Non Current Liability
Jumlah Liabilitas	686,918	1,084,465	1,358,694	20%	Total Liability
Ekuitas					Equity
Modal ditempatkan dan disetor penuh	21,674	21,674	21,674	0%	Working Capital
Dana Talangan	33,406	33,406	33,406	0%	Bailouts
Surplus (Defisit)	-72,537	-59,438	55,149	208%	Surplus (Deficit)
Jumlah Ekuitas	-17,457	-4,358	110,229	104%	Total Equity

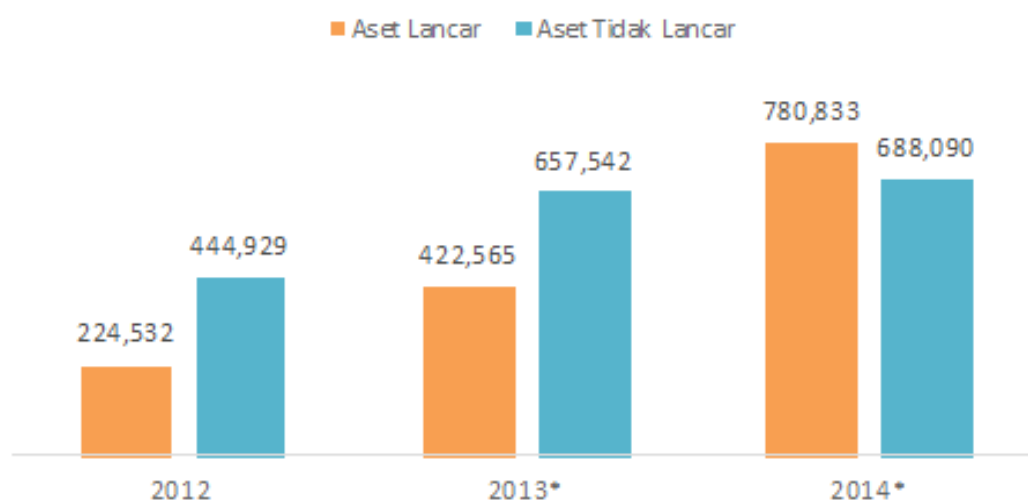
'ASET

Aset BAg terdiri dari Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar. BAg membukukan aset tahun 2014 sebesar Rp 1,468,923 juta meningkat 26.47% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 1,080,107 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh aset lancar yang meningkat sebesar 45.88% dibandingkan tahun 2013.

'ASSET

BAg assets consist of Current Assets and Non-Current Assets. in 2014 BAg recorded assets of Rp 1,468,923 million increased by 26.47% compared to the year 2013 amounting to Rp 1,080,107 million. The increase was primarily due to the current assets increased by 45.88% compared to 2013.

Pertumbuhan Aset



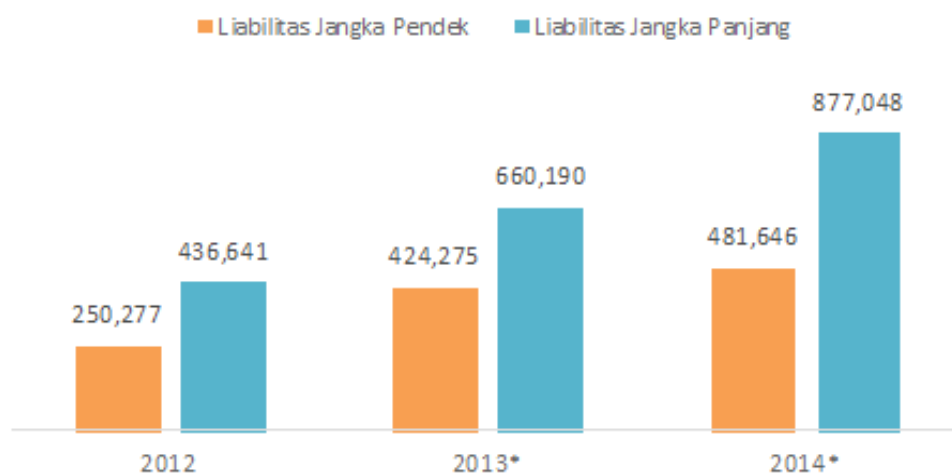
LIABILITAS

Liabilitas perusahaan terdiri dari Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. BAg tahun 2014 membukukan liabilitas sebesar Rp 1,358,694 juta meningkat sebesar 20.18% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 1,084,465 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya liabilitas jangka panjang sebesar 24.73% dibandingkan tahun 2013.

LIABILITIES

Liability company consists of Short-Term liabilities and Long-Term Liabilities. BAg 2014 recorded a liability of Rp 1,358,694 million increased by 20.18% compared to the year 2013 amounting to Rp 1,084,465 million. The increase was caused by increasing long-term liabilities amounted of 24.73% compared to the year 2013.

Pertumbuhan Liabilitas



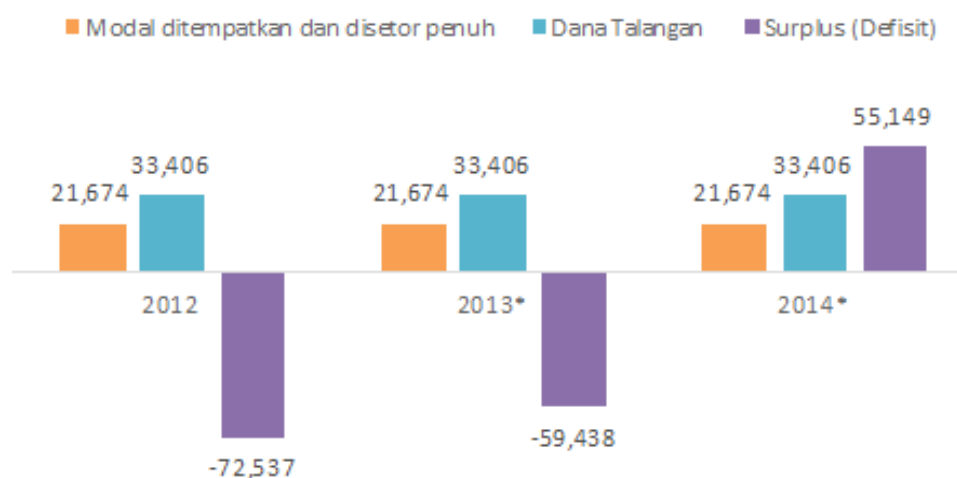
EKUITAS

Tahun 2014 BAg mencatat ekuitas sebesar Rp 110,229 juta meningkat 103.95% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp -4,358 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh surplus saldo laba sebesar 207.78% dibandingkan tahun 2013.

EQUITY

2014 BAg recorded equity of Rp 110.229 million increased by 103.95% compared to the year 2013 amounted to USD -4.358 million. The increase was caused by a surplus of retained earnings by 207.78% compared to the year 2013.

Pertumbuhan Ekuitas

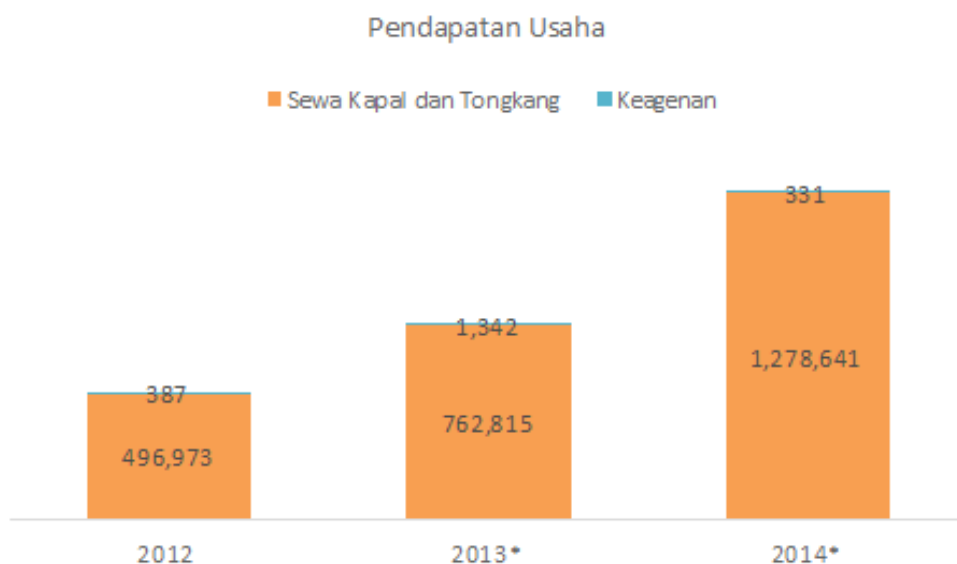


PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha perusahaan terdiri jasa angkutan laut menggunakan kapal dan tongkang serta jasa keagenan. BAg tahun 2014 berhasil mencatat pendapatan usaha sebesar Rp 1,278,972 juta meningkat 40.25% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp 764,157 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan yang diperoleh dari sewa kapal dan tongkang sebesar Rp 1,278,641 juta meningkat 40.34% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 762.815 miliar.

OPERATING REVENUES

The revenue of the company composed marine transportation services using ships and barges as well as agency services. BAg 2014 has recorded revenue of Rp 1,278,972 million increased by 40.25% compared to the year 2013 amounting to Rp 764.157 million. This increase is due to the increasing number of income derived from the rental of ships and barges Rp 1,278,641 million increased by 40.34% compared to the year 2013 amounting to Rp 762 815 billion.



BEBAN USAHA

Tahun 2014 BAg mencatat beban usaha sebesar Rp 1,080,417 juta rupiah meningkat 40.17% dari tahun 2013 sebesar Rp 640,527 miliar. Peningkatan beban usaha ini disebabkan karena adanya beban bongkar muat yang ditanggung pada tahun 2014.

OPERATING EXPENSES

2014 BAg recorded operating expenses of Rp 1,080,417 million increased by 40.17% from 2013 ammounting of Rp 640.527 billion. The increase in operating expenses is due to the unloading burden borne in 2014.

URAIAN	2012	2013*	2014*	%	DESCRIPTION
Beban Usaha					<u>Operating Expenses</u>
Sewa Kapal	353,308	511,681	874,662	41.50%	Vessel rent
Bahan bakar dan pelumas	19,742	46,523	87,193	46.64%	Fuel and oil
Penyusutan	20,879	37,304	52,644	29.14%	Depreciation
Manajemen perkapalan	9,172	16,719	18,318	8.73%	Ship Management
Perlengkapan dan peralatan	6,049	8,116	14,164	42.70%	
Bongkar muat	0	0	5,268	100.00%	loading and unloading
Lain-lain	11,872	20,184	28,168	28.34%	Others
Jumlah Beban Usaha	421,022	640,527	1,080,417	40.71%	Total Operating Expenses

LABA RUGI KOMPREHENSIF

Pencapaian laba tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif pada tahun 2014 sebesar Rp 114,587 juta meningkat 104.14% dibandingkan tahun 2013 rugi sebesar Rp 4,749 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba (rugi) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan sebesar 255.70%.

COMPREHENSIVE PROFIT AND LOSS

The achievement of current year profit and total comprehensive income in 2014 was Rp 114.587 million increased by 104.14% compared to the year 2013 a loss of USD 4.749 million. The increase was primarily due to the increase in net income (loss) for the year from discontinued operations amounted of 255.70%.

URAIAN	2012	2013*	2014*	%	DESCRIPTION
Pendapatan usaha	498,541	764,157	1,278,972	40.25%	Revenue
Beban usaha	-436,890	-640,527	-1,080,417	40.71%	Operating expenses
Laba usaha	61,651	123,630	198,555	37.74%	Gross profit
Beban umum dan administrasi	-15,831	-17,179	-21,897	21.55%	Administration expenses
Beban bunga	-46,339	-63,032	-66,104	4.65%	Interest expenses
Penghasilan (beban) lain-lain bersih	16,311	-23,754	11,406	308.26%	Non operating revenue
Laba sebelum pajak	15,793	19,665	121,960	83.88%	Income before tax
Beban Pajak	-10,650	-10,764	-16,140	33.31%	Tax expenses
Laba tahun berjalan dari operasi yang berjalan	5,143	8,901	105,820	91.59%	Profit from current operation
Laba (rugi) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	0	-13,650	8,767	255.70%	Current profit from suspended operation
Laba (rugi) tahun berjalan	5,143	-4,749	114,587	104.14%	Current profit
Pendapatan komprehensif lainnya	0	0	0		Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	5,143	-4,749	114,587	104.14%	Net comprehensive Income

PIUTANG

Piutang BAg terdiri dari piutang usaha dari pihak berelasi dan juga piutang lain-lain. Piutang usaha dari pihak berelasi diperoleh dari pelanggan yang menggunakan jasa angkutan laut BAg. Jumlah piutang BAg tahun 2014 adalah sebesar Rp 333,590 juta meningkat 33.13% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp 223,085 juta.

RECEIVABLES

BAg receivable consist of trade receivables from related parties and other receivables. Accounts receivable from related parties acquired from customers who use the services of BAg marine transport. BAg receivable balances in 2014 was Rp 333.590 million increased by 33.13% compared to the year 2013 amounting of Rp 223.085 million.

URAIAN	2012	2013*	2014*	%
Piutang Usaha				
PT PLN (Persero)	55,781	123,681	192,037	35.60%
PT PLN (Persero) Unit				
Pembangkitan Tanjung Jati B	20,490	40,260	40,311	0.13%
PT Indonesia Power		29,025	60,248	51.82%
PT Sumber Segara Primadaya	35,440	20,592	37,369	44.90%
PT PLN Batubara	3,590	3,100	0	
PT Bukit Asam (Persero)	27,241	0	2,636	100.00%
Sub Jumlah	142,542	216,658	332,601	34.86%
Piutang lain-lain				
PT PLN (Persero) Unit				
Pembangkitan Tanjung Jati B	0	6,427	989	-549.85%
PT PBM Adhiguna Putera	18,809	0	0	0
Jumlah	161,351	223,085	333,590	33.13%

STRUKTUR MODAL

Struktur modal BAg didominasi oleh liabilitas dibandingkan dengan ekuitas. Pada tahun 2014 aset yang dibiayai oleh liabilitas sebesar 92.50% lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebesar 100.40%. Adapun aset yang dibiayai oleh ekuitas tahun 2014 sebesar 7.50% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar -0.40%.

CAPITAL STRUCTURE

BAg capital structure is dominated by liabilities in comparison to equities. In 2014 the assets financed by liabilities amounting of 92.50% lower than in 2013 amounted of 100.40%. The assets financed by equity in 2014 amounted of 7.50% higher compared to the year 2013 amounted of -0.40%.

URAIAN Description	2012		2013*		2014*	
	%	Rp	%	Rp	%	Rp
Liabilitas Liabilities	102.61%	686,918	100.40%	1,084,465	92.50%	1,358,694
Ekuitas Equity	-2.61%	-17,457	-0.40%	-4,358	7.50%	110,229
Aset Assets	100.00%	669,461	100.00%	1,080,107	100.00%	1,468,923

INVESTASI BARANG MODAL

Sampai dengan tahun 2014 BAg telah melakukan investasi barang modal sebagai berikut :

INVESTMENT CAPITAL GOODS

Until 2014 BAg has invested capital as follows:

No	Jenis (type)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	Kebijakan Belanja Modal BAg Tahun 2012-2014
1	KM Sartika Baruna	121,469			Tujuan investasi : - melaksanakan pemenuhan pekerjaan jasa angkutan batubara dari pelabuhan Tarahan (BA) ke PLTU Suralaya (IP) - mengoptimalkan kinerja kapal guna pemenuhan jasa angkutan batubara untuk IP Mata uang yang digunakan : Rupiah
	Docking		5,999		
2	Tb Srikandi Baruna 2401	15,570			Tujuan investasi : - melaksanakan pemenuhan pekerjaan jasa angkutan batubara untuk PLTU 10.000 MW tersebar milik PT PLN (Persero) - melaksanakan pemenuhan pekerjaan jasa angkutan batubara untuk PLTU 10.000 MW tersebar milik PT PLN (Persero) Mata uang yang digunakan : Rupiah
	Bg Baruna Power 3001	15,000			
3	Tb Srikandi Baruna 2402	17,570			Tujuan investasi : - melaksanakan pemenuhan pekerjaan jasa angkutan batubara untuk PLTU 10.000 MW tersebar milik PT PLN (Persero) - mengganti barge Baruna Power 3002 yang kandas di perairan PLTU Labuan dan mengoptimalkan kinerja Tb Srikandi Baruna 2402 guna pemenuhan pekerjaan jasa angkutan batubara untuk PLTU 10.000 MW tersebar milik PT PLN (Persero) Mata uang yang digunakan : Rupiah
	Bg Baruna Power 3301			20,450	
4	KM Intan Baruna		251,933		Tujuan investasi : - melaksanakan pemenuhan pekerjaan jasa angkutan batubara untuk PLTU 10.000 MW tersebar milik PT PLN (Persero) dengan metode transshipment - mengoptimalkan kinerja kapal guna pemenuhan jasa angkutan batubara untuk PLN Mata uang yang digunakan : Rupiah
	Grab			4,275	
Jumlah Belanja Modal		169,609	257,932	24,725	

PERJANJIAN TERKAIT BARANG MODAL

a. Pada tanggal 19 maret 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Indonesia Power untuk melaksanakan pekerjaan jasa pengangkutan batubara dari PT Bukit Asam (Persero) (BA) sampai dengan PLTU Suralaya (IP) sampai dengan tahun 2022 dengan rincian volume batubara per tahun sebanyak 5 juta Metrik Ton (MT).

b. Pada tanggal 10 september 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Sumber Segara Primadaya untuk menjalankan strategi pengamanan ketersediaan batubara, peningkatan efisiensi biaya produksi dan peningkatan citra profesional dalam menyelenggarakan pelayanan penyediaan tenaga listrik.

c. Pada tanggal 29 Agustus 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian jasa transportasi laut pengangkutan batubara dengan PT PLN (Persero) (PLN) untuk jangka waktu 10 tahun.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN BUKU DENGAN REALISASI TAHUN 2014

Pada tahun 2014 realisasi laba kotor mencapai Rp 194,71 miliar atau 286,08% dari RKAP sebesar Rp 155,78 miliar. Setelah dikurangi dengan beban usaha dan ditambah dengan pendapatan (beban) di luar usaha serta dikurangi beban pajak, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar Rp 92,696 miliar atau sebesar 341.01% dari RKAP sebesar Rp 27,18 miliar.

RELATED AGREEMENTS CAPITAL GOODS

a. On 19 March 2013, the Company signed an agreement with PT Indonesia Power to carry out service work hauling coal from PT Bukit Asam (Persero) (BA) up to Suralaya Power Plant (IP) until 2022 with details of the volume of coal per year by 5 million metric tons (MT).

b. On 10 September 2012, the Company signed an agreement with PT Sumber Segara Primadaya to implement the strategy securing the availability of coal, increased efficiency of production costs and improving the professional image in terms of delivery service of electricity supply.

c. On August 29, 2012, the Company signed agreement for marine coal transportation services with PT PLN (Persero) (PLN) for a period of 10 years.

COMPARISON BETWEEN TARGET BEGINNING WITH FISCAL YEAR 2014 ACTUAL

In 2014 realized gross profit reached Rp 194.71 billion, or 286.08% from RKAP amounted of Rp 155.78 billion. After deducting operating expenses and coupled with income (expense) outside business and reduced the tax burden, the company earned a net profit of Rp 92.696 billion or 341.01% from RKAP amounted of Rp 27.18 billion.

URAIAN	RKAP s/d 2014	Realisasi 2014	Perbandingan (%)
Pendapatan Usaha	1,023,406	1,278,971	124.97%
Beban Pokok Produksi	867,625	1,084,266	124.97%
Laba Kotor	155,781	194,705	124.99%
Beban Usaha :	22,956	31,171	135.79%
a. Beban SDM	6,999	11,485	164.09%
b. Beban Administrasi & Umum	15,957	19,686	123.37%
Laba (Rugi) Usaha	132,825	163,534	123.12%
Beban Bunga	100,270	66,104	65.93%
Pendapatan (Beban) diluar Usaha	6,889	11,406	165.57%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	39,444	108,836	275.93%
Pajak	12,261	16,140	131.64%
Laba Bersih	27,183	92,696	341.01%

PROSPEK USAHA

Tugas utama BAg sebagai anak perusahaan PLN adalah menyediakan jasa transportasi batubara dan gas dalam rangka mengamankan pasokan batubara dan gas untuk pembangkit milik PLN, Anak Perusahaan PLN dan Independent Power Producer (IPP). Agar tugas utama tersebut terlaksana dengan baik, BAg perlu meningkatkan kompetensi inti organisasi sehingga terwujud service excellent dan jaminan keandalan operasi. Penguatan kompetensi inti perusahaan membutuhkan dukungan SDM, sistem organisasi, sistem manajemen dan tata kelola, ICT (Information & Communication Technology) dan budaya kerja.

Untuk menunjang bisnis inti perusahaan dalam kegiatan jasa transportasi batubara dan gas, dimungkinkan pula dilakukan pengembangan dalam bisnis penunjang bisnis utama, yaitu :

1. Jetty Management
2. Ship Management

Wilayah kerja dan rute angkutan BAg saat ini meliputi pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Di masa mendatang, BAg akan mengembangkan rute angkutan ke wilayah timur Indonesia seiring dengan program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan keputusan RUPS pada tanggal 30 Juni 2015, perusahaan tidak menyertakan pembagian dividen kepada pemegang saham, sehingga tidak ada informasi terkait jumlah dividen, jumlah lembar saham, maupun laba per saham.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sampai dengan 31 Desember 2014, BAg bukan merupakan perusahaan go-public dan belum melakukan penawaran umum, sehingga tidak ada informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana tanggal persetujuan RUPS atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN

Sampai dengan 31 Desember 2014, BAg bukan merupakan perusahaan go-public dan belum melakukan penawaran umum, sehingga tidak ada informasi mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh karyawan dan manajemen.

BUSINESS PROSPECTS

The main task of BAg as a subsidiary of PLN is to provide coal and gas transportation services in order to secure the supply of coal and gas for power plants owned by PLN, the Subsidiary PLN and Independent Power Producer (IPP). So that the main task is performing well, BAg need to improve the core competence of the organization to realize excellent service and guarantee reliable operation. Strengthening the core competencies the company needs the support of human resources, organizational systems, management systems and governance, ICT (Information & Communication Technology) and work culture.

To support the company's core business activities of coal and gas transportation services, it is also possible to do business development in the main business support, namely:

1. Jetty Management
2. Ship Management

The working area and the current transport route of BAg covers Java, Kalimantan and Sumatra. In the future, BAg will develop a transportation route to the eastern region of Indonesia in line with government programs to meet the needs of national power.

DIVIDEND POLICY

Based on the decision of the GMS on June 30, 2015, the company did not include the distribution of dividends to shareholders, so there is no information regarding the amount of dividends, number of shares, and earnings per share.

REALIZATION OF FUNDING USED FROM PUBLIC OFFERING

Until 31 December 2014, the BAg is not the company went public and has not made a public offering, so there is no information on the total return fund, the planned use of funds, the details of the use of funds, fund balance date of approval by the GMS on the realization of the use of funds from the public offering.

EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM AND MANAGEMENT

Until 31 December 2014, the BAg is not the company went public and has not made a public offering, so there is no information on the number of shares held by employees and management.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI HUTANG/MODAL

a. Investasi

Investasi yang dilaksanakan BAg pada tahun 2014 adalah 2 set Tug & Barge 300 dan 330 Feet seharga Rp 38,559 juta yang dibangun oleh PT Galangan Mercusuar dan 1 unit Panamax (bukan baru) seharga Rp 261,438 juta. Panamax sendiri baru akan di-delivery pada awal tahun 2015. Namun selain investasi pada tahun 2014, ada tambahan Barge (bukan baru -Bg Baruna Power 3301) pengganti Barge 3002 yang kandas pada bulan Februari 2014 seharga Rp 6,680 juta. Total realisasi investasi pada tahun 2014 bernilai Rp 306,678 juta yaitu sebesar 32% dari target rencana investasi.

b. Ekspansi

Ekspansi adalah proses pengembangan usaha yang dapat dilakukan dengan beberapa langkah pembiayaan. Pada tahun 2014 BAg tidak terdapat aktivitas terkait ekspansi.

c. Divestasi

Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan Risalah RUPS tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengesahan RKAP BAg tahun 2014, Direksi perseroan mengarahkan perusahaan untuk memberikan kajian tentang pelepasan anak perusahaan BAg yaitu PT Adhiguna Putera (Adhira). Hal ini bertujuan agar BAg lebih fokus kepada bisnis utamanya yaitu sebagai pengaman pasokan batubara untuk PLTU tersebar milik PLN, Anak Perusahaan PLN dan IPP, sedangkan bisnis utama Adhira adalah jasa bongkar muat dan keagenan kapal.

d. Akuisisi

Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Sampai dengan 31 Desember 2014, BAg belum berencana untuk melakukan akuisisi.

e. Restrukturisasi Hutang / Modal

Sampai dengan 31 Desember 2014 tidak informasi terkait tentang restrukturisasi hutang/modal BAg.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam tahun berjalan, Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan semua Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru dan revisi serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Penerapan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi dapat mempengaruhi akuntansi untuk transaksi atau perjanjian masa depan.

MATERIAL INFORMATION CONCERNING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITIONS, AND RESTRUCTURING DEBT / EQUITY

a. Investment

Investments held by BAg in 2014 is 2 sets of Tug and Barge 300 and 330 Feet worth of Rp 38.559 million which was built by PT Galangan Mercusuar and 1 unit Panamax (not new) worth of Rp 261.438 million. Panamax itself will be delivery in early 2015. However, in addition to the investment in 2014, there are additional Barge (not new -Bg Baruna Power 3301) substitute Barge 3002 that foundered in February 2014 for Rp 6.680 million. Total realized investment in 2014 worth of Rp 306.678 million that is equal to 32% of the target investment plan.

b. Expansion

Expansion is the business development process that can be done with several financing steps. In 2014 there were no BAg-related activity expansion.

c. Divestment

Divestment is a reduction in some types of assets in the form of financial or in kind, may be referred to the sale of a business owned by the company. Based on the Minutes of the GMS on December 4, 2013 on the Ratification RKAP BAg 2014, Directors of the company directing the company to provide studies on disposal of BAg subsidiaries, namely PT Adhiguna Putera (Adhira). It is intended that the BAg is more focused on its core business as a safety supply of coal for power plants owned by PLN, PLN Subsidiary and IPP, while the main business of Adhira services unloading and shipping agency.

d. Acquisition

Acquisition is the purchase of a company by another company or by a group of investors. Until 31 December 2014, the BAg is not planning to make acquisitions.

e. Restructuring Debt / Capital

Up to December 31, 2014 no relevant information on the restructuring of the debt / equity of BAg.

ACCOUNTING POLICY

In the current year, the Company and its subsidiaries have applied all the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") new and revised and the Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") that are relevant to its operations and effective for accounting periods beginning on January 1, 2014. The application does not have a significant effect on the amounts reported in the consolidated financial statements but may affect the accounting for future transactions or agreements.

Standar baru dan revisi atas standar yang berlaku berikut telah diterbitkan dan bersifat wajib bagi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015:

- PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Akuntansi Pajak Penghasilan"
- PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama"
- PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain"
- PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar"
- ISAK No. 26 (Revisi 2014), "Penilaian Ulang Derivatif Melekat"

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar baru, termasuk revisi yang lain.

The new standards and revisions to existing standards have been published and the following is mandatory for the consolidated financial statements for periods beginning on or after January 1, 2015:

- *PSAK No. 1 (Revised 2013), "Statements Finance "*
- *PSAK No. 4 (Revised 2013), "Financial Statements Admitted "*
- *PSAK No. 15 (Revised 2013), "Investments in Entities Associations and Joint Ventures "*
- *PSAK No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits"*
- *PSAK No. 46 (Revised 2014), "Tax Accounting Income"*
- *PSAK No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets"*
- *PSAK No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation"*
- *PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement "*
- *PSAK No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures "*
- *PSAK No. 65, "Consolidated Financial Statements"*
- *PSAK No. 66, "Joint Arrangements"*
- *PSAK No. 67, "Disclosure of Interest In Other Entities "*
- *PSAK No. 68, "Fair Value Measurements"*
- *ISAK No. 26 (Revised 2014), "Reassessment Derivatives Inherent "*

At the time of issuance of the consolidated financial statements, the Company is still evaluating the possible impact of the adoption of these new standards, including the revision of the others.

1. ROADMAP GCG



PT Pelayaran Bahtera Adhiguna terus menerus untuk meningkatkan dan menyempurnakan tatakelola perusahaan sejalan dengan standar tata kelola perusahaan yang baik. Roadmap GCG Bahtera Adhiguna 2012-2020 menjadikan perusahaan dengan tatakelola yang baik dan berlandaskan azas-azas GCG yang persyaratkan. Saat ini Bahtera Adhiguna masih tahap membangun GCG dengan penguatan monitoring dan pemenuhan persyaratan GCG. Adapun kegiatan tersebut adalah :

- Menyempurnakan Laporan Tahunan secara berkelanjutan secara berkesinambungan sesuai dengan kriteria dan standar yang ditetapkan,
- Melaksanakan monitoring dan self assesment pelaksanaan GCG dengan GCG menjadi bagian dari KPI ditingkat korporat.
- Melakukan sosialisasi GCG terkait dengan : Code of Conduct dan Whistle Blowing System (WBS) kepada agen perubahan dari lintas divisi serta Collection Action dengan Penyedia Barang Jasa/vendor Perusahaan.

2. PEDOMAN GCG

Penerapan prinsip-prinsip tatakelola Perusahaan yang baik/ Good Corporate Governance GCG, tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pedoman GCG yang diterapkan secara konsisten dan aspek pengelolaan perusahaan sebagai standar landasan operasional sehingga nilai yang dimiliki Pemangku Kepentingan (Stakeholder) dapat didayagunakan serta ditingkatkan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan yang menguntungkan. Pedoman GCG Bahtera Adhiguna disusun sebagai acuan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan para pemangku kepentingan dalam berhubungan dengan Bahtera Adhiguna. Tujuan Pedoman GCG, yaitu :

- Mengoptimalkan nilai (Value) perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder dan mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan.

1. ROADMAP GCG

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna continuously to improve and enhance corporate governance in line with the standards of good corporate governance. Bahtera Adhiguna GCG Roadmap 2012-2020 is to make the company with good governance and is based on the principles of GCG requisite. Currently Bahtera Adhiguna still building GCG stage by strengthening monitoring and compliance with GCG requirements. The activities are:

- *Improving the Annual Report it continuing on an ongoing basis in accordance with the criteria and standards set,*
- *Implement monitoring and self assesment GCG with GCG implementation to be part of KPI corporate level.*
- *Conducting socialization GCG associated with: Code of Conduct and Whistle Blowing System (WBS) to agent of change across divisions and Collection Action by the Goods and Services Provider / vendor Company.*

2. GUIDELINES GCG

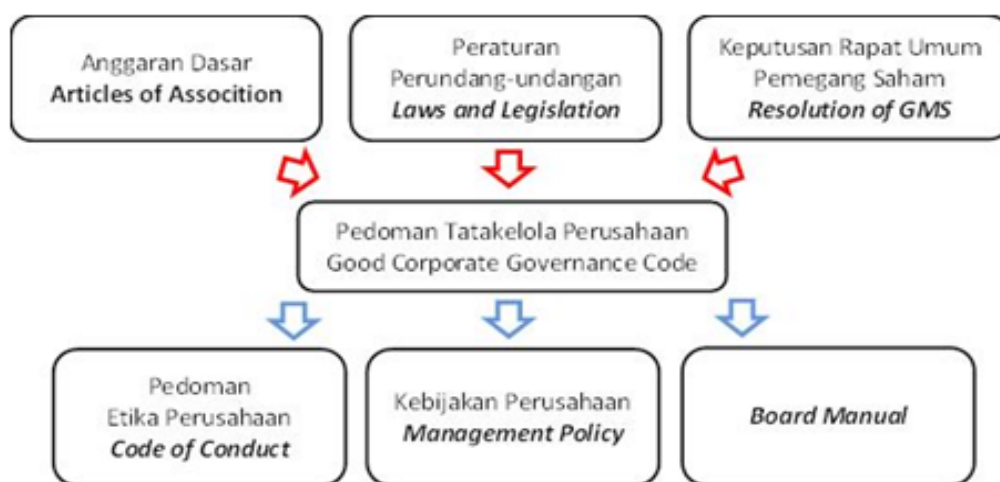
The application of the principles of good corporate governance / GCG, taking into account the provisions of the Articles of Association of Household and regulations in force, so that the company can survive and resilient in the face of increasingly fierce competition. GCG guidelines are applied consistently and management aspects of the company as a standard foundation so that the value of owned Operational Stakeholders (Stakeholder) can be utilized as well as improved optimized and produce a favorable pattern of relationships. Bahtera Adhiguna GCG guidelines drawn up by reference to the Shareholders, Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary, Internal Audit and stakeholders in dealing with the Bahtera Adhiguna. GCG Purposes Guidelines, namely:

- *Optimizing the value (Value) of the company for shareholders by taking into account the interests of stakeholders and to encourage the achievement of sustainability of the company to apply the principles of good corporate governance principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality.*

- Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada stakeholder.
 - Mendorong pengelolaan perusahaan lebih profesional, transparan dan efisien, serat memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.
 - Meningkatkan citra perusahaan bagi tercapainya daya saing secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional
 - Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya Perusahaan dan pengelolaan resiko usaha perusahaan dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudent), akuntabilitas dan bertanggung jawab dan sejalan prinsip GCG.
 - Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung sosial Perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama sekitar perusahaan.
 - Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan perusahaan dan perubahan lingkungan usaha menuju budaya perusahaan yang lebih baik.
- *Encourage company organ in making decisions and perform actions based on the high moral values and compliance with the provisions of the Articles of Association and the legislation in force and responsible to stakeholders.*
 - *Encouraging corporate management more professional, transparent and efficient, fully empower organ function and increase the independence of the company.*
 - *Improving the company's image to achieve competitiveness nationally and internationally thus increasing market confidence which could encourage the flow of investment in and growth of the national economy*
 - *Encourage and support the development, resource management and the Company's enterprise risk management efforts by the application of the precautionary principle (Prudent), Accountability and responsible and consistent with GCG.*
 - *Fostering the awareness and corporate social responsibility towards society and the environment, especially around the company.*
 - *Develop attitudes and behavior that conformed to the demands of companies and changes in the business environment towards better corporate culture.*

2.1. Tata Urut Kebijakan Perusahaan

Tata urutan kebijakan perusahaan, sebagai berikut :



2.1. Steps of Company Policy

Steps of corporate policy, as follows:

2.2. Pedoman Etika Perusahaan

Etika Bisnis Perusahaan dalam code of conduct adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi pegawai dalam interaksi dengan manajemen dan stakeholder. Penerapan Code of Conduct merupakan bagian terpenting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang sehat serta penguatan nilai dan budaya yang dimiliki perusahaan.

Bahtera Adhiguna telah memiliki Pedoman Etika Perusahaan sejak tahun 2013. Dokumen tersebut akan selalu ditinjau dan review mengikuti perkembangan perusahaan. Code of Conduct yang berlaku saat ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor A.3842/SP.101 /DIRUT-2013.

2.2. Corporate Ethics Guidelines

Companies in the Business Ethics code of conduct are moral values and norms which became a handbook for employees in interaction with management and stakeholders. Application of the Code of Conduct is an important part in the implementation of healthy corporate governance and strengthening the values and culture of the company.

Bahtera Adhiguna has had a Code of Ethics of the Company since 2013. The document will be reviewed and the review follows the development of the company. Code of Conduct which applies currently set by Board of Directors Decree No. A.3842 / SP.101 / CEO of-2013.

Aspek yang diatur dalam Code of Conduct antara lain:

- Kepatuhan terhadap peraturan Perundangan - undangan
- Pemberian dan penerimaan hadiah, suap dan lainnya
- Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja
- Pemberian kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mendapatkan pekerjaan, promosi dan pemberhentian kerja.
- Standar etika dalam berhubungan dengan stakeholders
- Standar etika jajaran Manajemen dengan pegawai
- Hak Atas kekayaan Intelektual

2.3. Evaluasi Penerapan GCG

Bahtera Adhiguna secara berkala melakukan evaluasi penerapan GCG melalui kegiatan assessment dan review GCG. Untuk tahun 2013, evaluasi penerapan GCG dilakukan dengan metode Self Assessment yang mengacu pada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Hasil skor Self Assessment GCG tersebut mendapatkan predikat "Cukup Baik".

Adapun Parameter Self-assessment GCG mencakup 6 (enam) aspek utama yaitu (1) Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan; (2) Pemegang Saham dan RUPS; (3) Dewan Komisaris; (4) Direksi; (5) Pengungkapan Informasi; dan (6) Aspek Lain. Secara overall hasil assessment Bahtera Adhiguna masih tahap predikat "Cukup Baik", sehingga perlu perbaikan dan penguatan monitoring GCG dari waktu ke waktu

Pelaksanaan GCG menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) dalam Kontrak Manajemen Perusahaan, yaitu pada bagian Perspektif Leadership dalam bentuk pencapaian skor penilaian GCG. Tingkat pencapaian KPI Skor GCG mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

KEGIATAN	2011	2012	2013	2014
GCG	43	47,22	69,36	61,7

2.4. Laporan Harta Kekayaan Pejabat

Untuk mendorong pengelolaan perusahaan yang sehat, bersih dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, BAg menerapkan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang berlaku untuk Direksi, Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komsasris dan satu tingkat dibawah Direksi sesuai dengan instruksi pemegang saham yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) perihal Penetapan Jabatan Struktural yang di Wajibkan Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN (Persero). Penyampaian LHKPN tahun 2014 baru di ditingkat Direktur Utama yang kemudian disampaikan langsung oleh yang bersangkutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk selanjutnya dipublikasikan di Perusahaan sesuai dengan format dari KPK.

Aspects set out in the Code of Conduct are:

- Compliance with rules and regulations
- Giving and receiving gifts, bribes and other
- Concern for the health and safety work
- The provision of equal opportunities to employees to get a job, promotion and layoffs.
- Ethical standards in dealing with stakeholders
- Standard ethics board of management with employees
- Intellectual Property Rights

2.3. Evaluation of Implementation of GCG

Bahtera Adhiguna regularly evaluate the implementation of GCG through assessment and review of GCG. For the year 2013, the evaluation of the implementation of GCG Self Assessment carried out by the method which refers to the Decree of the Secretary of State-Owned Enterprises No. SK16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012. The results of the GCG Self Assessment scores awarded "Good Enough".

The GCG parameters Self-assessment includes 6 (six) main aspects: (1) Commitment to Implementation of Good Corporate Governance Sustainable; (2) Shareholders and General Meeting of Shareholders; (3) The Board of Commissioners; (4) Board of Directors; (5) Disclosure; and (6) Other Aspects. In the overall assessment results Bahtera Adhiguna still under the title of "Good Enough", so that it needs necessary repairs and strengthening monitoring GCG from time to time

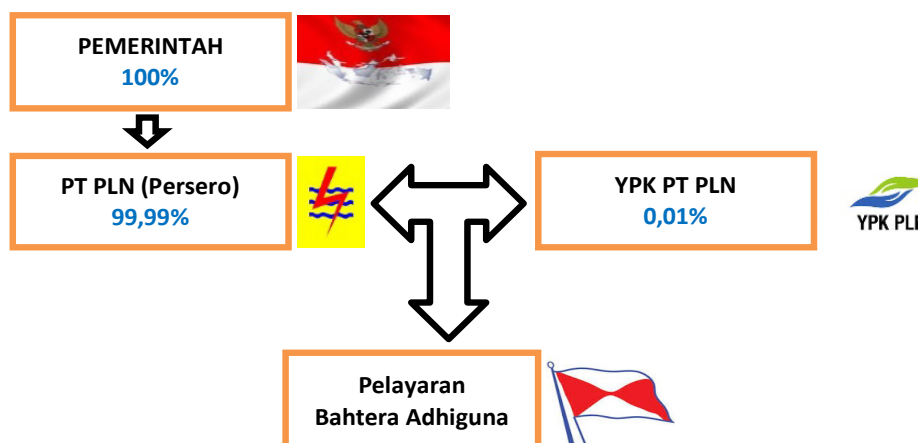
GCG implementation to be one of the Key Performance Indicator (KPI) of the Contract Management Company, which is on the Leadership Perspective in the form of achievement of GCG assessment scores. GCG achievement KPI score levels have increased, as shown in the table below:

2.4. Officials Wealth Report

To encourage the management of healthy company, clean and in accordance with the principles of GCG, BAg applying submission of Wealth Report State Officials (LHKPN) that apply to the Board of Directors, Board of Commissioners, the organ supporting the Board of Commissioners and one level below the Board of Directors in accordance with the instructions of shareholders issued by PT PLN (Persero) concerning Resolution structural positions that Require Delivering State Officials Wealth Report (LHKPN) around PT PLN (Persero). The report delivered by LHKPN in 2014 has only in President Director level then delivered directly by the person concerned to the Corruption Eradication Commission (KPK), to subsequently be published in the Company in accordance with the format from KPK.

2.5. Pemegang Saham dan Pengendali Utama

Pemegang Saham BAg adalah PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sejumlah 21.674 (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat) dan YPK PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sejumlah 1 (satu). PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham utama dan pengendali diwakili oleh Direktur Utama PT PLN (Persero), yang secara teknis berada di bawah Sekretaris Perusahaan cq. Fungsi Hubungan Investor. Adapun skema pemegang saham utama dan pengendali BAg adalah sebagai berikut:



2.5. Shareholders and Master Control

The BAg's shareholders are PT PLN (Persero) with a stake of some 21.674 (twenty-one thousand six hundred and seventy-four) and YPK PT PLN (Persero) with a stake equal to 1 (one). PT PLN (Persero) is a major shareholder and controller are represented by the Director of PT PLN (Persero), which technically is under the Corporate Secretary cq. Investor Relations function. The scheme of the main shareholder and controller BAg is as follows:

2.6. Program Pengendalian Gratifikasi

Bahtera Adhiguna dalam melaksanakan penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan, maka perusahaan mengutamakan bisnis yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, bahwa untuk mewujudkan bisnis perusahaan yang amanah, transparan dan akuntabel maka perlu penanganan gratifikasi.

Dalam rangka menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Penanganan Gratifikasi selaras dengan Pedoman Tatakelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku serta nilai –nilai yang berlaku perusahaan, yang ditetapkan Surat Keputusan Direksi nomor A.4151/SP.101/DIRUT-2013.

Perusahaan dalam menyusun Pedoman dilandasi oleh sikap berikut :

- Senantiasa menghindari gratifikasi, korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN) serta mengutamakan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, maupun golongan.
- Selalu berusaha menerapkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta keadilan mengelola perusahaan.
- Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- Senantiasa menjalankan kegiatan perusahaan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku yang berlaku di perusahaan.

2.6. Gratification Control Program

Bahtera Adhiguna in carrying out the implementation of GCG consistently and continuously, the company's business priority that is free from corruption, collusion and nepotism, that for the company's business creating trustful, transparent and accountable it is necessary handling gratuities.

In order to handle these, it is then drafted a Guidelines for Handling Gratification aligned with Corporate Governance Guidelines and Code of Conduct as well as the value of the applicable company-value, which is set by Directors Decree number A.4151 / SP.101 / CEO of-2013.

Company in compiling guidelines based by the following manners:

- Always avoid gratification, corruption, collusion, and nepotism (KKN) and prioritize the company's interests above personal interests, family, group, or class.
- Always try to apply the principles of transparency, independence, accountability, responsibility as well as manage the company's equity.
- Always put on legal compliance and Regulation of the legislation applicable and heed the norms prevailing in society.
- Always run the activities of the company based on Code of Corporate Governance and Code of Conduct applicable in the company.

2.7. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistleblower System

Bahtera Adhiguna menyusun Sistem Pelaporan Pelanggaran yang merupakan petunjuk tentang tatacara melakukan pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (Whistleblower System) agar terciptanya pengelolaan perusahaan secara profesional sehingga dapat menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab. Pedoman ini ditetapkan dengan keputusan Direksi Nomor A.3698/SP.101/DIRUT-2013.

Maksud dan tujuan Pedoman ini, yaitu :

- Tersedianya mekanisme deteksi sejak dini
- Tersedia cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus menanganinya secara aman.
- Tersedianya kesempatan menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas ke eksternal/publik.
- Timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran.

Lingkup pengaduan/penyingkapan yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan perusahaan, meliputi :

- Penyimpangan peraturan perundang-undangan
- Penyalahgunaan jabatan
- Pemerasan
- Curang
- Benturan kepentingan
- Gratifikasi

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/Penyingkapan, maka pelapor dianjurkan memberikan informasi mengenai data diri dan yang bersangkutan dirahasiakan identitasnya.

Agar Pedoman ini dapat di ketahui oleh pegawai/tenaga kerja di Bahtera Adhiguna maka dilakukan sosialisasi melalui spanduk, banner dan nota dinas. Sedangkan untuk pihak ketiga (penyedia jasa, instansi/lembaga pemerintahan, dsb.) melalui membuat database vendor, collection action dan penandatanganan Deklarasi bersama.

Hasil Penanganan Pengaduan Pelanggaran ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada oleh Komisi Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang susunan keanggotannya adalah Manajer SDM dan Umum (Sebagai Ketua), Bagian Hukum dan Humas (Anggota), dan Bagian SDM dan Umum (Anggota).

2.7. Violation Reporting System Policy/ Whistleblower System

Bahtera Adhiguna arrange Abuse Reporting System which is an indication of the procedure for reporting on alleged irregularities in the company (Whistleblower System) for the creation of a professional management company so as to create a work situation that is clean and responsible. These guidelines set out by the Board's decree No. A.3698 / SP.101 / DIRUT-2013.

The intent and purpose of these guidelines, namely:

- *The availability of early detection mechanism*
- *There are ways of delivering critical information for companies to parties that should handle it safely.*
- *Providing the opportunity to handle the problem breaches internally first, before extends to the external / public.*
- *Arise reluctance to commit an offense.*

The scope of the complaint / disclosure will be followed by the Reporting System Violations are actions that could hurt the company, include:

- *Deviations legislation*
- *Abuse of position*
- *Extortion*
- *Cheating*
- *Conflicts of interest*
- *Gratification*

To expedite and follow-up and ease the process of Complaints / Revelation, the rapporteur recommended to provide information about the relevant personal data and make it classified.

So that guidelines can be known by employees / workers in Bahtera Adhiguna then be disseminated through banners, banner and official memo. As for third parties (service providers, institutions / agencies of government, etc.) By creating a vendor database, collection action and the signing of the joint declaration.

Violation Complaint Handling actionable results based on the facts and the evidence available to the Commission Report Handling Violations which membership composition is the HR Manager and General (as Chair), Legal and Public Relations (Member), and Human Resources and General Affairs Section (Member).

3. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, menetapkan alokasi penggunaan laba dan menunjuk akuntan publik serta menetapkan jumlah dan jenis kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS harus disiapkan dengan sebaik-baiknya dan Pemegang Saham harus mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi dan penjelasan yang lengkap antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Panggilan RUPS harus mencakup informasi secara lengkap dan akurat mengenai mata acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS;
3. Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS sehingga memungkinkan bagi Pemegang Saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Jika bahan tersebut belum tersedia saat pemanggilan RUPS, maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan;
4. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung;
5. Risalah RUPS harus tersedia di kantor Perusahaan, dan Perusahaan menyediakan fasilitas agar Pemegang Saham dapat membaca risalah tersebut

Adapun jenis RUPS di dalam Perusahaan adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan tiap-tiap tahun yang meliputi:
 - a. RUPST mengenai laporan tahunan dan perhitungan tahunan; dan
 - b. RUPST mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

3. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

General Meeting of Shareholders (GMS) which does not have the authority granted to the Board of Directors and Board of Commissioners. GMS has the authority to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors, evaluates the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors, ratify the amendment, approved the annual report, establishes the allocation of profits and appoint a public accountant and to determine the amount and type of compensation for the Board of Commissioners and Board of Directors.

GMS must be held in accordance with the interests of the Company and the provisions of Articles of Association and the legislation in force. GMS should be prepared as best as possible and the Shareholder must get their rights to obtain information and a complete explanation among others, the following matters:

1. *Shareholders are given the opportunity to propose the agenda of the GMS in accordance with Statutes and regulations applicable;*
2. *Calling GMS should include information complete and accurate information on the agenda, date, time and place of the GMS;*
3. *Materials on any specified agenda of the GMS is available at the Company's office from the date of the GMS call allowing for shareholders to participate actively in GMS and responsible for voting. If the material is not available yet at GMS, then the material must be provided before the GMS is held;*
4. *A description of other matters relating with the agenda of the GMS can be given before or when GMS take place;*
5. *Minutes of the GMS shall be available at the Company's office, and the company provides facilities that Shareholder can read the minutes;*

The type of GMS in the Company are:

1. *The General Meeting of Shareholders (GMS) which is held each year which includes:*
 - a. *GMS concerning annual reports and annual calculations; and*
 - b. *GMS concerning the Work Plan and Company's budget (RKAP).*

4. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan jika dianggap perlu oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham.

Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS;
2. Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan Direksi, perlu dipertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG ;
3. Dalam menetapkan auditor eksternal harus mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris atas usul Komite Audit;
4. Keputusan RUPS harus diambil dengan memperhatikan kepentingan wajar Pemegang Saham dengan mendasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
5. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen harus memperhatikan kondisi kesehatan keuangan Perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan dengan berpedoman pada butir a, b dan c di atas sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pada RUPS tahun 2014 telah dilakukan pemberitahuan dan undangan bagi pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2014, Pelayaran Bahtera Adhiguna telah menerbitkan 5 (lima) Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler. Adapun selama tahun 2014 tidak ada penyelenggaraan RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

4. The General Meeting of Shareholders (EGMS)

Namely the General Meeting of Shareholders held at any time based on the needs if deemed necessary by the Board of Directors or Board of Commissioners and or shareholders.

GMS decision-making is done properly and transparently with attention to the things necessary to safeguard the interests of the Company in the long term, including but not limited to:

1. *Members of the Board of Commissioners and Board of Directors appointed on the GMS;*
2. *In taking the decision to accept or rejected the reports of the Board of Commissioners and Board of Directors, to consider the quality of reports related to GCG;*
3. *In setting the external auditor should considering the opinion of the Board of Commissioners on the proposal of the Audit Committee;*
4. *Decisions shall be taken by the General Meeting of Shareholders considering the interest of fair Shareholder by basing on provisions Statutes and regulations applicable;*
5. *In taking the decision to grant the bonus, gratification and dividends must consider the condition of the company's financial health.*

General Meeting of Shareholders is the responsibility of the Board of Directors. To that end, the Board of Directors shall prepare and organize GMS well and based on the points a, b and c above in accordance with the Articles of Association and the applicable laws and regulations.

At the 2014 GMS has made notification and invitation for shareholders according to applicable regulations. In 2014, Pelayaran Bahtera Adhiguna has issued 5 (five) Decision of the Shareholders In the Circular. As for 2014, there was no Extraordinary General Meeting (EGM).

Pada tahun 2014 Pelayaran Bahtera Adhiguna telah mengeluarkan Keputusan RUPS secara Sirkuler sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

In 2014 Pelayaran Bahtera Adhiguna has issued Circular Decisions by the GMS as set out in the Articles of Association, can be seen in the following table:

NO.	ARAHAN RUP S	TINDAK LANJUT	PERSentase
1	Direksi Perseroan diminta untuk menyelesaikan Integrasi ERP paling lambat Desember 2014	Sistem Informasi keuangan online dan GL Magic telah diimplementasikan	100%
2	Direksi Perseroan diminta membuat kajian divestasi AP dan pengembangan Jetty Management	Divestasi AP sedang dalam proses oleh PT Bahana Securitas, sedangkan kajian Jetty management telah selesai oleh PT STARCO	75%
3	Direksi perseroan diminta mendukung pasokan batubara bagi PLTU tersebar PT PLN (Persero) dalam hal pasokan dan pengangkutan batubara	Sudah dilaksanakan	100%
4	Direksi Perseroan diminta untuk melaksanakan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemegang Saham Mayoritas terkait dengan Sinergi Anak Perusahaan PT PLN	Sudah dilaksanakan sinergi dengan IP, PJB, dan proses sinergi dengan PLN Batubara	100%
5	Direksi Perseroan diminta menyampaikan KKO, KKF dan Kajian Risiko terkait proyek yang didanai oleh SHL	Sudah dilaksanakan	100%
6	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkewajiban memenuhi Covenant dalam Indenture of guaranteed note	Sudah dilaksanakan	100%
7	Pemberian persetujuan Pengawasan Intern perusahaan dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern PT PLN (Persero) yang bertugas melaksanakan pemeriksaan Intern keuangan dan pemeriksaan operasional Perseroan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada perseroan serta memberikan saran-saran perbaikannya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.	Sudah dilaksanakan	100%
8	Direksi Perseroan diminta untuk meningkatkan peran terkait efisiensi waktu muat dan bongkar batubara dengan memberi masukan dan laporan atas kinerja operasi kapal kepada PLN agar berdampak signifikan terhadap kinerja perseroan	Sudah dilaksanakan	100%
9	Direksi Perseroan diminta untuk menyusun skala prioritas terhadap program investasi perseroan	Sudah dilaksanakan, tertuang dalam RKAP 2014	100%
10	Direksi perseroan diminta untuk meratifikasi dan melaksanakan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0060/K/DiR/2014 tentang Pedoman PLN Bersih dan Peraturan Direksi No. 0054/K/DiR/2014 tentang pedoman Transaksi keuangan Antara PLN dengan mitra kerja guna mendukung PLN Bersih	Pedoman PLN Bersih sudah dibuat dan akan mulai diimplementasikan pada I.	100%

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KOMITE TAHUN 2014

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 25 Juni 2009, pemegang saham menetapkan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kewajaran sebagai pengelola aset dan revenue sekelas Pelayaran Bahtera Adhiguna
- Meningkatnya tuntutan dan tanggung jawab pengurusan perusahaan
- Meningkatnya kebutuhan Cost of Living Adjustment (COLA)

Keputusan tersebut menetapkan dasar gaji bagi Direktur Utama, yang menjadi dasar komposisi gaji Direktur, Komisaris Utama, anggota Dewan Komisaris dan honorarium Sekretaris Dewan Komisaris secara berturut-turut sebesar 90%, 40%, 36% dan 15%. Komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi:

- Gaji/honorarium
- Tunjangan tetap bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris,

PROCEDURE FOR DETERMINATION OF REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, DIRECTORS AND COMMITTEE 2014

REMUNERATION POLICY BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Remuneration policy and other facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors refers to the decision of shareholders as set out in the General Meeting of Shareholders.

Based on Decision of Shareholders in the Circular dated June 25, 2009, shareholders set the adjustment of the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors with the following considerations:

- Fairness as an asset manager and revenue equal Pelayaran Bahtera Adhiguna*
- The increasing demands and responsibilities of company's management*
- The increasing need for Cost of Living Adjustment (COLA)*

The decision sets the basic salary for the Managing Director, the composition of the base salary of the Director, Chief Commissioner, the Commissioners and the Secretary of the Board of Commissioners honorarium respectively by 90%, 40%, 36% and 15%. Components of the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors includes:

- Salary / honorarium*
- Fixed allowances for Directors, Board of Commissioners and Secretary of the Board of Commissioners,*

- c. Rumah jabatan/tunjangan rumah bagi anggota Direksi,
- d. Kendaraan jabatan bagi anggota Direksi, tunjangan transport bagi Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris
- e. Asuransi tanggung jawab hukum dan officer bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris dan
- f. Jaminan sosial tenaga kerja.

Berikut mekanisme pemberian kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penelaahan atas kompensasi yang diberikan di pasar untuk pekerjaan yang bersangkutan pada perusahaan lainnya dengan bidang usaha dan status yang sama.
2. Dengan memperhitungkan kinerja usaha perusahaan dan kontribusi masing-masing individu, kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyiapkan rekomendasi
3. Rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan pembahasan lanjutan dan persetujuan
4. Usulan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan kepada pemegang saham untuk pembahasan dan persetujuan dalam RUPS
5. RUPS memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris

REMUNERASI DIREKSI

Jenis remunerasi yang diterima oleh Direksi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- c. *The home office / home allowance for members of the Board of Directors,*
- d. *Vehicles of office for members of the Board of Directors, allowances Transport for BOC and Secretary of the Board Commissioner*
- e. *Legal liability insurance for its directors and officers, Board of Commissioners and the Secretary of the Board of Commissioners and*
- f. *Social Security.*

These are the compensation mechanism for the Board of Commissioners and Board of Directors:

1. *The Nomination and Remuneration Committee conducted a review of the compensation given to the job market is concerned in other companies with business areas and equal status.*
2. *Taking into account the company's operating performance and the contribution of each individual, and then be discussed by the Remuneration and Nomination Committee to prepare a recommendation*
3. *Recommendation submitted to the Board for further discussion and approval performed*
4. *The proposed remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors submitted to the shareholders for discussion and approval in the GMS*
5. *GMS approves and sets remuneration for the Board of Commissioners*

REMUNERATION OF DIRECTORS

The type of remuneration received by the Board of Directors in 2014 are as follows:

Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Jumlah Anggota Direksi Total The Board of Directors Member			Jumlah Remunerasi Direksi Total The Board of Directors Remuneration		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Gaji Salary	2	2	2	912.000.000	1.020.000.000	1.299.600.000
Tantiem yang dibayarkan tahun Taintiem paid in the year of	2	2	2	679.440.000	456.450.000	433.200.000
Tunjangan Allowance	2	2	2	151.200.000	151.200.000	519.840.000
Jumlah Total	2	2	2	1.742.640.000	1.627.650.000	2.252.640.000

Rincian remunerasi yang diperoleh Direksi selama tahun 2014 adalah:

Details of the remuneration of the Directors earned during 2014 are:

Direksi Board of Directors	Honor per Bulan Salary per Month	Tunjangan Allowance	Total per Bulan Total per Month	Honor per Tahun Salary per Tahun	THR Religious Holiday Benefits	Tantiem Taintiem	Penghasilan per Tahun Income per Year
DIRUT	Rp 57.000.000	Rp 22.800.000	Rp 79.800.000	Rp 957.600.000	Rp 57.000.000	Rp 263.130.000	Rp 1.277.730.000
DIROP	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
DIRKEU	Rp 51.300.000	Rp 20.520.000	Rp 71.820.000	Rp 861.840.000	Rp 51.300.000	Rp 193.320.000	Rp 1.106.460.000

DEWAN KOMISARIS

4.1. Kebijakan Persyaratan Komposisi Komisaris

Dalam menetapkan komposisi anggota Dewan Komisaris, Perseroan memiliki kebijakan untuk mempertimbangkan latar belakang pengalaman dan kompetensi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Sedangkan persyaratan kepatutan Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Memiliki integritas dan dedikasi;
2. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
3. Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
4. Tidak pernah di hukum karena tindak pidana kejahatan;
5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Prosedur Penetapan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Apabila diangkat lebih dari satu orang, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Susunan, persyaratan, nominasi, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham yang sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk satu kali masa jabatan

4.2. Uji Kemampuan dan Kepatutan

Semua anggota Dewan Komisaris BAg memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selama tahun 2014 telah terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, dengan adanya pengunduran diri Sdr. Binarto Bekt Mahardjana sebagai Komisaris Utama BAg dan digantikan oleh Sdr. Muhammad Ikb al Nur sebagai Pelaksana Tugas ("Plt") Komisaris Utama

Tabel status uji kemampuan dan kepatutan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Nama	Domisili	Fit & Proper Test
Muhammad Ikb al Nur	Jakarta	Lulus
Subagio Utomo	Jakarta	Lulus

Seluruh anggota Dewan Komisaris BAg telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Utama atau Pengendali..

BOARD OF COMMISSIONERS

4.1. Commissioner Composition Requirements Policy

In establishing the composition of the Board of Commissioners, the Company has a policy to consider the background experience and competence of each member of the Board of Commissioners.

While the requirements of propriety Board of Commissioners consists of:

1. *Have integrity and dedication;*
2. *Provide sufficient time to implement task;*
3. *Never violate regulations legislation;*
4. *Never in law as a criminal act;*
5. *Never declared bankrupt or otherwise which resulted in the company declared guilty bankrupt by court decision which has permanent legal force.*

Determination procedure BOC

Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS. The Board of Commissioners consists of one member or more. If appointed more than one person, then one of them can be appointed as President Commissioner. The structure, requirements, nomination, and appointment of the Board of Commissioners determined by the GMS in accordance with the Articles of Association and the legislation applied.

The term of office of Board of Commissioners set 5 (five) years without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders may at any time dismiss members of the Board of Commissioners. After the term of office ends, the Board of Commissioners may be reappointed by the General Meeting of Shareholders for one more term

4.2. Fit and Proper Test

All members of the Board of Commissioners BAg has integrity, competence, reputation and experience necessary to carry out the duties and responsibilities of each. During 2014 there has been a change in the composition of the Board of Commissioners, with the resignation of Mr. Binarto Bekt Mahardjana as President Commissioner of BAg and was replaced by Mr. Muhammad Ikb al Nur as Acting ("PLT") President Commissioner

Table status and proper test of the ability of the Board of Commissioners who served in 2014 were as follows:

Name	Domicile	Fit & Proper Test
Nur Muhammad Ikb al Nur	Jakarta	Passed
Subagio Utomo	Jakarta	Passed

All members of the Board of Commissioners of BAg has passed the test and Compliance Capabilities by PT PLN (Persero) as the majority shareholder or controlling ..

4.3 Pengangkatan dan Pemberhentian

Setelah melalui proses fit & proper test sesuai ketentuan yang berlaku, calon anggota Dewan Komisaris yang lulus fit & proper test diangkat dan ditetapkan sebagai Dewan Komisaris Perusahaan.

1. Adapun pemberhentian Dewan Komisaris dapat dilakukan apabila yang bersangkutan:
2. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
3. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Anggaran Dasar;
4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Indonesia Power dan/atau negara;
5. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Mengundurkan diri.

4.4 Komposisi dan Pembagian Tugas

Susunan Dewan Komisaris pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham BAg secara sirkuler tanggal 24 Februari 2012, susunan Dewan Komisaris adalah:

Komisaris Utama : Binarto Bakti Mahardjana
 Komisaris Independen : Subagio Utomo

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler tanggal 29 Agustus 2014, susunan Dewan Komisaris adalah:

Pelaksana (Plt) Komisaris Utama : Muhammad Ikbil Nur
 Komisaris Independen : Subagio Utomo

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pada saat ini, Dewan Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna berjumlah 2 (dua) orang terdiri atas Komisaris Utama dan Komisaris Independen. Pembagian tugas masing-masing Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama, dengan tugas pokok melakukan pengawasan di bidang pengurusan secara bisnis umum Perusahaan yang dilakukan Direksi dan mengkoordinasikan tugas Komisaris Independen dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham;
2. Komisaris Independen, dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap penguasaan, pemeliharaan dan pengurusan kekayaan Perusahaan yang dilakukan Direksi.
3. Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit yang diangkat oleh Dewan komisaris.

4.3 Appointment and Dismissal

After going through the process of fit and proper test accordance with prevailing regulations, candidates for the Board of Commissioners who pass the fit and proper test are appointed and designated as the Board of Commissioners.

1. *The dismissal of the BOC may done if the person concerned:*
2. *Can not do their job properly;*
3. *Do not carry or violate the provisions of legislation in force or Articles of Association;*
4. *Engaging in actions detrimental to Indonesia Power and / or the state;*
5. *Declared guilty by a court decision which has permanent legal force;*
6. *Resignation.*

4.4 Composition and Division of Tasks

Board of Commissioners in 2014 based on the decision of Shareholders BAg circularly dated February 24, 2012, the Board of Commissioners are:

*President Commissioner : Binarto Bakti Mahardjana
 Independent Commissioner : Subagio Utomo*

Furthermore, based on Decision of Shareholders in the circular dated August 29, 2014, the Board of Directors are:

*Executor (Plt) Pres.Commissioner: Muhammad Nur Ikbil
 Independent Commissioner : Subagio Utomo*

The division of duties of the Board of Commissioners

At this time, the Board of Commissioners of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna consists of 2 (two) person acting as the President Commissioner and Independent Commissioner. The division of tasks each Commissioner is as follows:

1. *The President Commissioner, with the principal task of doing supervision in the field of maintenance in business Company general that the Board of Directors and coordinate tasks for Independent Commissioner with due regard to the interests of Share Holders;*
2. *Independent Commissioner, with the principal task to supervise the mastery, maintenance and management of the Company's assets that is being done by the Board of Directors.*
3. *The Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and Audit Committee are appointed by the Board of Commissioner.*

4.5 Independensi Dewan komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan independensi dan bebas benturan kepentingan setiap tahun, dengan menyebutkan bahwa:

1. tidak memiliki saham di perusahaan;
2. yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali;
3. menghindari situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan. Sepanjang tahun 2014, tidak terdapat situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusannya.

Untuk memenuhi ketentuan independensi Dewan Komisaris yang diatur dalam ketentuan GCG, BAg memiliki Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan Pemegang Saham atau hubungan lainnya dengan BAg yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

4.5.1 Hubungan Keluarga dan Keuangan Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali

Dalam periode tahun 2014 tidak terdapat hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali, Hubungan Keluarga dan Keuangan Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali

4.5.2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris di BAg dan Perusahaan Lainnya

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris BAg yang memiliki saham BAg maupun pada perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

4.5.3. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaksanaan GCG.

4.6. Pedoman dan Tata Kerja Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

4.5 Independence of the Board of Commissioners

Each member of the Board of Commissioners made a statement of independence and free conflicts of interest every year, stating that:

1. *does not have shares in the company;*
2. *the party does not have a family relationship to the second degree with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Controlling Shareholders;*
3. *avoid situations that have the potential conflict of interest. Throughout 2014, there are no situations that have the potential conflict of interest faced by members of the Board of Commissioners in its decision-making.*

To comply with the independence of the Board of Commissioners set out in the provisions of GCG, BAg has an Independent Commissioner. Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who do not have the financial, management, share ownership and / or family relationship with members of the Board of Commissioners and / or by the Shareholder or other relationship with the BAg which could affect its ability to act independently.

4.5.1 Family Relations and Finance Member of the Board of Commissioners with the Board of Directors and Major Shareholders or Controller

In the period of 2014 there is no affiliation between the members of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders, Family Relations and Finance Member of the Board of Commissioners with the Board of Directors and Major Shareholders or Controller

4.5.2. Shareholdings of the Board of Commissioners in BAg and on the Other Company

Up to December 31, 2014, there are no members of the Board of Commissioners of BAg which owns shares in the BAg as well as other companies domiciled inside or outside the country.

4.5.3. Dual Positions Board of Commissioners

All members of the Board of Commissioners does not hold any position which is prohibited by the legislation applied on the implementation of GCG.

4.6. Guidance and Working Procedures BOC

In order to carry out the task of monitoring and providing advice to the Board of Directors, the Board refers to the Working Guidelines of the Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual), contains instructions on how to practice and BOC and Directors along with the explaining a structured phases of activity, systematic, easy to understand and can be run consistently, a reference for the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Vision and Mission of the company.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best practices) Good Corporate Governance. Pedoman dan tata kerja Dewan Komisaris dalam Board Manual mengatur aspek, antara lain:

1. Susunan dan persyaratan Dewan Komisaris,
2. Ketentuan rangkap jabatan,
3. Masa jabatan, pemberhentian dan pengunduran diri Dewan Komisaris
4. Program pengenalan dan pelatihan,
5. Tugas Dewan Komisaris, termasuk terkait persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP, tugas arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terkait Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG),
6. Organ Pendukung Dewan Komisaris..

Board Manual juga mengatur aspek terkait dengan kewajiban mengkaji ulang ketentuan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan regulasi yang berlaku.

4.7. Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN, maka tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.

Board Manual is based on the principles of corporate law, the provisions of the Statutes, regulations and statutory provisions applied, the direction of Shareholders as well as best practices (best practices) of Good Corporate Governance. Guidelines and working procedures of the Board in the Board Manual regulate aspects, among others:

1. *The composition and terms of Board of Commissioners,*
2. *Provisions double post,*
3. *The term of office, dismissal and resignation of Board of Commissioners*
4. *The introduction and training program,*
5. *Duties of the Board of Commissioners, including the associated approval on the draft RJPP and RKAP, and referrals duties supervision of the Board of Commissioners, related Practice Procedures Good Corporate Governance (GCG),*
6. *Supporting Organ of Board of Commissioners ..*

Board Manual also regulates aspects related to the obligation to review the provisions in accordance with company requirements and applicable regulatory developments.

4.7. Duties and responsibilities

In accordance with the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN, the responsibility and authority of the Board of Commissioners is to supervise the policy of maintenance, the course maintenance is generally either the Company or the Company's business and advises the Board of Directors. The task is done for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company, and is not intended for the benefit of a particular party or group.

Under the Articles of Association, the duties and authority of the Board of Directors are:

1. *Supervising the policy of management of the Company that the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including the supervision of the implementation of RJPP, RKAP, the implementation of the provisions of the Articles of Association and the General Meeting of Shareholders as well as the laws and regulations applied;*
2. *Perform duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions of the Articles of Association and the General Meeting of Shareholders as well as the laws and regulations applied;*
3. *Implement the Company's interests with regard to the interests of the shareholders and is responsible to the General Meeting of Shareholders;*
4. *To review and examine the Annual Report including the Financial Statements prepared by the Board of Directors and signed the report.*

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk antara lain:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti dan dokumen lainnya, memeriksa dan mencocokkan posisi uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
2. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan;
3. Membentuk komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris atau menunjuk tenaga ahli. Komite yang wajib dibentuk adalah Komite Audit dengan anggota yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab Dewan Komisaris;
4. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan; dan
5. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit, serta membagi tugas dan wewenang diantara Dewan Komisaris.

4.8. Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Realisasinya

Untuk terus mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris telah menyusun Rencana Kerja tahun 2014 yang secara garis besar meliputi:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali serta rapat khusus bila diperlukan/sesuai kebutuhan;
2. Rapat Konsultasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi secara berkala 1 (satu) bulan sekali serta rapat khusus bila diperlukan/sesuai kebutuhan;
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan RKAP dan RUPS Tahunan;
4. Kunjungan ke galangan kapal dalam rangka pengadaan armada;
5. Kegiatan lain, seperti mengikuti seminar atau pelatihan

4.9. Pelaksanaan Arahan Dewan Komisaris

Pengarahan Dewan Komisaris untuk memberikan arahan strategis sekaligus mendorong pencapaian kinerja perusahaan dalam Kontrak Manajemen dan Key Performance Indicators (KPI) tahun 2014. Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan terkait dengan implementasi rencana dan kebijakan perusahaan untuk tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2013. Arahan tersebut dilakukan dengan melakukan pembahasan baik secara internal maupun bersama dengan Direksi, antara lain terkait dengan:

The Authority of the Board of Commissioners

In carrying out supervisory duties, the Board of Commissioners Authority to include:

1. *Examining books, evidence letters and other documents, examining and matching cash position for verification purposes and other securities bond and knows all actions taken by the Board of Directors;*
2. *Entering the buildings and yards or places that is being used or controlled by the Company;*
3. *Establish committees that serve as the supporting supervisory board of directors or appoint experts. The committee that required to establish is the Audit Committee with members consisting of one or more members of the Board of Commissioners and Board of Commissioners is responsible;*
4. *Requesting explanation about everything that is required to the Board of Directors and the Board of Directors is obliged to provide an explanation; and*
5. *In performing its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and the Audit Committee, and divide the tasks and responsibilities between the Board of Commissioners.*

4.8. Work Plan of BOC and the realization

To continue encourage an increase in the effective discharge of its duties, the Board of Commissioners has developed a Work Plan of 2014 which includes:

1. *Internal Board of Commissioners Meeting regularly at least 1 (one) time each month and special meetings when necessary / appropriate;*
2. *Consultation between the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors on a regular basis 1 (one) time each month and special meetings when necessary / appropriate;*
3. *The General Meeting of Shareholders (GMS) Approval of RKAP and the Annual GMS;*
4. *A visit to the shipyard in order to procure a fleet;*
5. *Other activities, such as seminars or training*

4.9. Implementation of BOC Reference

Briefing the BOC to provide strategic direction as well as encourage the achievement of the company's performance in Contract Management and Key Performance Indicators (KPI) in 2014. The Board of Commissioners has expressed directives relating to the implementation of the plan and the company's policy for the year 2014 as contained in the Work Plan of the Board of Commissioners in 2013. The reference is done with the discussions both internally and with the Board of Directors, among others, relating to:

4.9.1. Aspek Keuangan

1. Perlu dilakukan kajian yang komprehensif tentang pelepasan seluruh atau sebagian saham di PT Adhiguna Putera disesuaikan dengan nilai yang paling optimal guna mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham
2. Menyusun rangkuman komprehensif atas SHL yang sudah disetujui dalam RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2014 yang antara lain memuat evaluasi atas pelaksanaan pengadaan yang sudah terlaksana dan timeline rencana pelaksanaan pengadaan.

4.9.2. Aspek Operasional

1. Pemilihan Ship Management yang akan melakukan pengelolaan kapal-kapal milik agar dilakukan secara transparan dan Pekerjaan maintenance yang dilakukan oleh ship management terhadap kapal-kapal milik BAg agar selalu dimonitor sehingga sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh IMO.
2. Terkait dengan pengadaan investasi alat produksi, agar dilakukan secara transparan dan dengan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan risiko batalnya kapal yang akan dibeli karena lamanya waktu proses pengadaan dan banyaknya peminat sehingga akan berdampak pada tidak tercapainya kinerja perusahaan.
3. Perlu memberikan pemahaman kepada Divisi-divisi terkait pada Kantor Pusat PT PLN (Persero) dan Manajemen Unit Pembangkit PLTU, sehingga Divisi ataupun Unit Pembangkit dimaksud dapat memperhatikan kinerja dari alat bongkar di beberapa pelabuhan PLTU agar kinerja alat tidak mengganggu proses bongkar muatan dari kapal sehingga optimalisasi sarana pengangkutan milik BAg dapat tercapai.
4. Mengkritisi kinerja aset Perusahaan berupa kapal-kapal, agar lebih baik dengan menilai kinerja:
 - Shipping management agar lebih baik pengelolaannya;
 - Meminta penambahan tenaga ahli yang dapat memperkuat jajaran manajemen dalam hal teknis perkapalan dan pengawasan shipping management.

4.9.3. Aspek Administrasi

1. Memperhatikan ketentuan GCG tentang ketepatan waktu dalam menyampaikan Laporan Periodik kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.
2. Perlu dilakukan pemutakhiran atas RJPP BAg Tahun 2012-2016, disesuaikan dengan realisasi RKAP tahun 2012 dan 2013

4.9.4. Aspek Pengembangan Usaha dan Investasi

1. Rencana PT PLN (Persero) yang akan membangun kapal pengangkut Compressed Natural Gas (CNG), maka Manajemen BAg perlu memetakan risiko berkaitan dengan posisi sebagai anak perusahaan PLN yang bergerak khusus di bidang pelayaran dan menyiapkan mitigasinya sehingga untuk waktu selanjutnya tidak terjadi hal-hal yang akan memberatkan langkah aktifitas BAg.
2. Mensosialisasikan karakteristik kapal dan model pengangkutannya kepada Divisi-divisi terkait di PLN sehingga dapat memberikan pemahaman yang sama di lapangan.

4.9.1. Financial aspect

1. *Need to do a comprehensive study on the release of all or part of the shares in PT Adhiguna Putera adjusted to the optimum value in order to obtain the approval of the Shareholders*
2. *Develop a comprehensive overview on SHL which has been approved in the GMS Approval RKAP 2014 which shall include an evaluation of the implementation of procurement that have been implemented and the timeline of the implementation of the procurement plan.*

4.9.2. Operational Aspects

1. *Selection of Ship Management will manage the ships belonging to that done transparently and maintenance work carried out by the ship management of the vessels from BAg to be always monitored so that in accordance with the provisions issued by IMO.*
2. *In connection with the procurement of production equipment investment, to be done transparently and with the precautionary principle and with regard to the risk of cancellation of vessel to be purchased because of the length of time the procurement process and the many enthusiasts that will not have an impact on the achievement of the company's performance.*
3. *Need to provide insight to divisions related to the Head Office of PT PLN (Persero) and Management Unit Generating Power Plant, so the division or unit plant is able to pay attention to the performance of the tool unloading at ports power plant so that the performance of the tool does not interfere with the process of unloading cargo from the ship so that the optimization of transport environment belong to BAg can be achieved.*
4. *Criticizing the performance of the Company's assets in the form of vessels, in order to better assess the performance:*
 - *Shipping management in order to better management;*
 - *Request additional experts who can strengthen the ranks of management in terms of technical shipping and shipping management supervision.*

4.9.3. Aspects Administration

1. *Taking into account the provisions of GCG about punctuality in delivering Periodic Report to the Shareholders and the Board of Commissioners.*
2. *Need to do an update on RJPP BAg Year 2012-2016, adjusted to the realization RKAP in 2012 and 2013*

4.9.4. Aspects of Enterprise Development and Investment

1. *The plan of PT PLN (Persero), which will build freight vessel for Compressed Natural Gas (CNG), the BAg management needs to be charted risk management associated with the position as PLN's subsidiary specialized in the field of shipping and preparing for mitigation so that the next time nothing would happen that would incriminate BAg activity.*
2. *Socialize vessel characteristics and models of transportation to the related divisions at PLN so as to provide a common understanding in the field.*

4.10. Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab demi kepentingan Perusahaan. Tugas utama Dewan Komisaris adalah untuk memastikan tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan dan untuk memastikan bahwa Perusahaan dikelola untuk menjaga kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya.

Dalam menerapkan tugas pengawasan dan pertimbangan (atau pemberian nasihat) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, catatan pengawasan dan pertimbangan yang dapat dilaporkan sepanjang tahun buku 2014 oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Menelaah dan memberikan rekomendasi persetujuan atas Rencana Kerja Anggaran dan Perusahaan (RKAP) Tahun 2015;
- Memonitor dan memberi saran guna meningkatkan kinerja Direksi dalam menerapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Tahun 2014 yang telah disetujui;
- Melakukan pengawasan terhadap realisasi rencana bisnis Perusahaan, khususnya dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dihadapkan pada masalah modal kerja, dan membahas dengan Direksi tentang hal-hal yang menyebabkan beberapa aspek penting rencana bisnis belum tercapai, seperti peremajaan armada dan mendorong Direksi agar terus berupaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi;
- Memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan yang efektif dengan memantau tindak lanjut temuan dan rekomendasi akuntan publik dan otoritas lainnya;

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti seminar, workshop, benchmarking, training/ diklat. Jumlah seminar / workshop / benchmarking / training / diklat yang diikuti selama tahun 2014 sebanyak 5 kali kunjungan di dalam negeri antara lain ke PLTU Tg Jati / Jepara, PLTU Teluk Sirih Padang dalam rangka survey supply chain batubara, serta di Manado dan Denpasar dalam rangka mengikuti seminar LNG Shipping dan di Batam dalam rangka kunjungan ke Galangan Mercusuar untuk pembangunan 2 (dua) set tug & barge. Disamping itu kunjungan ke luar negeri dilakukan sebanyak 2 kali antara lain ke Tianjii dan Taizho-China dalam rangka verifikasi teknis pembangunan kapal SUV dan kunjungan ke galangan kapal serta ke Singapore dalam rangka LNG Shipping Conference.

Selain hal tersebut Dewan Komisaris juga telah melaksanakan 1 (satu) kali program pengenalan untuk Komisaris baru.

4.10. Implementation of Board of Commissioners Supervision

Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS to perform the task of monitoring and providing advice to the Board of Directors in good faith, prudence and responsibility in the interest of the Company. The main task of the Board of Directors are to ensure the achievement of the aims and objectives of the Company and to ensure that the Company managed to safeguard the interests of shareholders and other stakeholders sharing.

In applying the task of monitoring and consideration (or advisory) under the provisions of the applicable legislation, as well as the Articles of Association and resolutions of the General Meeting of Shareholders, the record of supervision and consideration can be reported throughout the financial year 2014 by the Board of Commissioners as follows:

- Review and give approval of the recommendation for Budget and Work Plan of the Company (RKAP) 2015;*
- Monitor and advise the Board of Directors in order to improve performance in implementing the Work Plan and Budget (RKAP) 2014 which has been approved;*
- To supervise the realization of the business plan of the Company, particularly in the face of business environment faced with the problem of working capital, and discuss with the Board of Directors of the things that led to some important aspects of the business plan that has not been achieved, such as fleet rejuvenation and encourage the Board of Directors in order to continue to improve productivity and efficiency;*
- Ensure the implementation of internal control systems and financial reporting are effective to monitor follow-up findings and recommendations public accountants and other authorities;*

Board of Commissioners Training Program

Board of Commissioners increased its competence with seminars, workshops, benchmarking, training / education and training. Number of seminars / workshops / benchmarking / training / training were followed during 2014 by 5 visits in the country, among others to the Tg Jati plant / Jepara, Teluk Sirih Padang plant in order to survey the supply chain of coal, as well as in Manado and Denpasar in order to follow LNG Shipping seminar and in Batam in the framework of a visit to the lighthouse Shipyard for the construction of 2 (two) sets of tug and barge. Besides that, there were 2 overseas visits, among others to Tianjii and Taizho-China in the framework of the technical verification of ship building SUV and a visit to the shipyard as well as to Singapore in order LNG Shipping Conference.

In addition to the Board of Commissioners also has conducted 1 (one) time program for the introduction of a new Commissioner.

4.11. Rapat Dewan Komisaris

Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilaksanakan melalui rapat atau pertemuan rutin yang diadakan dengan Direksi dan dengan menggunakan surat. Selama tahun 2014, Dewan Komisaris telah melakukan 12 (duabelas) kali rapat dengan Direksi, catatan kehadiran dalam rapat, sebagai berikut:

Jumlah Rapat	Kehadiran
• Dewan Komisaris (Lama)	7
- Komisaris Utama	7
- Komisaris Independen	7
• Dewan Komisaris (Baru)	5
- Plt. Komisaris Utama	5
- Komisaris Independen	5

Selain pertemuan rutin tersebut, pertemuan informal juga sering diadakan untuk pembahasan dan konsultasi / arahan atas permasalahan yang sedang dihadapi Direksi. Selain itu, diskusi dan konsultasi antara Dewan Komisaris dan Direksi juga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yaitu, email dan sosial media seperti BBM dan WA.

Untuk rapat rutin, sebelum rapat diselenggarakan, materi rapat telah diberikan kepada anggota Dewan Komisaris agar cukup waktu untuk mempelajari materi rapat. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas tugas pengawasan.

4.11.1. Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2014

Untuk tahun 2014, Dewan Komisaris merencanakan rapat yaitu rapat Koordinasi / Konsultasi dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dan rapat internal Dewan Komisaris serta rapat Komite Dewan Komisaris juga 12 (dua belas) kali. Rencana rapat tersebut telah disetujui pada Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2014. Namun, rencana rapat tersebut dapat berubah jika terdapat permintaan dari anggota Dewan Komisaris Perusahaan berkaitan dengan kondisi jalannya perusahaan.

4.11.2. Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2014

Seluruh keputusan hasil Rapat konsultasi dengan Direksi didokumentasikan dalam Notulen Rapat, untuk selanjutnya keputusan tersebut dimonitor tindak lanjut penyelesaiannya dalam rapat berikutnya. Pelaksanaan tugas pengawasan, pemberian nasihat dan rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan secara langsung dalam rapat Dewan Komisaris.

Selama tahun 2014, Dewan Komisaris telah memberikan berbagai rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Direksi antara lain terkait dengan:

1. Kebijakan strategi Perusahaan
2. Kegiatan operasional Perusahaan
3. Dalam investasi armada kapal agar dilakukan berdasarkan rencana yang jelas dan kajian yang mendukung serta memperhatikan kemampuan teknis pelabuhan bongkar.

4.11. Board of Commissioners Meeting

Supervisory and advisory function by the Board of Commissioners meeting are implemented through regular meetings held by the Board of Directors and with invitation letters. During 2014, the Board of Commissioners has conducted 12 (twelve) meetings with the Board of Directors, meeting attendance record are as follows:

Number of Meetings	Attendance
• Commissioners (Lama)	7
- President Commissioner	7
- Independent Commissioner	7
• Commissioners (New)	5
- Plt. President Commissioner	5
- Independent Commissioner	5

In addition to these regular meetings, informal meetings are often held for discussion and consultation / referral to the problems being faced by the Board of Directors. In addition, discussion and consultation between the Board of Commissioners and Board of Directors also conducted using information technology, through email and social media such as BBM and WA.

For regular meetings, before the meeting is held, meeting materials have been given to members of the Board of Commissioners to be sufficient time to study the meeting materials. It is done as an efforts to improve the effectiveness of supervisory duties.

4.11.1. Meeting of the Board of Commissioners 2014

In 2014, the Board of Commissioners meeting was planned including Coordination meeting / consultation with the Board of Directors for 12 (twelve) times and an internal meeting of the Board of Commissioners and Committee meetings The Board also twelve (12) times. Rencanarapat was approved in 2014. The plan Kerja Dewan Commissioner, however, the meeting plan to change jika terdapat Dewan Komisaris requests from members of the Company relating to the road conditions of the company.

4.11.2. Recommendations BOC 2014

All decisions in consultation with the Board of Directors Meeting is documented in the Minutes of the Meeting, then is monitored for its completion in the next meeting. Implementation of supervisory tasks, giving advice and recommendation of the Board of Commissioners is delivered directly in the meeting of the Board of Commissioners.

During 2014, the Board of Commissioners has provided various recommendations that should be a concern of Directors include those relating to:

1. Corporate strategy Policies
2. The operations of the Company
3. Investment in the fleet that is based on a clear plan and study supporting as well as giving attention to the technical ability of the unloading port.

4.12. Persetujuan Dewan Komisaris Tahun 2014

Terkait dengan kewenangan Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan, mengacu pada Anggaran Dasar pasal 11 ayat 8, dimana Direksi dapat melakukan suatu perbuatan atau transaksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, antara lain mengagunkan aktiva tetap, menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang, menghapus bukukan piutang macet, melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis sampai 5 (lima) tahun.

Selama tahun 2014, Dewan Komisaris telah memberikan 1 (satu) persetujuan mengenai penghapusan Aset inventaris kantor yang pembeliannya dilakukan sampai dengan tahun 2009, sehingga saat ini sebagian besar sudah melebihi umur ekonomis dan dalam kondisi rusak parah serta tidak dapat dipergunakan lagi.

4.13 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memahami pentingnya penilaian mandiri. Berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan Dewan Komisaris menilai bahwa:

1. Jumlah Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang masih relevan dengan kebutuhan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas pengelolaan Perusahaan pada periode masa jabatan Dewan Komisaris.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dan memiliki kompetensi inti yang diperlukan untuk memastikan efektivitas pengawasan Dewan Komisaris. Kompetensi tersebut meliputi bidang akuntansi/keuangan, evaluasi strategis, pemahaman bisnis, pengalaman dan kedalaman manajerial, pengetahuan industri pelayaran, pemahaman ketentuan serta manajemen dan pengendalian risiko. Dewan Komisaris bertugas secara kolegial, akan tetapi dalam rangka mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif, maka Dewan Komisaris bersepakat membagi tugas kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris agar lebih fokus dalam mengawasi bidang-bidang tertentu.

4.14. Fokus Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2015

Pada akhir tahun 2014, Dewan Komisaris menetapkan fokus pengawasan sekaligus pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan manajemen untuk tahun 2015, antara lain terkait dengan :

1. Pelaksanaan Ship Management yang belum optimal dan agar memiliki Contract Level Agreement (CLA) yang setiap saat dapat di evaluasi.
2. Program divestasi anak perusahaan;
3. Ketepatan waktu dalam menyampaikan Laporan Periodik kepada Pemegang Saham;
4. Penajaman RJPP 2012-2016 sesuai realisasi yang ada;
5. Tindak lanjut terhadap putusan RUPS Pengesahan RKAP

4:12. Approval of the Board of Commissioners 2014

Associated with the authority of the Board of Commissioners to give approval, referring to the statutes Article 11, paragraph 8, in which the Board of Directors may have done an act or transaction after having written approval from the Board of Commissioners, such as mortgaging the assets, receive or provide medium loans / long term, write off bad debts, releasing the fixed assets move with the economic life up to 5 (five) years.

During 2014, the Board has given 1 (one) Asset write-off agreement on the purchase of office equipment are carried out until 2009, so this time largely exceeds the economic life and in conditions of severely damaged and can not be used anymore.

4:13 Performance Assessment Board of Commissioners

Board of Commissioners understand the importance of self-assessment. Based on independent assessments conducted Board of Commissioners considers that:

1. *Board of Commissioners consists of 2 (two) people that are still relevant to the needs of monitoring and providing advice to the Board on the management of the Company during the period of tenure of the Board of Commissioners.*
2. *All members of the Board of Commissioners is a unity and has core competencies needed to ensure effective supervision of the Board of Commissioners. Competence includes the areas of accounting / finance, strategic evaluation, business understanding, experience and managerial depth, knowledge of the shipping industry, as well as the understanding of the provisions of the management and risk control. The Board of Commissioners collegial, but in order to improve the surveillance system more effective, the Board of Commissioners agreed to divide tasks to each member of the Board of Commissioners to be more focused in monitoring specific areas.*

4:14. Supervisory Focus of Board of Commissioners in 2015

At the end of 2014, the Board of Commissioners sets the focus at the same supervision by the Board of Directors and management of the company's management for 2015, among others, relating to:

1. *Implementation of Ship Management which has not been optimized and could have a Contract Level Agreement (CLA) which can be evaluated at any time.*
2. *Divestment program of subsidiaries;*
3. *Timeliness in delivering Periodic Report to Shareholders;*
4. *Refine RJPP according to existing realization of 2012-2016;*
5. *Follow-up to the decision of the GMS Approval of RKAP*

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, anggaran dan master plan, Rencana jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), penanganan risiko usaha sesuai dengan visi dan misi Perusahaan serta memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha.

Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

PERSYARATAN PENGANGKATAN DIREKSI

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- Dinyatakan pailit
- Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit, atau;
- Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pemberhentian Direksi diputuskan dalam RUPS dan sewaktu-waktu dapat memberhentikan Direksi dengan memberikan alasannya. Alasan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud apabila :

- Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen
- Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
- Tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar
- Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan/Negara
- Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi
- Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- Mengundurkan diri

DIRECTORS

The Board of Directors is the organ in charge of the Company and is collectively responsible for managing the company and to implement good corporate governance at all levels of the organization. The Board of Directors is responsible for formulating and implementing strategies and business policies, budgets and master plan, Long Term Plan of the Company (RJPP), Work Plan and Budget (RKAP), handling business risks of business in accordance with the vision and mission of the Company and ensure the achievement of the goals and objectives of business.

The Company managed and led by a Board of Directors whose number is adjusted to the needs of the company. In the case of the Board of Directors consists of more than 1 (one) member of the Board of Directors, one of which was appointed as Managing Director.

TERMS OF APPOINTMENT OF DIRECTORS

Who can be appointed as member of the Board of Directors are individuals who qualified to take legal action, except within 5 (five) years prior to his appointment ever:

- Declared bankrupt*
- Being a member of the Board of Directors or the Board of Commissioner or members of the Supervisory Board was found guilty of causing a Company is declared bankrupt, or;*
- Convicted of a criminal act and cause National financial loss and / or related the financial sector*

Member of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS). GMS's decision regarding the appointment and dismissal of Directors also set the date of promulgation of the appointment and dismissal. In the case of the GMS is not set, then the appointment and dismissal of members of the Board of Directors effective since the closing of the GMS. Tenure of the Board determined 5 (five) years and may be reappointed for one (1) term.

DISMISSAL OF DIRECTORS

Dismissal of the Board of Directors decided in the GMS and at any time could dismiss the Board of Directors with reasons. Reason dismissal of the Board of Directors as intended if:

- Unable to meet its obligations which had been agreed in the contract management*
- Can not do their job properly*
- Not implementing legislation and / or the Articles of Association*
- Engage in actions that harm the Company / Country*
- Doing actions that violate ethical conduct and / or propriety that should be respected as a member Board of Directors*
- Was found guilty by the court verdict and has a legally enforceable*
- Resign*

JUMLAH KOMPOSISI DIREKSI

Hingga akhir 31 Desember 2014, jumlah anggota Direksi BAg adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Direktur Keuangan dan SDM. Direktur Utama BAg dijabat oleh Bima Putrajaya S dan Direktur Keuangan dan SDM dijabat oleh Surya Fitriadi.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Direksi berwenang untuk :

- 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan
- 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan
- 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja, baik sendiri - sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan
- 4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pension atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan
- 5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Perusahaan
- 7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan

Direksi berkewajiban untuk :

- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan
- 2) Menyiapkan pada waktunya RUPS Perusahaan
- 3) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai
- 4) Membuat daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah rapat Direksi.
- 5) Membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggung jawaban pengurusan Perusahaan.
- 6) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit
- 7) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan
- 8) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan
- 9) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai ketentuan perundang-undangan

TOTAL COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Until the end of December 31st 2014, the number of members of the Board of Directors of BAg is two (2) persons, consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) Director of Finance and Human Resources. President Director of BAg held by Bima Putrajaya S and Director of Finance and Human Resources chaired by Surya Fitriadi.

TASKS, POWERS AND DUTIES OF DIRECTORS

Directors in charge of running all actions relating to management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company. In carrying out the tasks as intended, then the Board of Directors is authorized to:

- 1) *Establish policies Company management*
- 2) *Set up the transfer of power for the Board of Directors to take decisions on behalf of the Board of Directors or represent Companies inside and outside the court*
- 3) *Set the handover of power of the Board of Directors to one or several workers, either alone or several person or to others, to represent the Company inside and outside court*
- 4) *Set the provisions on Companies employment including setting up the salary, pension or retirement benefits and other income for Company's workers*
- 5) *To appoint and dismiss Company employees and legislation in force*
- 6) *To appoint and dismiss Company's secretary*
- 7) *Perform all measures and other actions concerning the maintenance and ownership of Company's wealth*

The Board of Directors is obliged to:

- 1) *Seek and ensure the implementation of the business and the Company's activities*
- 2) *Setting up in time GMS Company*
- 3) *Provide an explanation to the GMS regarding*
- 4) *Make a list of shareholders, Special Register and Minutes of the meeting of the Board of Directors.*
- 5) *Make the annual report as a form of being responsible for management of the Company.*
- 6) *Prepare Financial Statements based on Standard Financial Accounting and report it to Public accountant for audit*
- 7) *Presenting the Annual Report including the Financial Report to the GMS for approval and ratified*
- 8) *Provide an explanation to the GMS regarding Annual report*
- 9) *Delivering the Balance Sheet and the Income Statement being approved by the GMS to the Minister that charge in accordance with the Law and Human Rights legislation*

- 10) Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM
- 11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan.
- 12) Menyimpan ditempat kedudukan Perusahaan :
 - a. Daftar pemegang saham
 - b. Daftar khusus
 - c. Risalah RUPS
 - d. Risalah Rapat Dewan Komisaris
 - e. Risalah rapat direksi
 - f. Laporan tahunan
 - g. Dokumen keuangan
 - h. Dokumen perusahaan lainnya
- 13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern
- 14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 15) Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya
- 16) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
- 17) Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan
- 18) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS.

INPENDENSI DIREKSI

Setiap anggota Direksi dapat bertindak independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya baik secara individual maupun kolegal. Seluruh anggota direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaksanaan GCG.

HUBUNGAN KELUARGA DAN KEUANGAN

BAg berkomitmen untuk terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG dan menolak adanya nepotisme di lingkungan perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2014, tidak terdapat anggota Direksi BAg yang memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

- 10) *Delivering the statement of changes in the composition of Shareholder, the Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister in charge of Justice and Human Rights*
- 11) *To maintain the Registration of Shareholders, the Special Register, Minutes of the GMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Minutes of the Meeting of the Board of Directors, the Annual Report and finance documents.*
- 12) *Keep the domicile of the Company:*
 - a. *List of shareholders*
 - b. *Special list*
 - c. *Minutes of GMS*
 - d. *Minutes of Meeting of the Board of Commissioners*
 - e. *Minutes of Meeting of the Board of Directors*
 - f. *Annual report*
 - g. *Financial documents*
 - h. *Other corporate documents*
- 13) *Develop accounting system in accordance with Standards Financial Accounting and based on the principles internal control*
- 14) *Provide regular reports in the manner and time in accordance with applicable regulations*
- 15) *Setting up the organizational structure of the Company complete with details of their duties*
- 16) *Provide an explanation of all things asked or requested by the members of the Board Commissioners and Shareholders*
- 17) *Develop and establish a blueprint for the organization Company*
- 18) *Perform other duties in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and established by the GMS.*

INDEPENDENT DIRECTORS

Each member of the Board of Directors to act independently in carrying out the functions and duties both individually and collegially. All members of the Board of Directors do not hold positions that are prohibited by the legislation in force on the implementation of GCG.

FAMILY AND FINANCE

BAg is committed to continue to apply the principles of GCG and reject the existence of nepotism in the corporate environment. Up to December 31, 2014, there were no members of the Board of Directors of BAg that has a financial relationship or family relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors, and / or controlling shareholders of the Company.

Adapun tabel hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris dengan anggota direksi dan/atau Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

The table affiliation with members of the Board of Commissioners of directors and / or shareholders are as follows:

Nama (Name)	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain					
	Dewan Komisaris (Board of Commissioner)		Direksi (Board of Director)		Pemegang Saham (Stakeholders)		Dewan Komisaris (Board of Commissioner)		Direksi (Board of Director)		Pemegang Saham (Stakeholders)		Sebagai Anggota Dewan Komisaris (as member of Board of Commissioner)		Sebagai Anggota Dewan Direksi (as member of Board of Director)		Sebagai Pemegang Saham (as stakeholders)	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Bima Putrajaya S		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒
Surya Fitriadi		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi dilaksanakan seminggu sekali, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa direksi mengadakan Rapat Direksi di luar jadwal yang telah ditentukan, dimana apabila pada waktu tersebut diperlukan pengambilan keputusan dalam forum direksi. Pengambilan keputusan dalam rapat dewan komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Rapat direksi dengan dewan komisaris dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan. Dalam hal Sekretaris Perusahaan berhalangan hadir, Direktur Utama dapat menunjuk salah satu staf Sekretaris Perusahaan.

Dalam hal Rapat direksi mengambil suatu keputusan bersama atas suatu masalah maka segenap anggota direksi mengupayakan agar keputusan yang diambil sejauh mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika karena sesuatu dan lain hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat dilaksanakan maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dengan prosedur pemungutan suara, sebagai berikut:

- Sebelum pengambilan suara dilaksanakan, Direktur utama atau pimpinan rapat terlebih dahulu harus memastikan bahwa jumlah anggota Direksi yang hadir telah memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar
- Direktur utama atau pimpinan rapat terlebih dahulu membuat penjelasan, baik secara lisan maupun tertulis, tentang agenda atau masalah yang akan diputuskan melalui pengambilan suara. Penjelasan dimaksud harus diupayakan se jelas mungkin sedemikian rupa sehingga tidak mengundang penafsiran yang berbeda dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengambil sikap setuju atau tidak setuju dari para anggota direksi.
- Perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari anggota direksi dalam proses pengambilan keputusan harus dicantumkan dalam risalah Rapat direksi.
- Pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka terkecuali dinyatakan lain oleh Rapat direksi

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors meeting held once a week, but it was likely that the board of directors held a meeting of the Board of Directors outside the specified schedule, which if at that time it is necessary to make decision in the forum of directors. Decision-making in the meeting of the Board of Commissioners are taken based on consultation and consensus. In the case of consensus could not reached a decision, the decision taken by majority voting agreed. A board meeting with the board of directors attended by the Secretary of the Company. In the case of Corporate Secretary was unable to attend, Managing Director may appoint one of the staff's Corporate Secretary.

In terms of meeting the directors take a joint decision on an issue that all board members to strive for the decisions taken as far as possible based upon deliberation to reach consensus. If for some reason deliberation to reach an agreement could not be implemented, the decisions are taken by majority vote with the voting procedure, as follows:

- Before voting is conducted, President Director or the leader must first ensure that the number of Board members in attendance has a quorum as stipulated in Articles of Association*
- Managing director or chairman of the meeting in advance make an explanation, either orally or in writing, about the agenda or issues to be decided by voting. Explanation intended to be pursued as clear as possible in a way that does not invite different interpretations and wherever possible directed to take a stance agree or not agree on the members of the board of directors.*
- Dissent (dissenting opinion) of Board members in the decision-making process must be included in the minutes of meetings of directors.*
- Polling conducted openly unless otherwise stated by the Board of Directors Meeting*

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja direksi dilaksanakan oleh dewan komisaris dengan mengacu kepada hasil-hasil pelaksanaan kinerja, antara lain kinerja keuangan, kinerja operasi, kinerja administrasi, penanganan risiko usaha, penerapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), tindak lanjut atas temuan auditor internal dan eksternal, implementasi prinsip-prinsip GCG serta hal-hal lain yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Menunjuk keputusan menteri badan usaha milik Negara No. Kep-59/MBU/2004 tentang Kontrak Manajemen, dimana lampiran dari kontrak manajemen tersebut adalah Key Performance Indicators (KPI). evaluasi kPi tahun 2014 dilakukan berdasarkan indikator penilaian kinerja Direksi pada 6 (enam) perspektif berbasis Malcolm Baldrige. keenam aspek tersebut terdiri dari (1) perspektif pelanggan, (2) Perspektif Produk dan Layanan, (3) Perspektif Proses Bisnis Internal, (4) Perspektif Sumber Daya Manusia, (5) Perspektif Keuangan dan Pasar serta Kepemimpinan, (6) Perspektif Penerapan GCG.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF DIRECTORS

Performance assessment of directors implemented by the Board of Commissioners with reference to the results of the performance, including financial performance, operating performance, the performance of the administration, the handling of business risks, the implementation of the Work Plan and Budget (RKAP), the follow-up on the findings of internal and external auditors, implementation of the principles of GCG and other matters specified by the shareholders.

In accordance with ministerial decree of State-owned enterprises No. Kep-59 / MBU / 2004 on the Management Contract, wherein the attachment of the management contract is the Key Performance Indicators (KPI). 2014 KPI evaluation is based on performance assessment indicators of Directors on 6 (six) Malcolm Baldrige-based perspective. The sixth aspect is comprised of (1) the customer's perspective, (2) Product Perspective and Services, (3) Internal Business Process Perspective, (4) Perspective of Human Resources, (5) Financial Perspective and Markets and Leadership, (6) GCG Application Perspective.



KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Pembentukan Komite Audit pada BAg merupakan bagian integral dari upaya perseroan menerapkan GCG. Peran dan fungsi Komite Audit untuk membantu dan meningkatkan peran Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian diharapkan peran dan fungsi masing-masing organ perseroan (RUPS, Komisaris dan Direksi) dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam merealisasikan tujuan perseroan.

Pedoman Kerja Komite Audit

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Audit telah dilengkapi Pedoman Kerja dalam Piagam Komite Audit.

Piagam Komite Audit mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Komite Audit, antara lain fungsi dan tugas pokok Komite Audit, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit, Kode Etik, Rapat Komite Audit serta Penilaian kinerja Komite Audit.

Persyaratan, Komposisi dan Keahlian Anggota Komite

Persyaratan Komite Audit

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komite Audit BAg adalah mereka yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Persyaratan kemampuan terdiri dari

1. Perseorangan yang ahli dalam bidang hukum, keuangan, dan industri BAg
2. Bebas dari segala potensi benturan kepentingan sehingga tidak mengganggu obyektivitas pendapatnya terhadap masalah yang dihadapi, dan
3. Membuat surat pernyataan bebas dari conflict of interest apabila diperlukan.

Anggota Komite Audit wajib memiliki sifat dan perilaku terpuji serta memenuhi persyaratan kepatutan, antara lain yaitu: memiliki integritas yang baik, pengetahuan yang memadai tentang bisnis perusahaan, pengalaman kerja yang cukup bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang lainnya yang relevan, jujur, independen (tidak ada conflict of interest), obyektif dan profesional serta dapat dipercaya dan memiliki komitmen terhadap tugasnya

Proses Pemilihan Anggota Komite Audit yang Berasal Dari Pihak Independen

1. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan nama calon anggota Komite Audit yang berasal dari luar Dewan Komisaris (pihak independen) kepada Dewan Komisaris. Calon yang diajukan harus memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi yang diperlukan
2. Setelah melakukan wawancara dan penelitian atas persyaratan calon, maka Ketua Komite Audit akan menyampaikan rekomendasi atas calon yang akan diangkat kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris akan mempelajari rekomendasi dari Ketua Komite Audit, jika rekomendasi disetujui, maka Dewan Komisaris akan menerbitkan surat keputusan pengangkatan.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a committee established by the Commissioner to work collectively and helps commissioners in their duties. Formation of Audit Committee on the BAg is an integral part of the company's efforts to implement GCG. The role and functions of the Audit Committee to assist and enhance the role of Commissioners perform its oversight function. It is expected the roles and functions of each organ of the company (GMS, Commisioners and Directors) can be structured and balanced in realizing the objectives of the company.

Guidelines of the Audit Committee

In carrying out the functions and roles, Audit Committee equipped with Guidelines in Audit Committee Charter.

Audit Committee Charter set things connected to the duties and obligations of the Audit Committee member, among other functions and duties of the principal Audit Committee, responsibility and authority of the Audit Committee, Code of Ethics, Audit Committee's meeting and evaluating Audit Committee Assessment.

Requirements, composition and Skills of Committee Members

Audit Committee Requirements

Which can be appointed as member of the Audit Committee are those that fullfil BAg fit and proper requirements. Which are consists of

1. *The individual who is expert in the fields of law, finance, and industrial BAg*
2. *Free from any potential conflict of interest so as not to interfere objective opinion to the problems encountered, and*
3. *Make a statement free of conflict of interest if necessary.*

Audit Committee members shall have the properties and behavior commendable and meet the requirements of propriety, namely: high integrity, adequate knowledge of the company's business, work experience considerable field supervision / inspection and other fields relevant, honest, independent (no conflict of interest), objectively and professionally as well as trustworthy and committed to their duties

The selection process of members of the Audit Committee which came from Independent party

1. *Chairman of the Audit Committee is entitled to propose the name prospective members of Audit Committee who came from outside the BOC (independent party) to the Board of Commissioners. Nominee must meet the requirement of competence and independence required*
2. *After conducting interviews and research of requirements of candidates, the Chairman of the Audit Committee shall submit recommendations on the candidates to be appointed to the Board of Commissioner.*
3. *The Board of Commissioners will learn recommendations from the Chairman of the Audit Committee, if the recommendation is approved, the BOC will issue the appointment.*

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Komposisi Komite Audit

Keanggotaan Komite audit terdiri dari Ketua dan anggota yang bukan merupakan pegawai perusahaan dan Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Walaupun terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, susunan keanggotaan Komite Audit tidak mengalami perubahan, susunan keanggotaan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 27/DK/K/VI/2012 adalah:

Ketua	:	Subagio Utomo
Anggota	:	Junaidi

Independensi Komite Audit

Independensi Anggota Komite Audit

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-01/MBU/2011, maka salah satu dari kriteria menjadi anggota Komite Audit adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi.

Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota Komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen atau yang dapat bersifat independen sedang anggota Komite (non Komisaris) terdiri dari akademisi (akuntansi, keuangan, teknik) yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang tugasnya atau mantan pegawai/pejabat perusahaan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas berkaitan dengan perusahaan dan aktivitasnya.

Komite Audit bersifat independen dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris;
2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BAg;
3. Bukan merupakan Direksi atau karyawan BAg dan atau Anak Perusahaan BAg sekurangnya dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit BAg;
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Anak Perusahaan BAg dan atau perusahaan afiliasi BAg;
5. Tidak bekerja pada Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan atau non audit atau jasa konsultasi pada BAg dalam sekurangnya satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit BAg.

Appointment and Dismissal of Members of the Audit Committee

Dismissal of members of the Audit Committee can be done if the person concerned ended tenure of membership and based on the decision of Board of Commissioners, was dismissed because it does not meet the set performance and / or incompetent in performing their duties.

Composition of the Audit Committee

Membership Audit Committee consists of the Chairman and members who are not employees of the company and the Audit Committee members are Independent Commissioners acts as the Chairman of the Audit Committee.

Although there is a change in the composition of the Board of Commissioners, the composition of the Audit Committee did not change, the composition of the Audit Committee based on Board of Commissioners Decree No. 27/DK/K/VI/2012 are:

Chairman	:	Subagio Utomo
Members	:	Junaidi

Independence of the Audit Committee

Independence of the Audit Committee

In accordance with the rules and regulations of Bapepam and Minister of State Enterprises No. PER-01/MBU/2011, it is one of the criteria of a member of the Audit Committee are independent and free of conflicts of interest that can be objective in giving its opinion on the problems faced.

Another thing that is emphasized to all members of the Committee is to be professional in carrying out its duties and in advising the Commissioner.

The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner or that can be independently being members of the Committee (non Commissioner) consists of academics (accounting, finance, engineering) who have the competence and experience in their respective sectors or former employees / officials of companies that have experience and extensive knowledge relating with the company and its activities.

The Audit Committee is independent with the following criteria:

1. Not having a family relationship by marriage and descent to the second degree with members of the Board of Directors or the Board of Commissioners;
2. Not having a business relationship, directly or indirectly related to the business activities of the BAg;
3. It is not the Board of Directors or employees or subsidiaries of BAg and BAg at least in the past year before being appointed as the BAg Audit Committee;
4. Has no shares either directly or indirectly in subsidiaries or affiliated companies of BAg;
5. Do not work on public accounting firm, law firm or any other party that has provided audit and non-audit or consulting services in the BAg or in the past at least one year before being appointed as the Audit Committee of BAg.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

1. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris;
2. Mengevaluasi/review proses pelaporan keuangan;
3. Mengevaluasi pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi;
4. Mengevaluasi ketaatan perusahaan pada peraturan internal dan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Komisaris baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan

Masa Jabatan Anggota Komite Audit

1. Masa tugas anggota Komite Audit adalah 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
2. Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Independensi Anggota Komite Audit

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, maka salah satu dari kriteria menjadi anggota Komite Audit adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi.

Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota Komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen atau yang dapat bersifat independen sedang anggota Komite (non Komisaris) terdiri dari akademisi (akuntansi, keuangan, teknik) yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang tugasnya atau mantan pegawai/pejabat perusahaan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas berkaitan dengan perusahaan dan aktivitasnya.

Komite Audit bersifat independen dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris;
2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BAg;
3. Bukan merupakan Direksi atau karyawan BAg dan atau Anak Perusahaan BAg sekurangnya dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit BAg;
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Anak Perusahaan BAg dan atau perusahaan afiliasi BAg;
5. Tidak bekerja pada Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan atau non audit atau jasa konsultasi pada BAg dalam sekurangnya satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit BAg.

Duties and Responsibilities of Audit Committee

Duties and responsibilities of the Audit Committee are:

1. Identify matters requiring the attention of the Commissioner;
2. To evaluate / review the financial reporting process;
3. Evaluate the development and utilization of information technology;
4. Evaluate the observance of the company's internal regulations and legislation;
5. Carry out other tasks given by the Commissioner in accordance with applicable regulations;
6. Reporting the performance of its duties to the Commissioner either periodically or at any time if needed

Term of Office of the Audit Committee Member

1. The term of the Audit Committee members is 3 (three) years without prejudice to the right of the Commissioner to dismiss them at any time;
2. The Audit Committee members who have ended their term of office, may be reappointed for another term.

Independence of the Audit Committee Member

In accordance with the rules and regulations of Bapepam and Minister of State Enterprises No. PER-01/MBU/2011, it is one of the criteria of a member of the Audit Committee are independent and free of conflicts of interest that can be objective in giving its opinion on the problems faced.

Another thing that is emphasized to all members of the Committee is to be professional in carrying out its duties and in advising the Board of Commissioner.

The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner or that can be independently being members of the Committee (non Commissioner) consists of academics (accounting, finance, engineering) who have the competence and experience in their respective sectors or former employees / officials of companies that have experience and extensive knowledge relating with the company and its activities.

The Audit Committee is independent with the following criteria:

1. Not having a family relationship by marriage and descent to the second degree with members of the Board of Directors or the Board of Commissioners;
2. Not having a business relationship, directly or indirectly related to the business activities of the BAg;
3. It is not the Board of Directors or employees or subsidiaries of BAg and BAg at least in the past year before being appointed as the Audit Committee bag;
4. Does not have shares directly or indirectly of subsidiaries or affiliated companies of BAg;
5. Do not work on public accounting firm, law firm or any other party that has provided audit and non-audit or consulting services in the BAg or in the past at least one year before being appointed as the BAg Audit Committee.

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2014 Komite Audit melaksanakan rapat internal sebanyak 12 kali dan mengikuti rapat internal Dewan Komisaris serta rapat Dewan Komisaris dengan Direksi yang membahas beberapa permasalahan secara lebih mendalam masing-masing 12 kali juga .

Kegiatan-kegiatan Komite Audit, antara lain:

1. Menelaah dan memberikan tanggapan atas Laporan Manajemen (LM) Tahunan dan Triwulanan 2014, Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2015 dan Key Performance Indicators (KPI) 2015.
2. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2015.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Rencana Rapat Komite Audit Tahun 2014

Tahun 2014 Komite Audit memiliki rencana untuk mengadakan rapat internal Komite Audit, mengikuti rapat internal Dewan Komisaris dan rapat konsultasi Dewan Komisaris dengan Direksi, masing-masing sebanyak 12 (dua belas) dalam setahun. Jumlah tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan apabila disepakati oleh seluruh anggota Komite Audit.

7.10. Laporan Kegiatan Komite

Selama tahun 2014, Komite Audit telah memberikan saran/masukan melalui Dewan Komisaris, antara lain:

1. Pengenaan demurrage Pembahasan mengenai demurrage agar meminta pihak luar yang independen untuk menjelaskan pengenaan demurrage mengacu kepada aturan hukum yang berlaku pada pelayaran.
2. Kajian Bisnis BAg dan Rencana Divestasi Anak Perusahaan; Perlu dilakukan kajian terkait dengan penambahan modal disetor PLN sebagai Pemegang Saham Mayoritas BAg dan tentang divestasi anak perusahaan BAg (PT Adhiguna Putera) yang bergerak dalam bidang usaha bongkar muat yang saat ini sudah mendapatkan ijin prinsip dari Pemegang Saham.
3. Kesesuaian realisasi terhadap RJPP BAg 2012-2016; Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BAg tahun 2012 – 2016 disusun dengan berpedoman pada ketentuan dan model perencanaan yang dilakukan oleh induk perusahaan yaitu PT PLN (Persero) dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap perusahaan yaitu proyeksi kebutuhan batubara PLN hingga tahun 2020 yang mencapai 125,7 juta ton. Pelaksanaan jangka pendek yang tertuang dalam RKAP tahun 2013 dan 2014 menunjukkan deviasi dengan perencanaan yang termuat dalam RJPP. Sehingga RJPP BAg 2012-2016 perlu diperbaharui, disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang mempengaruhi bisnis perusahaan selama 2 tahun tersebut.
4. Penghapusbukuan asset perusahaan; Mengenai usulan tentang penghapus bukuan asset Perusahaan, agar melampirkan juga Berita Acara inventarisasi tentang kondisi dan kepastian kepemilikan asset yang diusulkan untuk dihapusbukukan

Audit Committee Meeting

Throughout 2014, the Audit Committee carry out internal meetings 12 times and following an internal meeting of the Board of Commissioners and Board of Commissioners meeting with the Board of Directors that discusses some of the issues in more depth each 12 times as well.

The activities of the Audit Committee, among others:

1. *To review and provide feedback on the Management Report (LM) Annually and Quarterly in 2014, Work Plan and Budget (RKAP) in 2015 and Key Performance Indicators (KPI) in 2015.*
2. *Develop Work Plan for Audit Committee in 2015.*
3. *Carry out other duties assigned by the Board of Commissioners.*

Meeting of the Audit Committee 2014

In 2014 the Audit Committee has plans to hold an internal meeting of the Audit Committee, following an internal meeting of the Board of Commissioners and Board of Commissioners consultation meeting with the Board of Directors, respectively of 12 (twelve) times in a year. That amount can be changed as needed if agreed upon by all members of the Audit Committee.

7.10. Committee Activity Report

During 2014, the Audit Committee has provided advice / input through Board of Commissioners, among others:

1. *The imposition of demurrage Discussion about demurrage to request an independent external party to explain the imposition demurrage reference to the applicable law on the cruise.*
2. *BAg Business Studies and Divestment Plans Subsidiary; Need to do a study related to additional paid-in capital by PLN as Shareholder of BAg and divestment subsidiary BAg (PT Adhiguna Putera) who are engaged in loading and unloading, which is now approved in principle of Shareholders.*
3. *Conformity realization of the RJPP BAg 2012-2016; Long Term Plan of the Company (RJPP) of BAg years 2012 to 2016 drawn up with reference to the provisions and the model of planning done by the parent company, PT PLN (Persero) to consider its relevance to the company which is a projected demand of coal to PLN until 2020, which reached 125.7 million tons. Implementation of short-term contained in RKAP in 2013 and 2014 shows the deviation with planning contained in RJPP. So BAg RJPP 2012-2016 need to be updated, tailored to the needs and issues affecting the company's business for 2 years.*
4. *Write-off of assets of the company; Regarding the proposal on the removal of the books of the Company assets, require to attach Reports of inventory of the condition and the certainty of ownership of assets proposed to be written off*

5. Aset-aset BAg yang saat ini tidak digunakan oleh BAg; Menginventarisasi aset-aset BAg yang ada di kantor cabang BAg agar pemanfaatannya dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Selama ini, Terutama lahan-lahan yang ada dimanfaatkan oleh anak perusahaan namun tidak dibuat bentuk perikatan terhadap pemakaiannya dan upaya menjajaki diadakan kerjasama dengan korporasi di lingkungan PT PLN (Persero).
6. Evaluasi terhadap rencana angkutan gas (CNG); Terhadap rencana PT PLN (Persero) yang akan membangun kapal pengangkut Compressed Natural Gas (CNG) dan Setelah 5 tahun sejak pembangunan dan pengoperasiannya oleh konsorsium yang membangun, pengoperasian selanjutnya akan diserahkan kepada BAg selaku anak perusahaan PLN yang khusus menangani usaha di bidang pelayaran, maka manajemen BAg perlu memetakan resiko berkaitan dengan posisi sebagai anak perusahaan PLN yang bergerak khusus di bidang pelayaran dan menyiapkan mitigasinya sehingga ke depannya tidak terjadi hal-hal yang akan memberatkan langkah aktifitas BAg.

Penilaian Kinerja Komite Audit Tahun 2014

Mengacu pada Piagam Komite, kinerja Komite Audit dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap akhir tahun. Yaitu berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Audit serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Kebijakan dan Komponen Remunerasi Komite Audit Tahun 2014

Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lain bagi Komite Audit mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengawasan BUMN. Namun besaran remunerasi Komite Audit yaitu 15% tidak melampaui ketentuan maksimal 20 % dari Gaji Direktur Utama Perusahaan.

9.1. Sekretaris Dewan Komisaris

Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Terselenggaranya kegiatan / agenda Dewan Komisaris, dengan menyusun agenda rapat bulanan, rencana kerja Dewan Komisaris tahunan, untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris;

5. *The assets of BAg that are not currently used by the BAg; Inventory BAg assets in branch office so that utilization can provide added value to the company. During this time, especially land that is used by the subsidiary but not made form of engagement to explore the use and efforts done in collaboration with the corporation in the PT PLN (Persero).*
6. *Evaluation of gas transportation plan (CNG); About the plan of PT PLN (Persero), which will build Compressed Natural Gas (CNG) freighter and after 5 years since the construction and operation by a consortium, the operation will then be handed over to the BAg as a subsidiary of PLN specifically handling in the field of shipping, then BAg management needs to map out the risks associated with the position as PLN's subsidiary specialized in the field of shipping and preparing mitigation so that in the future does not happen things that would incriminate BAg activity.*

Performance Assessment Committee 2014

Referring to the Charter Committee, the Audit Committee's performance is evaluated by the Board of Commissioners each year end. Which is based on the realization and completion of the work program listed in the Work Plan as well as the Audit Committee reported to the Board of Commissioners, the assessment results into consideration for the Board of Commissioners to raise again and / or dismiss members of the Audit Committee for the next period of office.

Policies and Audit Committee Remuneration Component Year 2014

Remuneration policy and other facilities for Audit Committee refers to the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. KEP-12/MBU/2012 dated 24 Agustus 2012 about supporting organ Board of Commissioners / State Owned Enterprises Supervisory Board. However, the remuneration of the Audit Committee which is 15% does not exceed the maximum provision of 20% of the salary of the President Director of the Company.

9.1. Secretary of the Board of Commissioners

To smooth the Board of Commissioners duties may be assisted by the Secretary of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners on the Company.

Secretary of the Board of Commissioners has the function to provide administrative and secretarial support to the Board in order to facilitate the implementation of the tasks of the Board of Commissioners.

Task Secretary to the Board of Commissioners

Secretary of the Board of Commissioners perform the following tasks:

1. *The implementation of the activities / Board of Commissioners agenda, by compiling the monthly meeting agenda, the annual work plan of the Board of Commissioners, to seek approval of the Board of Commissioners;*

2. Dukungan administratif kegiatan Dewan Komisaris dengan bantuan penyelenggaraan dari staf Direksi;
 3. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perusahaan;
 4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat, serta tugas-tugas lain yang terkait;
 5. Pendokumentasian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan pemeliharaan dokumentasi Dewan Komisaris;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9.2. Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris
Pada tahun 2014, Sekretariat Dewan Komisaris telah:
1. Menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sejumlah 12 kali rapat dan rapat konsultasi dengan Direksi sejumlah 12 kali rapat.
 2. Membuat dan mengelola risalah rapat Dewan Komisaris sejumlah 24 risalah.
 3. Mengadministrasikan surat-surat yang masuk atau ditujukan kepada Dewan Komisaris sejumlah 148 surat, dan surat-surat yang diterbitkan oleh Dewan Komisaris baik sebagai jawaban dari surat masuk, maupun dalam jenis surat lainnya sejumlah 67 surat.

2. *The administrative support from activities of the Board of Commissioners with the assistance of the Board of Directors staff organizing;*
 3. *To coordinate the provision of information needed by Board of Commissioners, such as the periodic reports of the Board of Directors (Monthly, Quarterly Reports, Annual Reports, Audit Reports SPI) and reports / other information about the Company;*
 4. *Organize board meetings, preparation and delivery of invitations, delivery of meeting materials and the making minutes of meetings, as well as other tasks related;*
 5. *Documenting the implementation of the Board of Commissioners and maintenance of documentation of the Board of Commissioners;*
 6. *Carry out other tasks given by the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations.*
- 9.2. *Activity Secretary to the Board of Commissioners*
In 2014, the Secretary to the Board of Commissioners had:
1. *Conducting an internal meeting of the Board of Commissioners in total amount of 12 meetings and a consultation meeting with the Board of Directors in the amount of 12 meetings.*
 2. *Create and manage the minutes of board meetings in the amount of 24 treatises.*
 3. *Administer incoming letters or addressed to the Board of Commissioners in total of 148 letters, and letters issued by the Board of Commissioners either in response to incoming mail, as well as in some 67 other types of letter mail.*

Laporan Manajemen Risiko

Bahtera Adhiguna dalam penerapan manajemen risiko dengan menginduk PT PLN (Persero) sebagai Pemegang saham mayoritas dengan meratifikasi Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pedoman Manajemen Risiko dengan Surat Keputusan Direksi PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Nomor A.1410/SP101/DIRUT-2012. Bahwa Penerapan Manajemen Risiko diharapkan perusahaan setiap Divisi/bagian/cabang maupun individu diperusahaan mengenali risiko yang dihadapi dalam pencapaian sasaran/kinerja perusahaan, sehingga dapat mempersiapkan langkah mitigasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara optimal dan juga pengelolaan risiko merupakan salah satu aspek GCG yang harus diterapkan diperusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Menumbuhkan kesadaran risiko dalam menjadikan Manajemen risiko menjadi budaya perusahaan dengan bertumpu pada peningkatan kompetensi SDM.
- Membangun sinergi antar komponen perusahaan melalui penyempurnaan proses bisnis dengan mempertimbangkan peluang dan ancaman perusahaan.
- Membangun sistem kerja perusahaan berbasis Good Corporate Governance (GCG) melalui penerapan kepatuhan sebagai salah satu sasaran Manajemen Risiko.

Persyaratan dan komposisi Anggota Tim Manajemen Risiko

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan, serta meminimalisir dampak yang akan timbul maka perlu dibentuk Satuan Tugas yang mengimplementasi Manajemen Risiko yang selanjutnya disebut Tim, sampai dengan terbentuknya Satuan yang bertanggungjawab atas Manajemen Risiko diperusahaan. Komposisi Anggota Tim adalah perwakilan setiap divisi dengan persyaratan pegawai atau calon pegawai perusahaan dengan kerja sampai akhir tahun berjalan dan dibekali dengan pelatihan Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung jawab Tim

Tim bertugas sebagai berikut :

- Menyusun kerangka kerja
- Mengidentifikasi risiko sebanyak yang mungkin terjadi
- Menganalisa risiko dengan mengukur level risiko yang dihadapi perusahaan dalam pencapaian sasaran strategis perusahaan
- Mengelola risiko secara efektif dan efisien
- Melakukan pemetaan risiko, pengendalian risiko dan pemantauan risiko.
- Melakukan review dan koreksi dokumen Enterprise Risk Management (ERM).
- Melakukan evaluasi dan perbaikan berkesinambungan terhadap penerapan ERM.

Laporan Hasil Implementasi Manajemen Risiko tahun 2014

Profil risiko tahun 2014 disusun sebagai bentuk komitmen manajemen perusahaan untuk melakukan pengelolaan atas risiko-risiko yang dihadapi perusahaan dalam pencapaian sasaran kinerja usaha tahun 2014 berfokus kepada angkutan batubara ke beberapa PLTU di seluruh Indonesia.

Risk Management Report

In the application of risk management Bahtera Adhiguna to have its PT PLN (Persero) as the majority shareholder to ratify the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) on Risk Management Guidelines by the Decree of the Board of Directors of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna No. A.1410/SP101/DIRUT-2012. The Risk Management expected for the company in each division / section / branch as well as individuals in the company to identify risks encountered in achieving the goals / performance of the company, so as to prepare mitigation by utilizing available resources optimally and risk management is one aspect of GCG should applied in the company.

Application of Risk Management has the objective as follows:

- *Growing the risks awareness in making risk management into the corporate culture by focusing on improving HR competencies.*
- *Establishing a synergy between components companies through improvement of business processes by considering the opportunities and threats of the company.*
- *Establishing Good Corporate Governance (GCG) system work-based company through the implementation of compliance as one of the targets of Risk Management.*

Requirements and the composition of the Risk Management Team Members

In order to carry out the management of the risks facing the company, as well as minimizing the impact that will arise the need to set up the Task Force that implements risk management herein after called Tim, until the formation of Unit responsible for risk management in the company. Composition of Team Members are representatives of each division with the requirements of the company officials or candidates to work until the end of the current year and equipped with Risk Management training.

Duties and Responsibilities Team

Tim served as follows:

- *Develop a framework*
- *Identify the risks that might occurred as much as possible*
- *Analyze risks by measuring the level of risks faced by the company in achieving the company's strategic objectives*
- *Managing risks effectively and efficiently*
- *Conduct risks mapping, risks control and risks monitoring.*
- *To review and correction the documents of Enterprise Risk Management (ERM).*
- *Conduct evaluation and continuous improvement through implementation of ERM.*

Reports Implementation Risk Management 2014

The risk profile in 2014 is formulated as a management company's commitment to the management of the risks faced by the company in achieving business performance in 2014 focused on the transport of coal to several power plants in Indonesia.

Gambaran Profil Risiko Tahun 2014 terhadap Korporasi dan Mitigasinya

Risiko Kontrak Angkutan Batubara dari PLN, Anak Perusahaan PLN, dan IPP

Tahun 2014 kinerja usaha BAg tetap fokus pada angkutan batubara, yang terdiri dari kontrak dengan PLN, AP, dan IPP dengan sasaran: angkutan Batubara dari Bukit Asam (Tarahan) tujuan PLTU Suralaya (IP) sebesar 4,62 juta MT, angkutan batubara Kalimantan – PLTU Tg. Jati B 3,13 juta MT, DIV-BAT 3,22 juta MT, PLN BB sebesar 0,45 juta MT, PJB sebesar 0,15 juta MT dan S2P sebesar 0,51 juta MT.

Risiko kegagalan angkutan batubara dari PLN AP, dan IPP tidak tercapai atau tidak terlaksana akan berdampak sangat signifikan (ekstrem) terhadap kinerja usaha BAg tahun 2014, karena kontrak dengan IP sebesar 5 juta MT tidak dapat seluruhnya diangkut dengan kapal SUV, ada kemungkinan gagal dengan kriteria tinggi. Sedangkan kontrak dengan PLN sebesar 1,6 juta MT yang diperoleh dari KPC dengan melakukan perubahan kontrak CIF (Cost Insurance Freight) menjadi FOB (Free On Board) ada kemungkinan gagal dengan kriteria sedang. Sementara belum mendapatkan kontrak dari PLN BB sebesar 1,65 juta MT dan ketidakpastian cargo dari PLN BB atas jumlah dan kualitas ada kemungkinan cargo ditolak oleh PLTU dengan kriteria sedang sehingga target angkutan berkurang.

Mitigasi :

- Menyediakan armada KSO SUV dan tambahan Armada non-SUV
- Mendapatkan kepastian tambahan kontrak dari DIVBAT atas cargo dari KPC untuk rute-rute lain.
- Mendapatkan kepastian kontrak jangka panjang 10 tahun dari PLN BB.
- Mendapatkan kontrak angkutan batubara baru jangka panjang dengan PT IP untuk pengangkutan batubara PT Adaro Indonesia yang bersifat FOB.
- Mempersiapkan armada kapal untuk melayani kontrak angkutan batubara dan menjaga kehandalan kapal milik KM Adhiguna Tarahan, KM Kartini Baruna, KM Sartika Baruna, Supramax, Small Handy, Tug & Barge dan beberapa kapal dari KSO.

Risiko BAg tidak mampu mengembangkan usahanya

BAg mendapatkan penugasan angkutan batubara dari PLN, Anak Perusahaan PLN dan IPP sesuai dengan penugasan/ kontrak yang telah disepakati, sehingga perlu disediakan armada/ alat angkut.

Risiko kegagalan dalam penyediaan armada kapal baik milik maupun KSO, BAg kurang optimal baik dari segi modal kerja operasional maupun kurangnya armada, sehingga menyebabkan pasokan batubara yang ditugaskan tidak tercapai, maka akan berdampak signifikan dengan tingkat kemungkinan cukup besar, karena masih tergantung kepada kapal/ tongkang KSO.

Risk Profile Picture of 2014 Against The Corporation And Related Mitigation

Coal Transport Contract risk from PLN, PLN Subsidiary and IPP

2014 BAg business performance remains focused on the transport of coal, which consists of a contract with PLN, AP, and IPP targeting: transport coal from Bukit Asam (Tarahan) destination Suralaya plant (IP) amounted to 4.62 million MT, Kalimantan coal transportation - Tg. Jati plant B 3.13 million MT, DIV-BAT 3.22 million MT, BB PLN 0.45 million MT, PJB at 0.15 million MT and S2P of 0.51 million MT.

The risk of failure of the transportation of coal from PLN AP, and IPP is not reached or not implemented will impact very significantly (extreme) against business performance of BAg 2014, because the contract with the IP amounted to 5 million MT can not entirely be transported by SUV ship, there is the possibility of high failure criteria. While the contract with PLN 1.6 million MT obtained from the KPC to perform the contract changes CIF (Cost Insurance Freight) to FOB (Free On Board) there is the possibility of medium failing criteria. While not get a contract from BB PLN 1.65 million MT and cargo from PLN BB and the uncertainty over the amount and quality there is the possibility of cargo is rejected by the power plant with the criteria being that the target transport is reduced.

Mitigation:

- Provide additional fleet and Armada SUV KSO non-SUV
- Obtain additional assurance contract of DIVBAT on cargo from KPC for other routes.
- To be assured long-term contract of 10 years from PLN BB.
- Obtain a new coal transport contract long term with PT IP for the transport of coal for PT Adaro Indonesia, which are FOB.
- Prepare the fleet to serve the coal transport contract and maintain reliability of KM Adhiguna Tarahan - owned ship, KM Baruna Kartini, KM Sartika Baruna, Supramax, Small Handy, Tug & Barge and several ships from KSO.

The risk of BAg not being able to expand its business

BAg acquire coal transport assignment of PLN, PLN Subsidiary and IPP in accordance with the assignment / contract that has been agreed upon, so that needs to be provided fleet / conveyance.

The risk of failure in the provision of a fleet of ships either owned or KSO, BAg less than optimal in terms of both operational working capital as well as a lack of fleets, causing assigned coal supply is not achieved, it will have a significant impact at the level of probability is quite large, because it is still dependent on ship / barge KSO.

Mitigasi :

- Mendapatkan SHL untuk investasi kapal.
- Menjaga kapal-kapal milik khususnya yang Self Unloading Vessel dapat beroperasi dengan optimal.
- Mendapatkan kontrak angkutan batubara jangka panjang.
- Menyediakan kapal-kapal baru sesuai dengan jumlah kepastian cargo yang dapat diangkut.
- Mengoptimalkan angkutan batubara dengan kapal milik sendiri.
- Menjalin kerjasama pengoperasian kapal KSO dengan harga yang kompetitif.

Risiko ketidakmampuan BAg mengembalikan pinjaman

Cashflow BAg sangat dipengaruhi oleh kecekatan tim untuk mengumpulkan dokumen kelengkapan tagihan, yang hingga saat ini belum memadai, sehingga berisiko mengakibatkan kelancaran penerimaan usaha tidak selaras dengan jadwal pengembalian pinjaman.

Pengoperasian kapal milik sendiri yang tidak sesuai dengan rencana berisiko mengakibatkan jumlah penerimaan usaha tidak mencukupi kewajiban pengembalian pinjaman.

Mitigasi :

- Melakukan kajian operasional, finansial dan kajian risiko dari setiap kontrak.
- Melancarkan proses penagihan antara lain dengan menetapkan ulang prosedur penagihan.
- Memaksimalkan penggunaan kapal milik sendiri.
- Melakukan penjadwalan ulang / rescheduling pengembalian pinjaman.

Risiko kekurangan pendanaan

Pada tahun 2014 dibutuhkan investasi pengadaan kapal-kapal baru dan bekas dengan nilai sebesar Rp 500 Milliar. Sumber dana tersebut akan diperoleh dari Shareholder Loan, agar program pengembangan armada kapal untuk memenuhi kebutuhan angkutan dapat tercapai.

Risiko kekurangan pendanaan tersebut akan berdampak kepada kinerja usaha yang mengakibatkan BAg masih mengandalkan armada kapal lama dan KSO untuk memenuhi kebutuhan armada.

Kemungkinan kekurangan pendanaan tersebut kriteria kecil karena sumber pendanaan melalui Shareholder Loan (SHL) dan berdampak signifikan.

Mitigasi :

- Melakukan KKO, KKF dan kajian risiko.
- Melaksanakan KSO dengan mitra kerja secara selektif.
- Optimalisasi operasi, dan efisiensi pemeliharaan kapal dengan tetap menjaga laik laut.

Mitigation:

- *Getting SHL for ship investments.*
- *Keeping the ships belonging to particularly Self Unloading Vessel to be operate optimally.*
- *Obtain long term contract for coal transportation.*
- *Provide new ships in accordance with the number of certainty of cargo that can be transported.*
- *Optimizing coal transportation by ship owned.*
- *Cooperate with the operation of ships KSO with competitive price.*

The BAg risk of inability to repay their loans

BAg Cashflow is strongly influenced by the dexterity of a team to collect the bill by completing the documents, which to date have not been adequate, so it has the risk of resulting the income receipts are not aligned with the loan repayment schedules.

Operation of self-owned ship that does not comply with the plan risking inadequate amount of income receipts not enough to repay loan obligations.

Mitigation:

- *Assess the operational, financial and studies the risk of every contracts.*
- *Ease the billing process, among others by redefining billing procedures.*
- *Maximizing the use of the ship's owned.*
- *Perform the rescheduling / rescheduling loan repayment.*

The risk of a shortage fund

In 2014 the investment needed procuring new ships and used with a value of Rp 500 billion. The source of the funds will be obtained from the Shareholder Loan, so that the fleet expansion program meet the transportation needs can be achieved.

The risk of a shortage of funding will have an impact on business performance resulting BAg still relying on the old fleet and KSO to meet the needs of the fleet.

The possibility of shortage of funds consider as small criteria because the sources of funding made through the Shareholder Loans (SHL) which have a significant impact.

Mitigation:

- *Conducting KKO, KKF and risk assessment.*
- *Implement KSO with selective partners.*
- *Optimization of the operation and efficiency of vessel maintenance while maintaining seaworthy.*

Risiko struktur dan pengelolaan organisasi tidak efektif

Target usaha tahun 2014 sangat ketat dan perlu penanganan yang fokus terhadap kinerja angkutan batubara yang akan dicapai. Pengelolaan kapal baik technical maupun Crewing akan dipercayakan kepada Ship Management yang dipilih secara selektif dan ABK yang mengawaki kapal kecil (Tug & Barge) akan dicari dari Crewing Agency. SDM yang ada akan dioptimalkan untuk mengelola pencapaian kinerja RKAP 2014, sehingga target kinerja yang direncanakan tercapai.

Risiko kegagalan Ship Management dari pihak luar maka akan berdampak cukup mempengaruhi tidak tercapainya kinerja 2014, karena BAg akan melakukan Inhouse Ship Management sehingga berakibat SDM menjadi besar, perusahaan akan disibukkan dengan masalah teknik dan Crew/ ABK.

Hal ini kemungkinannya kecil, karena BAg saat ini sudah menggunakan Ship Management yang professional dan berdampak sedang.

Mitigasi :

- Meningkatkan kemampuan SDM Divisi Armada agar cukup handal untuk mengendalikan kinerja Ship Management.
- Pengelolaan kapal milik oleh Ship Management yang professional.
- Pengelolaan pengawakan untuk kapal kecil tug & barge dilaksanakan oleh Crewing Agency.

Risiko manajemen operasi kapal tidak efektif

Untuk memenuhi target angkutan sebesar 12,08 juta MT, diperlukan armada kapal yang handal sesuai dengan rute, jumlah cargo dan fasilitas muat/ bongkar di pelabuhan.

Risiko kegagalan terjadi kesalahan dalam memilih jenis angkutan, akan berdampak signifikan kepada pencapaian kinerja perusahaan.

Kemungkinannya kriteria kecil, karena untuk alat produksi yang akan digunakan sudah disesuaikan dengan rute, jumlah cargo dan fasilitas muat/ bongkar di pelabuhan dan berdampak signifikan.

Mitigasi :

- Menyiapkan dan mengoperasikan armada kapal yang sesuai dengan rute, jumlah kargo dan fasilitas jetty.
- Melakukan pemeliharaan kapal sesuai dengan Plan Maintenance System (PMS).
- Meningkatkan koordinasi jadwal perjalanan kapal.

Risk of ineffective management structure and organization

Business targets in 2014 is very tight and need treatment that focuses on the performance of the transportation of coal to be achieved. Good ship management include technical and crewing will be entrusted to the chosen Ship Management selectively and crew were manning small boats (Tug & Barge) will be sought from the Crewing Agency. Human resources will be optimized to manage the achievement of the performance RKAP 2014, so that the planned performance targets achieved.

The risk of failure of Ship Management from external parties will not affect the achievement of lasting benefit to the performance of 2014, because BAg will do Inhouse Ship Management resulting into a huge human resources, the company will be busy with technical problems and Crew / ABK.

It is unlikely, because BAg is now utilize Ship Management professional and moderate impact.

Mitigation:

- *Increasing the ability of human resources Fleet Division which increase a reliable enough resources to control the performance of Ship Management.*
- *Management of ships owned by the Ship Management professional.*
- *Management of manning for small boats tug & barge carried out by Crewing Agency.*

Risk of ineffective ship operation management

To meet the target of 12.08 million MT transportation, the company needs a reliable fleet in accordance with the route, amount of cargo and facilities loading / unloading at the port.

The risk of failure in choosing the type of transport, will have a significant impact on the achievement of corporate performance.

Chances are minor criteria, due to the production equipment that will be used has been adjusted to the route, amount of cargo and loading / unloading facilities in the port and have a significant impact.

Mitigation:

- *Setting up and operating a fleet of ships according to the route, amount of cargo and jetty facilities.*
- *Perform maintenance of the vessel in accordance with the Plan Maintenance System (PMS).*
- *Improve coordination of itineraries aboard.*

Peta Dampak Risiko

Peta dampak risiko dari profil risiko di atas adalah sebagai berikut :

Map of Impact Risk

Map of the risk impact of the risk profile of the above is as follows:

TINGKAT KEMUNGKINAN	Sangat Besar	E						
	Besar	D				2	3	
	Sedang	C				4		1
	Kecil	B			5	6		
	Sangat Kecil	A						
			1	2	3	4	5	
			Tidak Signifikan	Minor	Medium	Signifikan	Malapetaka	
SKALA DAMPAK								
				I. RENDAH		III. TINGGI		
				II. MODERAT		IV. EKSTREM		

Risiko terhadap kinerja Operasional / Angkutan batubara

Adapun risiko yang dapat terjadi terhadap kinerja operasional angkutan batubara, sebagai berikut :

1. Risiko Hambatan Operasional di pelabuhan muat dan bongkar yang mempengaruhi kinerja usaha Kapal / Tongkang batubara KSO

Pemenuhan kontrak penugasan angkutan batubara PLN Kalimantan tujuan PLTU Tanjung Jati B, PLTU Suralaya dan PLTU Pacitan, dari Tarahan ke PLTU Suralaya dan ke beberapa PLTU 10.000 MW, serta dari Kalimantan Timur ke beberapa PLTU 10.000 MW sangat tergantung kepada kecepatan dan ketepatan muat/ bongkar di kedua pelabuhan tersebut. Akibat hambatan operasional di pelabuhan muat atau bongkar menyebabkan kinerja operasional kapal atau tongkang milik sendiri dan KSO akan mengalami hambatan pada pemenuhan kontrak angkutan.

Mitigasi :

- Mengupayakan komunikasi aktif di bidang operasional kapal dengan otoritas pelabuhan muat dan bongkar, dengan aktif terlibat dalam rapat-rapat koordinasi entitas terkait (coal supplier, shipper, receiver/ consignee) sesuai dengan yang dipersyaratkan kontrak.
- Mengupayakan efektifitas rapat koordinasi dengan Receiver (PLN/ PLTU), Coal Supplier/Miner dan Shipper (BAg dan partner) untuk meminimalkan hambatan operasional yang terjadi.

Risks to the performance of Operations / Coal Transport

As for the risks that can occur on the performance of coal transport operations, as follows:

1. Barriers Operational Risk at the port of loading and unloading affecting business performance Vessel / Barge coal KSO

Fulfillment of contract assignment of coal transportation for PLN Kalimantan destination Tanjung Jati B plant, Suralaya plant and Pacitan plant, from Tarahan to Suralaya plant and to some 10,000 MW power plant, as well as from East Kalimantan to some 10,000 MW power plant is dependent upon the speed and accuracy of loading / unloading in those ports. Due to operational constraints at the port of loading or unloading cause the operational performance of the ship or the owned barge's and KSO will experience obstacles in fulfilling the transport contract.

Mitigation:

- Seek active communication in the field of vessel operating with the authority of the port of loading and unloading, actively involved in coordination meetings related entities (coal supplier, shipper, receiver / consignee) in accordance with the requirements of the contract.
- Promoting effective coordination meeting with the Receiver (PLN / PLTU), Coal Supplier / Miner and Shipper (BAg and partner) to minimize the operational constraints that occur.

Risiko ketergantungan kepada kapal/tongkang KSO milik partner

Untuk sasaran volume angkutan batubara dalam RKAP 2014 sebesar 12,08 juta MT, sebagian masih direncanakan menggunakan kapal/ tongkang KSO milik partner. Hal ini dimaksudkan agar pemenuhan pasokan kontrak angkutan batubara tetap berjalan lancar, sambil menunggu pengadaan/ investasi alat produksi sendiri (kapal/ SPB/ tongkang), ketergantungan akan kapal/ SPB/ tongkang milik partner cukup besar.

Risiko kegagalan kapal/ SPB/ tongkang milik partner mengalami kerusakan/ hambatan teknis akan menyebabkan terganggunya kelancaran shipment/ volume angkutan yang telah direncanakan dan mempengaruhi kinerja operasional.

Mitigasi :

- Mempercepat pengadaan kapal atau Tug & Barge.
- Melakukan pemilihan perusahaan yang akan melakukan KSO secara selektif dengan tarif kompetitif.
- Memperbanyak kontrak jangka panjang agar lebih pasti tersedia kargo untuk kapal yang dibeli.
- Melakukan komunikasi dan koordinasi aktif dengan pemilik kapal KSO.

Risiko pengelolaan kapal milik oleh Ship Management

Kaidah kontrak dengan Ship Management, pihak pemilik kapal (BAg), harus memberikan deposit untuk biaya operasional satu bulan terlebih dahulu dari kapal yang di kelola, demikian juga untuk operasional bulan-bulan selanjutnya. Hal ini diperlukan struktur modal kerja yang kuat. Selain itu kendali operasional di kapal, yaitu crew/ Anak Buah Kapal (ABK), maintenance, store dan spare part, ISM & ISPS Code di bawah kendali Ship Management. Pihak Pemilik hanya bisa memberikan saran atas hasil pengawasan, evaluasi dan analisa terhadap kinerja operasional kapal dimaksud serta laporan dari pihak Ship Management.

Mitigasi

- Menetapkan perusahaan Ship Management berdasarkan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan audit teknis secara berkala atas kapal yang dikelola oleh Ship Management.
- Mengevaluasi secara berkala kinerja Ship Management.
- Memenuhi kebutuhan modal kerja untuk operasional kapal.

The risk of dependence on ship / barge KSO owned by partner

To target tonnages in RKAP 2014 at 12.08 million MT, some still planned to use the ship / barge KSO owned by partners. It is intended to fulfill the supply of coal transport contract continues to run smoothly, while pending procurement / self investing of production equipment (vessel / SPB / barge), the reliance on ship / SPB / barge owned by partner is big enough.

The risk of failure of the ship / SPB / barge owned by partner damage / technical barriers will lead to the disruption of the smooth shipment / freight volume that already planned and affect operational performance.

Mitigation:

- Accelerate procurement of ships or Tug & Barge.
- Perform selection of the company that will do KSO selectively with competitive rates.
- Increase long-term contracts for more certainly available cargo to the purchased ship.
- To communicate and coordinate actively with KSO ship owners.

Risk of management of vessels owned by the Ship Management

Rule contract with Ship Management, the owners of the vessel (BAg), should give a deposit for the operational costs of one month in advance of the ship in governance, as well as for operations in the following months. It required a strong working capital structure. Besides the operational control of the ship, the crew / Ship's Men (ABK), maintenance, stores and spare parts, ISM & ISPS Code under the control of Ship Management. Party owners can only give advice on the results of monitoring, evaluation and analysis of operational performance as well as a report from the vessel referred to the Ship Management.

Mitigation

- Establish company Ship Management based on selection in accordance with the provisions apply
- Conduct periodic technical audits on ships managed by the Ship Management.
- Evaluate regularly the performance of Ship Management.
- Meet the needs of working capital for ship operations.

Risiko ketergantungan kepada pihak ketiga pada pengelolaan Sistem Distribusi/Logistik Batubara

Sejak 5 Agustus 2011 BAg resmi menjadi anak perusahaan PT PLN (Persero). Sesuai arahan Pemegang Saham, BAg ditargetkan menjadi perusahaan jasa transportasi batubara untuk mengamankan pasokan batubara hingga 20% dari total kebutuhan batubara PLTU milik PLN atau yang menyalurkan listrik ke PLN di seluruh Indonesia.

Bisnis jasa transportasi batubara tersebut tidak terlepas dari bisnis jasa penunjangnya, yaitu: Jetty Management, Ship Agency dan Cargo Handling dari/ke kapal ke/dari pelabuhan (stock pile). Saat ini bisnis jasa penunjang tersebut ditangani oleh Pihak Ketiga, sehingga kinerja sistem distribusi batubara sedikit banyak tergantung kepada Pihak Ketiga.

Mitigasi :

- Membentuk Divisi Jetty Management.
- Menyusun SOP proses bisnis yang merupakan tanggung jawab Divisi Jetty Management.

Risiko terhadap kinerja keuangan (cash flow)

Adapun risiko yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan (cash flow), sebagai berikut :

1. Risiko nilai tukar valuta asing

Seluruh pendapatan perusahaan dalam mata uang rupiah dan pendanaan biaya operasional kapal sebagian dalam mata uang asing (pengoperasian kapal KM Kartini Baruna), hal ini sangat berpengaruh pada biaya operasional perusahaan apabila terjadi fluktuasi mata uang asing yang signifikan melebihi asumsi kurs yang ditetapkan.

Mitigasi :

- Di dalam kontrak terdapat klausul yang menyebutkan adanya perubahan tarif angkutan apabila terjadi perubahan kurs.
- Kontrak diupayakan dengan mata uang Rupiah, kenaikan kurs valas akan disesuaikan dengan formulasi yang tidak memberatkan perusahaan.

Risiko Charter Kapal

Setiap penugasan angkutan batubara dari PLN, penyediaan armada akan dilaksanakan semaksimal mungkin dengan menggunakan kapal milik sendiri, melalui KSO atau Time Charter.

Risiko kegagalan KSO/ time charter tidak disepakatinya harga KSO/ Time Charter, tidak tersedianya kapal/ Tug & Barge dipasar dan margin yang diperoleh berkurang.

Mitigasi :

- Memberikan performance bond.
- Pemilihan partner/pemilik kapal lebih selektif dengan mempertimbangkan keuntungan perusahaan.

The risk of dependence on third parties in the management of Distribution System / Coal Logistics

Since August 5, 2011 the official BAg became a subsidiary of PT PLN (Persero). According to the direction of Shareholders, BAg is targeted to be the company's of coal transportation services to secure the coal supply to 20% of the total requirement of coal power plant owned by PLN or distribute electricity to PLN throughout Indonesia.

The coal transportation service business can not be separated from its supporting service businesses, namely: Jetty Management, Ship Agency and Cargo Handling from / to the ship to / from the port (stock pile). Current business supporting services are handled by a third party, so that the performance of coal distribution system more or less dependent on third parties.

Mitigation:

- *Establish Jetty Management Division.*
- *Develop SOP business process that is responsibility of Jetty Management Division.*

Risks against financial performance (cash flow)

As for the risks that can occur on the performance of financial (cash flow), as follows:

1. The risk of foreign exchange rates

The whole company's revenue in rupiah and funding of vessel operating expenses partly in foreign currency (vessel operations of KM Kartini Baruna), this will affect the company's operating costs in the event of fluctuations in foreign currency exchange rates that significantly exceed the specified assumptions.

Mitigation:

- *In the contract there is a clause which states a change in transport fares in case changes in exchange rates.*
- *Contract pursued by Rupiah, the increase in the foreign exchange rate will be adjusted to the formulation that does not burden the company.*

Risk of Charter Boats

Each assignment of coal transport from PLN, the provision of the fleet will be implemented as much as possible by using its own vessels, through KSO or Time Charter.

The risk of failure KSO / time charter is not agreed on the price of KSO / Time Charter, the unavailability of the vessel / Tug & Barge market thus can reduced margins earned.

Mitigation:

- *Provide performance bond.*
- *Selection of partner / vessel owner which more selective by considering the company's profits.*

**PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA
DAN ENTITAS ANAK**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014



PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

Jl. Kalibesar Timur No. 10 - 12, JAKARTA 11110, Indonesia

Telephone : +62 21 6912547 - 49 Telefax : +62 21 6901450, 6902726

Website : <http://www.bahteradhiguna.co.id>

E-mail : pelba@bahteradhiguna.co.id

INSA : 227/INSA/VII/1990

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

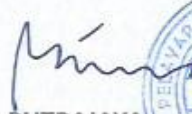
- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama | : | BIMA PUTRAJAYA |
| Alamat kantor | : | Jl. Kalibesar Timur No. 10 – 12
Jakarta Barat (11110) |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Bona Vista III/7 RT.008 RW.006
Lebak Bulus – Cilandak
Jakarta Selatan |
| Nomor telepon | : | 081388319231 |
| Jabatan | : | DIREKTUR UTAMA |
| 2. Nama | : | SURYA FITRIADI |
| Alamat kantor | : | Jl. Kalibesar Timur No. 10 – 12
Jakarta Barat (11110) |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | BSD Golden Vienna I Blok B.1/12
Sektor XII RT.009 RW.014
Rawa Buntu - Serpong |
| Nomor telepon | : | 0811650931 |
| Jabatan | : | DIREKTUR KEUANGAN |

Menyatakan bahwa:

- Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;
- Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
- Kami bertanggungjawab atas system pengendalian intern Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Juni 2015

 BIMA PUTRAJAYA Direktur Utama		 SURYA FITRIADI Direktur Keuangan
--	---	--



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("Perusahaan") dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001

T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dan entitas anak tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

JAKARTA
26 Juni 2015

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Haryanto Sahari', written over the date.

Drs. Haryanto Sahari, CPA
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik No. AP.0223

PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 1/1

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013*</u>	<u>1 Januari 2013*</u>
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	6	317.139	71.793	27.127
Deposito berjangka dibatasi penggunaannya		-	-	6.186
Piutang usaha	7			
Pihak berelasi		332.601	216.658	142.542
Pihak ketiga		3.244	4.030	1.008
Piutang lain-lain	8			
Pihak berelasi		989	6.427	3.580
Pihak ketiga		1.705	2.889	2.017
Persediaan	9	10.888	10.556	6.198
Pajak dibayar dimuka		-	1.868	1.525
Biaya dibayar dimuka dan uang muka		6.057	6.271	4.104
		672.623	320.492	194.287
Aset yang dimiliki untuk dijual	11	108.210	102.073	121.086
Jumlah aset lancar		780.833	422.565	315.373
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap	10	688.090	657.542	444.929
Jumlah aset		1.468.923	1.080.107	760.302

* Disajikan kembali (lihat Catatan 5)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 1/2

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013*	1 Januari 2013*
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha	12	266.372	217.362	132.968
Utang pajak	13	5.903	32.880	48.963
Utang lain-lain		15.798	14.577	2.645
Biaya masih harus dibayar	14	46.582	19.223	19.716
Utang kepada pemegang saham jatuh tempo dalam satu tahun	15	91.116	77.988	43.709
Liabilitas yang terkait langsung dengan aset yang dimiliki langsung untuk dijual	11	55.875	62.245	75.268
Jumlah liabilitas jangka pendek		481.646	424.275	323.269
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang kepada pemegang saham setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	15	874.580	659.011	436.423
Liabilitas imbalan pasca-kerja	24	2.468	1.179	219
Jumlah liabilitas jangka panjang		877.048	660.190	436.642
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 1 juta per saham Modal dasar - 86.696 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 21.674 saham	16	21.674	21.674	21.674
Tambahan modal disetor	17	33.406	33.406	33.406
Saldo laba (defisit)		55.149	(59.438)	(54.689)
Jumlah ekuitas (defisiensi) modal		110.229	(4.358)	391
Jumlah liabilitas dan ekuitas		1.468.923	1.080.107	760.302

* Disajikan kembali (lihat Catatan 5)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 2

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013*
Pendapatan usaha	18	1.278.972	764.157
Beban usaha	19	<u>(1.080.417)</u>	<u>(640.527)</u>
Laba usaha		198.555	123.630
Beban umum dan administrasi	20	(21.897)	(17.179)
Beban bunga	21	(66.104)	(63.032)
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	22	<u>11.406</u>	<u>(23.754)</u>
Laba sebelum pajak		121.960	19.665
Beban pajak	23	<u>(16.140)</u>	<u>(10.764)</u>
Laba tahun berjalan dari operasi yang berjalan		105.820	8.901
Laba (rugi) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan		<u>8.767</u>	<u>(13.650)</u>
Laba (rugi) tahun berjalan		<u>114.587</u>	<u>(4.749)</u>
Pendapatan komprehensif lainnya		<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		<u>114.587</u>	<u>(4.749)</u>

* Disajikan kembali (lihat Catatan 5)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 3

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Surplus (Defisit)	Jumlah Efisiensi (Defisiensi) modal
Saldo per 1 Januari 2013	21.674	33.406	(72.538)	(17.458)
Dampak dari penyajian kembali	-	-	17.849	17.849
Saldo per 1 Januari 2013*)	21.674	33.406	(54.689)	391
Rugi tahun berjalan	-	-	(4.749)	(4.749)
Saldo per 31 Desember 2013	21.674	33.406	(59.438)	(4.358)
Laba tahun berjalan	-	-	114.587	114.587
Saldo 31 Desember 2014	21.674	33.406	55.149	110.229

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 5)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA

Lampiran 4

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	121.960	19.665
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi	<u>(13.124)</u>	<u>(5.276)</u>
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	108.836	14.389
Penyesuaian untuk:		
Pemulihan nilai piutang usaha	-	(98)
Kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	10.693	-
Penyusutan aset tetap	52.783	37.502
Beban bunga	66.104	63.032
Imbalan pasca-kerja	1.289	960
Keuntungan penjualan aset tetap	(28)	(1.925)
Penghasilan bunga	(463)	(79)
Keuntungan dari penerimaan klaim asuransi	<u>-</u>	<u>(813)</u>
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	239.214	112.968
Perubahan modal kerja:		
Piutang usaha	(115.157)	(76.892)
Piutang lain-lain	6.625	(5.031)
Persediaan	(331)	(4.358)
Pajak dibayar dimuka	1.788	(343)
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	258	(2.214)
Utang usaha	49.341	83.220
Utang pajak	(27.693)	(16.821)
Utang lain-lain	1.275	11.932
Biaya masih harus dibayar	<u>(4.180)</u>	<u>(5.259)</u>
Kas dihasilkan dari operasi	151.140	97.202
Pembayaran pajak penghasilan	(15.344)	(10.025)
Pembayaran bunga	<u>(53.601)</u>	<u>(58.266)</u>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>82.195</u>	<u>28.911</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(66.057)	(267.054)
Penerimaan bunga	463	79
Hasil penjualan aset tetap	46	4.367
Penerimaan klaim asuransi	-	15.311
Pencairan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	<u>-</u>	<u>6.186</u>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(65.548)</u>	<u>(241.111)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Perolehan utang dari pemegang saham	306.678	300.649
Pembayaran utang kepada pemegang saham	<u>(77.979)</u>	<u>(43.783)</u>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>228.699</u>	<u>256.866</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	245.346	44.666
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	<u>71.793</u>	<u>27.127</u>
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	<u>317.139</u>	<u>71.793</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK**Lampiran 5/1****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN****31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM**a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("Perusahaan") adalah Perusahaan milik negara yang didirikan pada tahun 1961 dengan nama Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara dan merupakan kelanjutan usaha dari perusahaan maritim milik Belanda, N.V. Nederland Indonesie Steenkolen Handel Maatschap-pij ("NISHM") Tanjung Priok yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah"). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1971, nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Negara Bahtera Adhiguna. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1971. Berdasarkan akta No. 34 tanggal 30 Desember 1971 dari Soeleman Ardjasmita, S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna. Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. J.A.5/63/23 tanggal 11 Agustus 1972, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8 tanggal 26 Januari 1973, Tambahan No. 58.

Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut "Grup") bergerak dalam bidang transportasi bahan tambang serta layanan jasa dermaga.

Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan akta No. 19 tanggal 30 Januari 2012 dari Lenny Janis Ishak S.H., notaris di Jakarta, tentang perubahan kepemilikan dalam rangka pengalihan modal saham milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN") dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero). Akta Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.10-04508 tanggal 9 Februari 2012.

Perusahaan berdomisili di Jakarta beralamat di Jalan Kalibesar Timur No. 10 - 12, Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha dibidang penyelenggaraan jasa angkutan laut dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha PT PLN (Persero). Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah karyawan Perusahaan sebanyak 25 karyawan tetap dan 12 karyawan tidak tetap (tidak diaudit) dan pada tanggal 31 Desember 2013 sebanyak 22 karyawan tetap dan 12 karyawan tidak tetap (tidak diaudit).

b. Susunan pengurus dan informasi lain

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

		2014	2013
Komisaris Utama	:	Muhammad Ikbal Nur	Binarto Bakti Mahardjana
Komisaris	:	Subagio Utomo	Subagio Utomo
Direktur Utama	:	Bima Putrajaya	Bima Putrajaya
Direktur Keuangan	:	Surya Fitriadi	Surya Fitriadi

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/2

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Susunan pengurus dan informasi lain (lanjutan)

Pada tanggal 24 Juli 2014 Binarto Bakti Mahardjana mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama Perusahaan melalui surat Nomor 44/DK/K/VII/2014-R dan digantikan oleh Muhammad Ikbal Nur berdasarkan Akta Nomor 2 Tanggal 12 September 2014 oleh Notaris R. Hendro.N. Asmoro, SH.

c. Entitas anak

Perusahaan memiliki secara langsung entitas anak sebagai berikut:

Entitas anak	Domisili	Jenis usaha	Persentase	Tahun operasi	Jumlah aset	
			Pemilikan		sebelum eliminasi	
			2014 & 2013		2014	2013
PT PBM Adhiguna Putera ("Adhira")	Jakarta	Layanan jasa Dermaga	99,95%	1987	114.036	103.173

2. PENERAPAN REVISI DAN STÁNDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN INTERPRETASI STÁNDAR AKUNTANSI KEUANGAN

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan semua Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru dan revisi serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Penerapan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi dapat mempengaruhi akuntansi untuk transaksi atau perjanjian masa depan.

b. Standar dan Interpretasi Telah Diterbitkan Tetapi Belum Diterapkan

Standar baru dan revisi atas standar yang berlaku berikut telah diterbitkan dan bersifat wajib bagi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015:

- PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Akuntansi Pajak Penghasilan"
- PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama"
- PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain"
- PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar"
- ISAK No. 26 (Revisi 2014), "Penilaian Ulang Derivatif Melekat"

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PENERAPAN REVISI DAN STÁNDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN INTERPRETASI STÁNDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)**b. Standar dan Interpretasi Telah Diterbitkan Tetapi Belum Diterapkan (lanjutan)**

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar baru, termasuk revisi yang lain.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan pada kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Dasar konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak. Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya.

Hasil entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasian.

Kepentingan non-pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan non-pengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali dari aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**c. Dasar konsolidasi (lanjutan)**

Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan non-pengendali adalah jumlah kepentingan non-pengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan non-pengendali atau perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Seluruh laba rugi komprehensif diatribusikan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, keuntungan dan kerugian diakui didalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) keseluruhan nilai wajar yang diterima dan nilai wajar dari setiap sisa investasi dan (ii) nilai tercatat sebelumnya dari aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non-pengendali. Ketika aset dari entitas anak dinyatakan sebesar nilai revaluasi atau nilai wajar dan akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan terakumulasi dalam ekuitas, jumlah yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan akumulasi ekuitas dicatat seolah-olah Perusahaan telah melepas secara langsung aset yang relevan (sebagai contoh direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer langsung ke saldo laba sebagaimana ditentukan oleh PSAK yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" atau, jika sesuai, biaya perolehan saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau pengendalian bersama entitas.

d. Transaksi dan penjabaran mata uang asing

Pembukuan Perusahaan dan entitas anak diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)**

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- c. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham dari Perusahaan.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

f. Aset keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang dan tersedia untuk dijual.

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**f. Aset Keuangan (lanjutan)**Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas *Available For Sale* ("AFS") yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang dimasa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**f. Aset Keuangan (lanjutan)**Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laporan laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lainnya.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**f. Aset Keuangan (lanjutan)**Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

g. Liabilitas Keuangan dan Instrumen EkuitasKlasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Utang kepada pemegang saham pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/9

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

i. Aset Tetap-Pemilikan Langsung

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Kapal dan tongkang	10-25
Peralatan operasional	5
Kendaraan	5
Perlengkapan kantor	5

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di-review setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Biaya awal untuk mendapatkan hak atas tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya - biaya tersebut tidak disusutkan.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Nilai kapal termasuk biaya *docking* yang dikapitalisasi pada saat terjadinya dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sampai dengan *docking* berikutnya.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Aset yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Aset yang sementara waktu tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

k. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada *lessee*. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontijen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui dalam sewa operasi sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari beban sewa dengan dasar garis lurus, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
l. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan dan beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

m. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang direkapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

o. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

q. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

Di dalam penentuan nilai realisasi bersih, Perusahaan tidak menurunkan nilai persediaan yang digunakan untuk sewa kapal dan tongkang apabila Perusahaan mampu memperoleh pendapatan sewa kapal dan tongkang di atas biaya perolehan persediaan tersebut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**r. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dari penyewaan kapal diakui proporsional selama periode perjanjian sewa kapal. Pendapatan dari jasa keagenan diakui pada saat jasa diserahkan. Beban diakui pada saat terjadinya.

s. Imbalan KerjaImbalan Pasca-Kerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Perusahaan juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Perhitungan imbalan pasca-kerja ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari jumlah yang lebih besar diantara nilai kini liabilitas imbalan pasti atau nilai wajar aset program diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung, apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasca-kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial belum diakui dan biaya jasa lalu belum diakui, dan dikurangi dengan nilai wajar aset program.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu dan keuntungan (kerugian) aktuarial diakui langsung pada tahun yang bersangkutan.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

t. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**t. Provisi (lanjutan)**

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

u. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laporan laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laporan laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**v. Aset dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan**

Aset diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk aset-aset seperti aset pajak tangguhan, aset yang terkait dengan imbalan kerja, aset keuangan dan properti investasi yang dicatat pada nilai wajar yang secara khusus dikecualikan dari persyaratan ini.

Kerugian penurunan nilai awal atau selanjutnya diakui atas penurunan nilai aset ke nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset. Keuntungan diakui atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya. Keuntungan atau kerugian yang sebelumnya tidak diakui pada tanggal penjualan aset diakui pada tanggal penghentian pengakuan.

Aset tidak lancar tidak boleh disusutkan atau diamortisasi selama diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Bunga dan beban lainnya yang dapat diatribusikan pada liabilitas dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual tetap diakui.

Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual disajikan secara terpisah dari aset lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Liabilitas yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual disajikan secara terpisah dari liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Operasi yang dihentikan adalah komponen entitas yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah, merupakan bagian dari suatu rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area operasi, atau merupakan suatu entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan dijual kembali. Hasil dari operasi yang dihentikan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari dievaluasi secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari penyajian perkiraan yang diatur di bawah ini.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**
Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki resiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset di-review secara periodik dan disesuaikan apabila perkiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 10. Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

5. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sebagai bagian dari proses penyusunan laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, manajemen Perusahaan telah mempertimbangkan kembali penafsiran terhadap fakta-fakta dan keadaan serta prinsip akuntansi yang sesuai dan menetapkan bahwa laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya perlu disesuaikan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual

Penyesuaian dilakukan terkait aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual menjadi aset aset yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan penyajiannya sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009) - Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan.

Saldo komparatif dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013 telah diubah agar sesuai dengan dasar penyajian dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

b. Eliminasi atas saldo dan transaksi antara Perusahaan dan entitas anak

Penyesuaian terkait eliminasi saldo dan transaksi antara Perusahaan dan entitas anak sebagai dampak dari penyajian kembali konsolidasi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009).

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/16

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 yang telah disajikan kembali adalah sebagai berikut:

	Sebelum penyajian kembali	Penyajian kembali	Sesudah penyajian kembali
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
ASET LANCAR			
Piutang lain-lain	29.288	(19.972)	9.316
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	6.318	(47)	6.271
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	11.436	(11.436)	-
Aset yang dimiliki untuk dijual	-	102.073	102.073
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	218.463	(1.101)	217.362
Liabilitas yang terkait langsung dengan aset yang dimiliki untuk dijual	-	62.245	62.245
EKUITAS			
(Defisit) surplus	(68.912)	9.474	(59.438)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN			
Beban usaha	(645.803)	5.276	(640.527)
RUGI TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN	-	(13.650)	(13.650)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	3.625	(8.374)	(4.749)

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/17

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 1 Januari 2013 yang telah disajikan kembali adalah sebagai berikut:

	Sebelum penyajian kembali	Penyajian kembali	Sesudah penyajian kembali
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
ASET LANCAR			
Piutang lain-lain	24.406	(18.809)	5.597
Aset yang dimiliki untuk dijual	11.436	(11.436)	-
Aset yang dimiliki untuk dijual	-	121.086	121.086
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	135.243	(2.275)	132.968
Liabilitas yang terkait langsung dengan aset yang dimiliki untuk dijual	-	75.268	75.268
EKUITAS			
(Defisit) surplus	(72.538)	17.849	(54.689)

6. KAS DAN BANK

	2014	2013
Kas	52	51
Bank		
Pihak berelasi (Catatan 25)	314.618	69.643
Pihak ketiga		
Rupiah		
Bank Bukopin	2.469	2.099
Jumlah	317.139	71.793

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/18

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PIUTANG USAHA

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
a. Berdasarkan pelanggan		
Pihak berelasi (Catatan 25)	<u>332.601</u>	<u>216.658</u>
Pihak ketiga	16.061	16.847
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(12.817)</u>	<u>(12.817)</u>
Jumlah pihak ketiga-bersih	<u>3.244</u>	<u>4.030</u>
Jumlah piutang usaha-bersih	<u><u>335.845</u></u>	<u><u>220.688</u></u>
b. Berdasarkan umur piutang yang belum diturunkan nilainya		
Belum jatuh tempo	273.303	124.867
Lewat jatuh tempo		
1 s/d 90 hari	59.479	93.404
90 s/d 360 hari	<u>3.063</u>	<u>2.417</u>
Jumlah	<u><u>335.845</u></u>	<u><u>220.688</u></u>
c. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai		
Saldo awal tahun	12.817	13.065
Penambahan (pemulihan)	<u>-</u>	<u>(248)</u>
Jumlah	<u><u>12.817</u></u>	<u><u>12.817</u></u>

Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk secara kolektif untuk seluruh piutang yang telah lewat jatuh tempo.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup, karena tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan jumlah tersebut masih dapat dipulihkan. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang.

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK**Lampiran 5/19****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN****31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG LAIN-LAIN

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pihak berelasi (Catatan 25)	989	6.427
Pihak ketiga		
PT Gresik Bandar Raya	8.503	8.434
Lainnya	<u>1.705</u>	<u>1.539</u>
Jumlah pihak ketiga	10.208	9.973
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(8.503)</u>	<u>(7.084)</u>
Jumlah pihak ketiga-bersih	<u>1.705</u>	<u>2.889</u>
Saldo akhir	<u><u>2.694</u></u>	<u><u>9.316</u></u>
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai		
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Saldo awal	7.084	6.934
Penambahan	<u>1.419</u>	<u>150</u>
Saldo akhir	<u><u>8.503</u></u>	<u><u>7.084</u></u>

Piutang kepada PT Gresik Bandar Raya adalah piutang atas uang muka pinjaman. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang adalah cukup.

9. PERSEDIAAN

Akun ini merupakan persediaan bahan bakar kapal.

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/20

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2014
Biaya perolehan				
Tanah	728	-	-	728
Bangunan	2.332	2.347	34	4.645
Kapal dan tongkang	731.828	42.936	-	774.764
Peralatan operasional	84	-	-	84
Kendaraan	1.440	-	-	1.440
Perlengkapan kantor	3.095	2.360	1.609	3.846
Pekerjaan dalam proses	-	35.706	-	35.706
Jumlah	739.507	83.349	1.643	821.213
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	1.770	135	-	1.905
Kapal dan tongkang	75.656	52.566	-	128.222
Peralatan operasional	68	-	-	68
Kendaraan	1.437	3	-	1.440
Perlengkapan kantor	3.034	79	1.625	1.488
Jumlah	81.965	52.783	1.625	133.123
Jumlah tercatat	657.542			688.090
	1 Januari 2013	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2013
Biaya perolehan				
Tanah	1.020	-	292	728
Bangunan	3.382	-	1.050	2.332
Kapal dan tongkang	491.958	267.048	27.178	731.828
Peralatan operasional	84	-	-	84
Kendaraan	1.440	-	-	1.440
Perlengkapan kantor	3.089	6	-	3.095
Jumlah	500.973	267.054	28.520	739.507
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	2.616	32	878	1.770
Kapal dan tongkang	49.054	37.305	10.703	75.656
Peralatan operasional	68	-	-	68
Kendaraan	1.406	31	-	1.437
Perlengkapan kantor	2.900	134	-	3.034
Jumlah	56.044	37.502	11.581	81.965
Jumlah tercatat	444.929			657.542

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/21

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Jumlah tercatat	18	2.442
Penerimaan dari penjualan aset tetap	<u>46</u>	<u>4.367</u>
Keuntungan penjualan aset tetap	<u>28</u>	<u>1.925</u>

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Beban usaha	52.644	37.304
Beban umum dan administrasi	<u>139</u>	<u>198</u>
Jumlah beban penyusutan	<u>52.783</u>	<u>37.502</u>

Kapal diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), pihak berelasi dan PT Jardine Lloyd Thompson terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 93.905 juta dan US\$ 64 juta tanggal 31 Desember 2014 dan Rp 73.500 juta dan US\$ 63 juta tanggal 31 Desember 2013.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan jumlah tercatat aset.

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan pekerjaan pembangunan 2 *Set Tug Boat* dan 2 *Set Barge* kepada PT Galangan Mercusuar.

11. ASET YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN

a. Aset yang dimiliki untuk dijual

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kas dan setara kas	19.841	12.379
Piutang usaha	71.062	65.935
Piutang lain lain	346	228
Pendapatan yang masih akan diterima	2.545	2.214
Pembayaran dimuka	11.862	18.490
Aset pajak tangguhan	731	453
Aset tetap	1.823	2.374
Aset tidak lancar lainnya	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>108.210</u>	<u>102.073</u>

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/22

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (lanjutan)

b. Liabilitas yang terkait langsung dengan aset yang dimiliki untuk dijual

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Utang usaha	12.317	21.664
Utang pajak	14.305	13.264
Biaya yang masih harus dibayar	14.904	6.070
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2.924	1.812
Utang lain lain	<u>11.425</u>	<u>19.435</u>
	<u>55.875</u>	<u>62.245</u>

c. Operasi yang dihentikan

Aset dan liabilitas terkait dengan PT PBM Adhiguna Putera ("AP"), entitas anak dari Perusahaan telah disajikan sebagai dimiliki untuk dijual setelah adanya rencana aktif manajemen Grup dan pemegang saham untuk menjual AP.

Saat ini Grup sedang melakukan perundingan dengan pihak yang tertarik untuk membeli AP. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup masih dalam proses penyelesaian perjanjian jual beli saham. Transaksi ini diharapkan dapat selesai pada tahun 2015.

Nilai aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014, 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013 atas aset yang dimiliki untuk dijual disajikan menggunakan nilai tercatat AP pada tahun yang terkait.

Tabel berikut memberikan informasi yang terkait dengan arus kas atas operasi yang dihentikan.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	7.563	(9.207)
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(101)</u>	<u>(1.356)</u>
Jumlah	<u>7.462</u>	<u>(10.563)</u>

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/23

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (lanjutan)

c. Operasi yang dihentikan (lanjutan)

Tabel berikut memberikan informasi yang terkait dengan hasil operasi yang dihentikan:

	2014	2013
Pendapatan	169.297	170.919
Beban	(156.683)	(179.293)
Laba (rugi) setelah pajak dari operasi yang dihentikan	12.614	(8.374)

12. UTANG USAHA

	2014	2013
Utang sewa kapal	226.043	191.017
Utang bahan bakar dan pelumas	40.329	26.132
Utang jasa pelabuhan	-	213
Jumlah	266.372	217.362

13. UTANG PAJAK

	2014	2013
Pajak penghasilan final (Catatan 23)	2.554	2.261
Pajak penghasilan non-final (Catatan 23)	716	569
Pajak penghasilan		
Pasal 15	1.956	-
Pasal 21	248	43
Pasal 23	429	1.152
Pasal 4 ayat 2	-	-
Pajak pertambahan nilai	-	-
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar		
Pajak penghasilan badan	-	-
Pajak penghasilan pasal 21	-	-
Pajak penghasilan pasal 23	-	-
Pajak pertambahan nilai	-	-
Surat Tagihan Pajak		
Pajak penghasilan badan	-	4.251
Pajak penghasilan pasal 15	-	409
Pajak penghasilan pasal 21	-	1.255
Pajak penghasilan pasal 23	-	497
Pajak pertambahan nilai	-	22.443
Jumlah	5.903	32.880

Pada tahun 2014 Perusahaan menerima pengurangan sanksi administrasi bunga atas Surat Tagihan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 10.247 juta (Catatan 22).

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/24

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pihak berelasi (Catatan 25)		
Bunga	12.503	17.643
Pihak ketiga		
Pekerjaan dalam proses	17.292	-
Biaya <i>docking</i>	13.578	-
Asuransi	<u>3.209</u>	<u>1.580</u>
Sub-jumlah	<u>34.079</u>	<u>1.580</u>
Jumlah	<u>46.582</u>	<u>19.223</u>

15. UTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Jumlah pinjaman	965.696	736.999
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>91.116</u>	<u>77.988</u>
Bagian jangka panjang	<u>874.580</u>	<u>659.011</u>

Pada tanggal 30 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp 38.560 juta - untuk pencairan tahap VII keperluan membayar pembangunan 2 *Set Tug & Barge* 300 Feet (FT) dan 330 FT.

Pada tanggal 23 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa jaminan sebesar US\$ 21 juta atau Rp 261.438 juta - untuk pencairan keperluan membayar pembelian kapal KM Arimbi Baruna.

Pada tanggal 20 Agustus 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp 6.680 juta - untuk pencairan tahap VI keperluan membayar uang muka 10% pembangunan 2 *Set Tug & Barge* 300 FT & 330 FT.

Pada tanggal 29 Agustus 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp 245.649 juta untuk pencairan tahap V keperluan membayar pelunasan 90% pembelian kapal KM Intan Baruna.

Pada tanggal 1 Juli 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp 32.000 juta untuk pencairan tahap IV keperluan membayar uang muka 10% pembuatan *Self Propeler Barge*.

Pada tanggal 24 Mei 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp 23.000 juta untuk pencairan tahap III keperluan membayar uang muka 10% pembelian kapal KM Intan Baruna.

Pada tanggal 4 Juli 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp 196.000 juta untuk pencairan tahap II keperluan membayar pelunasan 90% pembelian kapal KM Sartika Baruna Rp 126.000 juta dan Rp 70.000 juta keperluan membayar pelunasan 2 *Set Tug & Barge* TB Srikandi Baruna 2401/Bg Baruna Power 3001 dan TB Srikandi Baruna 2402/Bg Baruna Power 3002.

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/25

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 14 Juni 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp 14.000 juta untuk pencairan tahap I keperluan membayar uang muka 10% pembelian kapal KM Sartika Baruna.

Pada tanggal 8 Juni 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan maksimum kredit sebesar Rp 800.000 juta dari PT PLN (Persero), pemegang saham, untuk pendanaan pembelian 5 set *Tug & Barge* 300 Fit, 3 unit *Self Propeller Barge* 10.000 *Dead Weight Tonnage* ("DWT"), 1 unit *Self Unloader Vessel* 17.000 DWT – 23.000 DWT dan 1 unit *Self Unloader Vessel* 13.500 DWT. Jangka waktu pinjaman selama 10 tahun dengan tingkat bunga sebesar 9,88% per tahun.

16. MODAL SAHAM

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh PT PLN (Persero).

Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp 86.696 juta yang terbagi atas 86.696 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham. Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 21.674 juta yang terbagi atas 21.674 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham.

17. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 31 Desember 2008, melalui perjanjian No. A.2420/SP.904/DIRUT/2008, PT PLN (Persero) memberikan fasilitas dana talangan (*bridging finance*) kepada Perusahaan dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30.900 juta untuk keperluan restrukturisasi Sumber Daya Manusia ("SDM") dan *docking* KM Adhiguna Tarahan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengambilalihan/akuisisi seluruh saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan oleh PT PLN (Persero). Terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian sampai dengan tanggal selesai dilakukannya proses akuisisi oleh PT PLN (Persero), maka dana talangan yang telah diterima oleh Perusahaan baik sebagian maupun seluruhnya tidak wajib dikembalikan oleh Perusahaan kepada PT PLN (Persero) selama proses akuisisi.

Berdasarkan addendum perjanjian kedua No.A.388/SP.904/DIRUT-2009 tertanggal 22 Oktober 2009, PT PLN (Persero) menyetujui tambahan dana talangan sebesar Rp 12.400 juta menjadi Rp 45.300 juta.

Perjanjian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui addendum No. A.1067/SP.904/Dirut-2012 tanggal 16 Mei 2012 yang menyatakan antara lain bahwa proses akuisisi Perusahaan oleh PT PLN (Persero) telah selesai dan untuk dana talangan yang telah digunakan oleh Perusahaan sebesar Rp 33.406 juta dikonversikan menjadi tambahan penyertaan modal disetor PT PLN (Persero) ke Perusahaan.

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/26

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PENDAPATAN USAHA

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Sewa kapal dan tongkang Pihak berelasi (Catatan 25)	1.278.641	762.815
Keagenan Pihak ketiga	331	1.342
Jumlah	<u>1.278.972</u>	<u>764.157</u>

19. BEBAN USAHA

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Sewa kapal	874.662	511.681
Bahan bakar dan pelumas	87.193	46.523
Penyusutan (Catatan 10)	52.644	37.304
Manajemen perkapalan	18.318	16.719
Perlengkapan dan peralatan	14.164	8.116
Bongkar muat	5.268	-
Lain-lain	28.168	20.184
Jumlah	<u>1.080.417</u>	<u>640.527</u>

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Personil kantor	6.870	5.188
Tata usaha kantor	4.814	6.435
Pegawai kontrak kerja dan harian	4.616	3.117
Perjalanan dinas	2.099	1.905
Sewa	1.745	336
Beban penyiisihan piutang lain-lain	1.419	-
Lain-lain	334	198
Jumlah	<u>21.897</u>	<u>17.179</u>

21. BEBAN BUNGA

Akun ini merupakan beban bunga atas utang kepada pemegang saham (Catatan 15).

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/27

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pengurangan sanksi administrasi bunga (Catatan 13)	10.247	-
Penghasilan bunga	463	79
Keuntungan penjualan aset tetap	29	1.925
Penghasilan klaim	-	15.311
Kerugian penghapusan aset	-	(14.498)
Denda pajak	-	(29.948)
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(113)	(289)
Lain-lain - bersih	<u>780</u>	<u>3.666</u>
Jumlah	<u>11.406</u>	<u>(23.754)</u>

23. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pajak penghasilan final	15.344	9.154
Pajak penghasilan non-final	<u>796</u>	<u>1.610</u>
Jumlah	<u>16.140</u>	<u>10.764</u>

Pajak penghasilan final

Perhitungan beban pajak penghasilan final dan pajak dibayar dimuka atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pendapatan atas jasa angkutan laut yang dikenakan pajak final	1.278.641	762.815
Beban pajak penghasilan final berdasarkan tarif pajak yang berlaku	15.344	9.154
Utang pajak penghasilan final awal tahun	2.261	1.561
Dikurangi pembayaran pajak penghasilan final	<u>(15.051)</u>	<u>(8.455)</u>
Utang pajak penghasilan final akhir tahun	<u>2.554</u>	<u>2.260</u>

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/28

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Pajak Penghasilan Non-Final

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	121.960	19.665
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi	<u>(13.124)</u>	<u>(5.276)</u>
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	108.836	14.389
Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final-setelah dikurangi beban terkait	(97.694)	(36.973)
Beban yang tidak dapat diperhitungkan		
Penghapusan denda pajak	(10.247)	-
Denda pajak	-	29.948
Lain-lain	<u>2.292</u>	<u>(925)</u>
Laba kena pajak	<u>3.187</u>	<u>6.439</u>

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Beban pajak	796	1.610
Pembayaran pajak dimuka		
Pasal 25	80	1.037
Pasal 23	<u>-</u>	<u>4</u>
Utang pajak kini	<u>716</u>	<u>569</u>

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan hasil perkalian laba sebelum pajak dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	121.960	19.665
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi	<u>(13.124)</u>	<u>(5.276)</u>
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	108.836	14.389
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	<u>27.209</u>	<u>3.597</u>
Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final-setelah dikurangi beban terkait	<u>(24.424)</u>	<u>(9.243)</u>

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/29

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

	2014	2013
Pengaruh pajak atas beban yang tidak diperhitungkan		
Penghapusan denda pajak	(2.562)	-
Denda pajak	-	7.487
Lain-lain	573	(231)
Jumlah	796	1.610
Beban pajak penghasilan final	15.344	9.154
Beban pajak	16.140	10.764

24. IMBALAN PASCA-KERJA

Perusahaan telah membuat provisi untuk imbalan pasca-kerja berdasarkan perhitungan aktuari yang dilakukan Biro Pusat Aktuaria, aktuari independen dalam laporan tertanggal 23 Februari 2015.

Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

	2014	2013
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun
Tingkat diskonto per tahun	8%	8.5%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	6%	6%

Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp 2.468 juta dan Rp 1.179 juta.

25. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat Hubungan Berelasi

- Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia merupakan pemegang saham PT PLN (Persero) dan Badan Usaha Milik Negara.
- PT PLN (Persero) adalah pemegang saham mayoritas Perusahaan.
- PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham utama dari PT PLN Batubara, PT Indonesia Power dan memiliki kepemilikan tidak langsung pada PT Sumber Segara Primadaya.
- PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Tanjung Jati B merupakan unit usaha PT PT PLN (Persero).
- Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Transaksi-Transaksi dengan Pihak Berelasi

	Catatan	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
		Rp	% *)	Rp	% *)
Kas dan bank	6				
Bank Negara Indonesia		314.104	21,38%	15.168	1,40%
Bank Mandiri		472	0,03%	54.475	5,04%
Bank Rakyat Indonesia		42	0,00%	-	-
Sub-jumlah		314.618	21,41%	69.643	6,45%

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/30

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi-Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

	Catatan	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
		Rp	% *)	Rp	% *)
Piutang usaha	7				
PT PLN (Persero)		192.037	13,07%	123.681	12,25%
PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Tanjung Jati B		40.311	2,74%	40.260	3,99%
PT Indonesia Power		60.248	4,10%	29.025	2,88%
PT Sumber Segara Primadaya		37.369	2,54%	20.592	2,04%
PT PLN Batubara		-	-	3.100	0,29%
PT Bukit Asam (Persero)		2.636	0,18%	-	-
Sub-jumlah		332.601	22,63%	216.658	20,06%
Piutang lain-lain	8				
PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Tanjung Jati B		989	0,07%	6.427	0,60%
Jumlah		648.208	44,11%	292.728	27,10%
Biaya masih harus dibayar	14				
PT PLN (Persero)		12.503	0,92%	17.643	1,63%
Utang kepada pemegang saham					
PT PLN (Persero)	15	965.697	71,06%	736.999	67,96%
Jumlah		978.200	71,98%	754.642	69,59%
Pendapatan usaha	18				
PT PLN (Persero)		710.810	55,58%	398.769	52,18%
PT Indonesia Power		294.044	22,99%	126.399	16,54%
PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Tanjung Jati B		192.194	15,03%	174.888	22,89%
PT Sumber Segara Primadaya		65.090	5,09%	58.939	7,71%
PT PLN Batubara		8.865	0,69%	3.820	0,50%
PT Kaltim Prima Coal		5.002	0,39%	-	-
PT Bukit Asam (Persero)		2.636	0,21%	-	-
Sub jumlah		1.278.641	99,98%	762.815	99,82%
Beban bunga	21				
PT PLN (Persero)		66.104	100%	63.032	100%

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 1.386 juta dan Rp 903 juta.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 2.266 juta dan Rp 1.743 juta.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/31

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	2014		2013	
	Mata uang asing (US\$)*	Ekuivalen Rupiah	Mata uang asing (US\$)*	Ekuivalen Rupiah
Aset moneter				
Kas dan bank	21.084.385	262.290	296.364	3.612
Piutang usaha	-	-	42.519	518
Liabilitas moneter				
Utang usaha	-	-	-	-
Jumlah aset - bersih		<u>262.290</u>		<u>4.130</u>

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, kurs konversi yang digunakan Perusahaan adalah sebagai berikut:

		2014	2013
Mata uang	US\$	12.440	12.189

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perusahaan mencatat rugi kurs mata uang asing bersih sebesar Rp 113 juta untuk tahun 2014 dan sebesar Rp 289 juta untuk tahun 2013.

*) Disajikan dalam nilai penuh.

27. PERJANJIAN PENTING

- Pada tanggal 24 Desember 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Indoline Incomekita, PT Lingga Perdana dan PT Brenfuels Indonesia untuk pengadaan bahan bakar minyak untuk Kapal TB Srikandi Baruna 2402 dan KM Intan Baruna dengan jangka waktu perjanjian selama 2 tahun.
- Pada tanggal 20 Maret 2014, Perusahaan mengadakan kerja sama manajemen perkapalan dengan PT Ship Management Indonesia ("SMI") untuk kapal Kartini Baruna selama 2 tahun sampai dengan 19 Maret 2016.
- Pada tanggal 23 Agustus 2013, Perusahaan mengadakan kerja sama dalam manajemen perkapalan dengan PT SMI untuk kapal KM Intan Baruna. Pada tahun 2014, Perusahaan telah menandatangani perpanjangan kontrak kerja sama sampai dengan 22 Agustus 2015.
- Pada tanggal 19 Maret 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Indonesia Power untuk melaksanakan pekerjaan jasa pengangkutan batubara dari PT Bukit Asam (Persero) dengan menggunakan alat angkut dari Pelabuhan Tarahan sampai dengan PLTU Suralaya sampai dengan tahun 2022 dengan rincian *volume* batu bara per tahun sebanyak 5 juta Metrik Ton ("MT").

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK**Lampiran 5/32****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN****31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- e. Pada tanggal 22 Oktober 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Trans Power Marine dalam hal penyewaan kapal milik PT Trans Power Marine dari Pelabuhan Tarahan milik PT Bukit Asam (Persero) ke PLTU Labuan, Suralaya Baru, Teluk Naga, Indramayu, Rembang, Paiton Baru, Cilacap, Pelabuhan Ratu dan lokasi PLTU lainnya sesuai penugasan dari PT PLN (Persero) selama 1 tahun sampai dengan 9 September 2013. Pada tahun 2014, Perusahaan telah memperpanjang jangka waktu perjanjian sampai dengan tanggal 1 September 2016.
- f. Pada tanggal 10 September 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Sumber Segara Primadaya untuk menjalankan strategi pengamanan ketersediaan batubara, peningkatan efisiensi biaya produksi dan peningkatan citra profesional dalam menyelenggarakan pelayanan penyediaan tenaga listrik. Jangka waktu perjanjian berlaku sampai dengan Desember 2016.
- g. Pada tanggal 29 Agustus 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian jasa transportasi laut pengangkutan batubara dengan PT PLN (Persero) untuk jangka waktu 10 tahun. Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan alat transportasi laut yang telah disertifikasi berikut jasa ke pelabuhan, jasa dermaga, jasa labuh, jasa kepanduan, jasa tunda, jasa tambat, jasa navigasi dan lain-lain untuk melaksanakan jasa transportasi laut pengangkutan batubara dari pelabuhan Tarahan ke *Jetty* PLTU Labuan, Suralaya Baru, Teluk Naga, Pelabuhan Ratu, Indramayu, Rembang, Labuhan Angin, Paiton Baru, Cilacap dan Pacitan. Jangka waktu perjanjian adalah berlaku selama 10 tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- h. Pada Tanggal 29 Juni 2012, Perusahaan mengadakan kerja sama dalam manajemen perkapalan dengan PT SMI untuk kapal Sartika Baruna selama 1 tahun. Pada tanggal 1 juli 2013 perusahaan menandatangani perpanjangan kontrak selama 6 bulan sampai dengan 28 Desember 2013. Pada tanggal 27 Desember 2014, Perusahaan menandatangani perpanjangan kontrak untuk jangka waktu 6 bulan sampai dengan 29 Juni 2014. Pada tanggal 24 Juni 2014, Perusahaan menandatangani perpanjangan kontrak untuk jangka waktu 6 bulan sampai dengan 29 Desember 2014. Pada tanggal 29 Desember, Perusahaan menandatangani perpanjangan perjanjian kontrak untuk jangka waktu 2 bulan sampai dengan 28 februari 2015. Hingga tanggal laporan keuangan, perpanjangan masih dalam proses.
- i. Pada tanggal 20 April 2012, Perusahaan mengadakan kerja sama dalam manajemen perkapalan dengan PT SMI untuk kapal KM Adhiguna Tarahan selama 1 tahun. Pada tanggal 31 Mei 2013 perusahaan menandatangani perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Pada tanggal 28 April 2014 Perusahaan menandatangani perpanjangan kontrak selama 6 bulan sampai dengan 19 oktober 2014. Pada tanggal 17 oktober 2014, perusahaan memperpanjang kontrak memperpanjang kontrak selama 6 bulan sampai dengan 19 April 2015. Hingga tanggal laporan keuangan, perpanjangan masih dalam proses.
- j. Pada tanggal 27 Januari 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa kapal dengan PT PLN Unit Pembangkitan Tanjung Jati B. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 20 tahun sejak penandatanganan perjanjian.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. LITIGASI

- i. Pada tanggal 5 Februari 2010, Perusahaan menghadapi gugatan ganti rugi dari Ny Ong A Kim dan kawan-kawan sehubungan dengan kepemilikan tanah JL MT Haryono Kav. 14 Jakarta Selatan sebesar Rp 100 juta per tahun, jika tanah tersebut disewakan atau sebesar Rp 4.700 juta jika tanah tersebut dipakai untuk usaha untuk kerugian material dan Rp 1.000 juta untuk kerugian *immaterial*. Berdasarkan putusan tanggal 26 Agustus 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menerima sebagian gugatan dari penggugat.

Atas putusan ini, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada tanggal 16 Januari 2012, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak permohonan banding Perusahaan. Pada tanggal 29 Maret 2012, Perusahaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- ii. Pada tanggal 27 Agustus 2008, Perusahaan menuntut ganti rugi kepada PT Bumi Laut Shipping Service sebagai tergugat I, PT Indonesia Fortune Lloyd sebagai tergugat II dan PT Layar Sentosa Shipping Corporation sebagai tergugat III untuk membayar kewajiban Perusahaan sebesar Rp 1.104 juta dan ganti rugi sebesar Rp 1.000 juta sehubungan dengan tindakan tergugat yang melakukan wanprestasi. Pada tanggal 30 Juni 2009, Pengadilan negeri jakarta memutuskan menghukum tergugat I, II dan III untuk membayar kewajiban Perusahaan sebesar Rp 1.104 juta. Pada tanggal 13 Juli 2009, tergugat I, II dan III mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Pada tanggal 17 Januari 2011, Pengadilan Banda Aceh memutuskan menolak permohonan tergugat. Atas putusan ini, para tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tanggal 22 Maret 2013 diputuskan oleh Mahkamah Agung menguatkan Putusan PN No.619 K/Pdt/2012 yaitu Pengadilan Negeri Jakarta memutuskan menghukum tergugat I, II dan III untuk membayar kewajiban Perusahaan sebesar Rp 1.104 juta.

- iii. Pada tanggal 16 Februari 2010, PT Axis Vessilindo Internusa ("AXI") mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp 2.500 juta kepada Perusahaan sebagai tergugat I dan PT Asuransi Jasindo sebagai tergugat II sehubungan dengan kandasnya KM Adhiguna Jaya. Berdasarkan putusan tanggal 30 Nopember 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan menolak gugatan PT AXI. Pada tanggal 14 Desember 2010, PT AXI mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

Pada tanggal 23 September 2013, Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan menolak permohonan penggugat. Pada tanggal 20 Februari 2014, PT AXI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan kinerja, perkara ini masih dalam proses di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/34

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian instrumen keuangan Perusahaan berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan:

31 Desember 2014			
	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Tersedia untuk dijual	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi
			Jumlah aset dan liabilitas keuangan
Aset keuangan			
Kas dan bank	317.139	-	317.139
Piutang usaha	335.845	-	335.845
Piutang lain-lain	2.694	-	2.694
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	-	108.210	108.210
Jumlah aset keuangan	655.678	108.210	763.888
Liabilitas keuangan			
Liabilitas keuangan jangka pendek			
Utang usaha	-	-	266.372
Utang lain-lain	-	-	15.798
Utang kepada pemegang saham	-	-	91.116
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	-	-	373.286
Liabilitas keuangan jangka panjang			
Utang kepada pemegang saham	-	-	874.580
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	1.247.866
31 Desember 2013			
	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Tersedia untuk dijual	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi
			Jumlah aset dan liabilitas keuangan
Aset keuangan			
Kas dan bank	71.793	-	71.793
Piutang usaha	220.688	-	220.688
Piutang lain-lain	9.316	-	9.316
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	-	102.073	102.073
Jumlah aset keuangan	301.797	102.073	403.870
Liabilitas keuangan			
Liabilitas keuangan jangka pendek			
Utang usaha	-	-	217.362
Utang lain-lain	-	-	14.577
Utang kepada pemegang saham	-	-	77.988
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	-	-	309.927
Liabilitas keuangan jangka panjang			
Utang kepada pemegang saham	-	-	659.011
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	968.938

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)
a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan tidak mempunyai instrumen keuangan yang diklasifikasi sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui laba rugi dan tidak memiliki liabilitas yang diklasifikasi sebagai nilai wajar melalui laba rugi.

b. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha. Struktur modal Perusahaan terdiri dari utang kepada pemegang saham dan ekuitas.

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan terekspose pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi dalam mata uang asing. Kebijakan Perusahaan adalah untuk mengelola eksposur mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

Jumlah eskposur mata uang bersih Perusahaan pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 26.

Sensitivitas mata uang asing

Perusahaan terekspose terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing dalam Dolar Amerika Serikat pada Kas dan Bank pada tahun 2014 dan Kas dan Bank dan Piutang Usaha pada tahun 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing Dolar Amerika Serikat meningkat/menurun sebesar 10% dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak untuk tahun 2014 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp 26.228 juta dan pada tahun 2013 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp 309 juta.

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Perusahaan memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspose terhadap risiko tingkat suku bunga. Perusahaan mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan mengambang.

Perusahaan tidak mengklasifikasikan instrumen keuangan dengan suku bunga tetap dan yang tidak dikenakan bunga pada nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk dijual, sehingga eksposur atas risiko suku bunga tidak timbul untuk instrumen dengan suku bunga tetap dan yang tidak dikenakan bunga karena perubahan suku bunga tidak berdampak terhadap laba rugi atau pendapatan komprehensif lainnya.

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/36

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Profil suku bunga

Profil suku bunga Perusahaan terhadap aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014				
	Tingkat bunga mengambang	Tingkat bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Jumlah
Aset keuangan				
Kas dan bank	317.087	-	52	317.139
Piutang usaha	-	-	335.845	335.845
Piutang lain-lain	-	-	2.694	2.694
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	-	-	108.210	108.210
Jumlah aset keuangan	317.087	-	446.801	763.888
Liabilitas keuangan				
Utang usaha	-	-	266.372	266.372
Utang lain-lain	-	-	15.798	15.798
Utang kepada pemegang saham	-	965.696	-	965.696
Jumlah liabilitas keuangan	-	965.696	282.170	1.247.866
31 Desember 2013				
	Tingkat bunga mengambang	Tingkat bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Jumlah
Aset keuangan				
Kas dan bank	71.742	-	51	71.793
Piutang usaha	-	-	220.688	220.688
Piutang lain-lain	-	-	9.316	9.316
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	-	-	102.073	102.073
Jumlah aset keuangan	71.742	-	332.128	403.870
Liabilitas keuangan				
Utang usaha	-	-	217.362	217.362
Utang lain-lain	-	-	14.577	14.577
Utang kepada pemegang saham	-	736.999	-	736.999
Jumlah liabilitas keuangan	-	736.999	231.939	968.938

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/37

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Profil suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2014, jika suku bunga pada tanggal tersebut mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 50 basis poin dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak untuk tahun berjalan atas kas dan bank lebih tinggi atau lebih rendah sebesar Rp 4.828 juta.

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

Untuk kas dan bank Perusahaan mengelola rekening pada beberapa Bank untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

Perusahaan tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap satu pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu yang mempunyai karakteristik yang sama.

Kualitas kredit aset keuangan

Tabel berikut ini menunjukkan kualitas kredit aset keuangan Perusahaan:

	31 Desember 2014			
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Jumlah
Kas dan bank	317.139	-	-	317.139
Piutang usaha	273.302	62.543	-	335.845
Piutang lain-lain	2.694	-	-	2.694
Jumlah	593.135	62.543	-	655.678

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**31 DESEMBER 2014**

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)****iii. Manajemen risiko kredit (lanjutan)**

	31 Desember 2013			Jumlah
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	
Kas dan bank	71.793	-	-	71.793
Piutang usaha	124.866	95.822	-	220.688
Piutang lain-lain	9.316	-	-	9.316
Jumlah	205.975	95.822	-	301.797

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan, jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Tabel di atas termasuk aset keuangan yang mana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif. Tidak praktis untuk mengidentifikasi penurunan nilai aset keuangan tersebut secara individu dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik risiko yang sama dimana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan simpanan dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2014. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar. Tanggal jatuh tempo kontraktual berdasarkan pada tanggal paling awal dimana Perusahaan diwajibkan untuk membayar.

PT PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 5/39

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2014

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Keterangan	2014				
	Dalam satu tahun	1-3 tahun	3-5 tahun	Lebih dari lima tahun	Jumlah
Utang usaha	266.372	-	-	-	266.372
Utang lain-lain	15.963	-	-	-	15.963
Utang kepada pemegang saham	91.116	227.103	227.103	420.376	965.698
Jumlah	373.451	227.103	227.103	420.376	1.248.033

Keterangan	2013				
	Dalam satu tahun	1-3 tahun	3-5 tahun	Lebih dari lima tahun	Jumlah
Utang usaha	218.463	-	-	-	218.463
Utang lain-lain	14.577	-	-	-	14.577
Utang kepada pemegang saham	77.988	163.505	163.505	332.000	736.998
Jumlah	311.028	163.505	163.505	332.000	970.038

Nilai wajar instrumen keuangan

Kecuali dijabarkan pada tabel berikut ini, Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Liabilitas diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Utang kepada pemegang saham	965.698	965.789	736.999	764.135
Jumlah	965.698	965.789	736.999	764.135

Nilai wajar instrumen keuangan diatas ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar dengan penyesuaian kredit pada tanggal pelaporan.

30. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh direksi untuk diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2015.



PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

Jl. Kalibesar Timur No. 10 – 12, JAKARTA 11110, Indonesia.

Telephone : 62 21 6912547 – 49 | Telefax : 62 21 6901450, 6902726 |

<http://www.bahteradhiguna.co.id> | Email : pelba@bahteradhiguna.co.id

INSA : 227/INSA/VII/1990